

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI
BAGOREJO 03 GUMUKMAS JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Cahaya Putri Anggraeni
NIM: 211101030023

**UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI
BAGOREJO 03 GUMUKMAS JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER
Cahaya Putri Anggraeni
NIM: 211101030023

**UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI
BAGOREJO 03 GUMUKMAS JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Oleh:

Cahya Putri Anggareni
NIM: 211101030023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Dr. Ubaidillah Afif, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIP. 198512042015031002

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI BAGOREJO 03 GUMUKMAS JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Hari : Senin

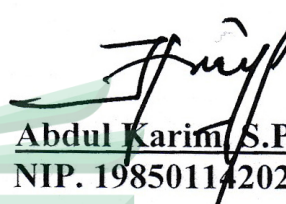
Tanggal: 28 April 2025

Tim Penguji

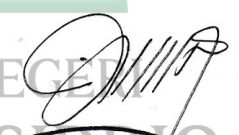
Ketua

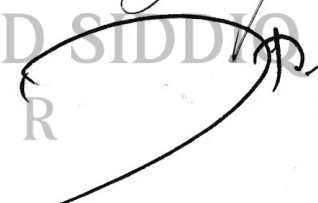
Sekretaris


Dr. Ahmad Royani, S.Pd.I., M. Pd.I
NIP. 198904172023211022


Abdul Karim, S.Pd.I M.Pd.I
NIP. 198501142023211015

Anggota:

1. Dr. Shoni Rahmatullah Amrozi, M.Pd.I ()

2. Dr. Ubaidillah Afif, S.Pd.I., M.Pd.I ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan




Dr. H. Abdul Mu'is S.Ag., M.Si.
NIP. 197304242000031005

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا
بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ
دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : “Bagi (manusia) ada (malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Qs. Ar Ra’d: 11)*



* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019), 346.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji bagi-Mu ya Allah. Tuhan semesta alam yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Dengan penuh syukur saya ucapkan atas segala nikmat, rahmat, dan petunjuk dalam setiap perjalanan yang Engkau berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Dengan rasa bangga dan rasa syukur, skripsi sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah Ibu tercinta. Bapak Hanifan dan Ibu Fatihatul Insiyah, S.Pd yang tiada hentinya selalu mendoakan, menyayangi dan memberi dukungan penuh kepada saya dalam meraih cita-cita. Kepada Ayah, yang selalu menjadi panutan serta Ibu, yang senantiasa memberikan motivasi. Tanpa bimbingan kalian saya tidak akan berada di titik ini. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan, semoga Ayah dan Ibu sehat, bahagia, dan panjang umur. Senantiasa diberikan keberkahan hidup oleh Allah swt. Aamiin
2. Kakek dan nenek, H. Masykur dan Hj. Umi Salamah yang selalu mendoakan saya dalam menjalankan pendidikan. Semoga selalu diberikaan kesehatan oleh Allah SWT
3. Kakak saya Rizqi Maulida Rahayu, S.Pd dan Rijal Baihaqi yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalui melindungi dan memberikan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kalian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin segala rasa puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir melalui skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh program sarjana.

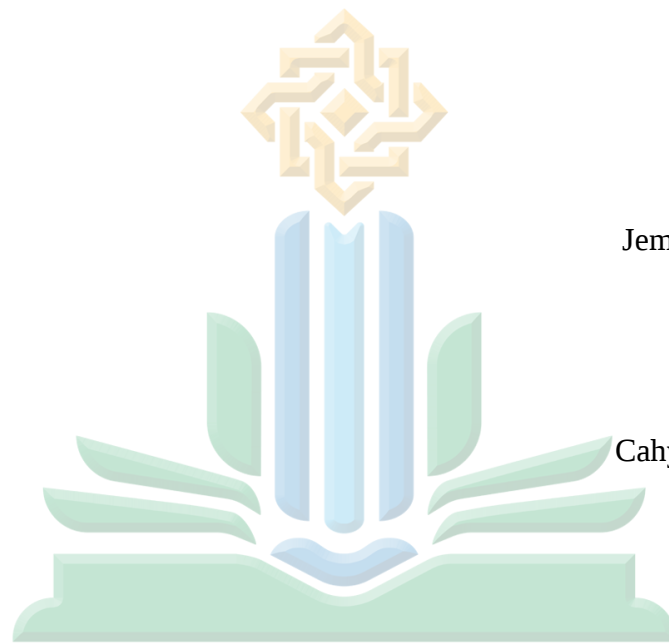
Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad saw yang telah membawa cahaya Islam dan menunjukkan jalan yang benar. terselesainya dan keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis menyadari dan menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,MM., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta fasilitas yang memampuni sehingga penulis dapat menuntut ilmu dengan baik di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Abdul Muis, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. Nuruddin, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjalankan dan mengelola pendidikan dan pengajaran.

4. Bapak Dr. Ahmad Royani, S.Pd., M.Pd.I., selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ach. Faridul Ilmi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis semasa perkuliahan
6. Bapak Dr. Ubaidillah Afif, S.Pd.i., M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta kesabarannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terkhusus kepada dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menuntut ilmu.
8. Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolahnya dan juga segenap guru serta staf SDN Bagorejo 03 yang membantu terlaksananya dalam proses penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan khususnya kepada Chintya Alifa, Siti Almar'atus Sholeha, Nur Wafiq, Nurul Qomariyah, Andini Karunia, Syairozi, Agil Dwi, yang juga memperjuangkan dan menyelesaikan studi. Penulis ucapkan terimakasih karena selama menuntut ilmu penulis sudah dibantu secara materi maupun non-materi, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih sudah menemani,

memberi semangat, serta dukungannya. Semoga tetap sehat dan hal-hal baik selalu menghampiri kalian semua.

10. Untuk diri sendiri, karena telah bertanggung jawab menyelesaikan studi dengan tepat waktu.



Jember, 17 April 2025

Cahya Putri Anggraeni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Cahya Putri, 2025 : *Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember*

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak menjadi salah satu episode program dari kebijakan Merdeka Belajar yang memfokuskan pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi serta karakter. Pendekatan ini berfokus pada implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak di SDN Bagorejo 03 melalui model implementasi kebijakan George Edward III terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Terdapat keunikan lokasi penelitian yakni SDN Bagorejo 03 merupakan satu-satunya sekolah dasar negeri se-kecamatan Gumukmas yang lolos dan mengimplementasikan program sekolah penggerak pada angkatan 2.

Fokus dalam penelitian ini yakni 1) bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan di sekolah dasar negeri bagorejo 03 gumukmas jember ? 2) bagaimana sumber daya dalam implementasi kebijakan di sekolah dasar negeri bagorejo 03 gumukmas jember 3) bagaimana disposisi dalam implementasi kebijakan di sekolah dasar negeri bagorejo 03 gumukmas jember 4) bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan di sekolah dasar negeri bagorejo 03 gumukmas jember. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan di SDN Bagorejo 03.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis studi kasus. Subjek penelitian ini meliputi: kepala sekolah, komite pembelajaran, dan guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data yakni menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak di SDN Bagorejo 03 telah berjalan sesuai dengan empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Komunikasi yang terjalin berjalan dengan baik. Dari segi sumber daya hal yang perlu ditingkatkan yaitu fasilitas IT. Disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan semangat kolaboratif dalam mendukung program. Struktur birokrasi juga mendukung melalui prosedur pelaksanaan dan pembagian tugas. Faktor penghambat terletak pada dukungan wali murid terkait PSP, guru belum terbiasa dengan pendekatan baru, beban kerja guru bertambah. Faktor pendukung terletak pada semangat kolaborasi warga sekolah dan dukungan pemerintah.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Tedahulu	12
B. Kajian Teori	18
1. Implementasi Kebijakan	18
2. Kebijakan Pendidikan	29

3. Program Sekolah Penggerak	39
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	64
B. Lokasi Penelitian.....	64
C. Subyek Penelitian.....	65
D. Teknik Pengumpulan Data.....	65
E. Analisis Data	68
F. Keabsahan Data.....	70
G. Tahap-tahap Penelitian.....	71
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	74
A. Gambaran Obyek Penelitian	74
B. Penyajian dan Analisis Data	81
C. Pembahasan Temuan.....	126
BAB V PENUTUP	137
A. Simpulan	137
B. Saran-saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....	140
LAMPIRAN-LAMPIRAN	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah sekolah terpilih menjadi Sekolah Penggerak di Kabupaten Jember	5
Tabel 2.1 Persamaan & Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2.2 Kondisi Kepala Satuan Pendidikan.....	58
Tabel 4.1 Data Pendidik dan Tenaga Pendidikan	78
Tabel 4. 2 Data Peserta didik SDN Bagorejo 03.....	79
Tabel 4. 3 Prasarana SDN Bagorejo 03	79
Tabel 4. 4 Sarana SDN Bagorejo 03	80
Tabel 4.5 Pelaksanaan Kegiatan P5 di SDN Bagorejo 03 Tahun Ajaran 2024/2025	119
Tabel 4. 6 Susunan Komite Pembelajaran di SDN Bagorejo 03.....	122
Tabel 4. 7 Tim Pelaksanaan P5 di SDN Bagorejo 03	122
Tabel 4. 8 Hasil Temuan	124

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan proses transformasi sekolah Indonesia	42
Gambar 2.2 Perencanaan berbasis data	47
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	78
Gambar 4. 2 Kegiatan Lokakarya Tingkat Kabupaten.....	97
Gambar 4. 3 Kegiatan PMO Di SDN Bagorejo 03 Gumukmas.....	98
Gambar 4. 4 Sertifikat PMM.....	99
Gambar 4.5 Sertifikat PMM.....	99
Gambar 4. 6 Kegiatan IHT Di SDN Bagorejo 03 Gumukmas	100
Gambar 4.7 Kegiatan Komunitas Belajar (Kombel) Di SDN Bagorejo 03 Gumukmas	101
Gambar 4. 8 Workshop Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bagi Guru....	101
Gambar 4. 9 Fasilitas Setiap Kelas Di SDN Bagorejo 03 Gumukmas	111
Gambar 4.10 Panen Karya P5 di SDN Bagorejo 03	120

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara merubah sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kualitas sehingga mampu menjadikan Indonesia negara yang maju. Yang mana untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan kebijakan pendidikan sebagai landasan untuk menyamakan mutu pendidikan di Indonesia.¹ Berbagai program transformasi sekolah telah dilakukan diantaranya, melalui kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah Rujukan, dan Sekolah Model. Namun kenyataanya program-program tersebut belum mampu menjangkau di berbagai sekolah secara merata di antar daerah.² Dengan demikian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan terobosan melalui program Merdeka Belajar yang merupakan langkah strategis dan inovatif dengan tujuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan sebagai usaha dalam mengembangkan kebijakan peningkatan mutu pendidikan secara merata di antar daerah.³

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim menerbitkan surat edaran No. 1 tahun 2020 mengenai kebijakan

¹ Dinta Nurachma , Arenawati , “Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Kebijakan Merdeka Belajar Di Kabupaten Pandeglang,” *Ilmiah Niagara*, Vol. VII no. 1 (2024).

² Indah Pratiwi et al., “Risalah Kebijakan Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan | 2020,” [Http://puslitjadikbud.Go.Id/](http://puslitjadikbud.go.id/), 2020, 39–40.

³ Fahrian Firdaus Syafi’i, “Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak,” *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN DASAR “Merdeka Belajar Dalam Menyambut Era Masyarakat 5.0,”* no. November (2021): 46–47.

Merdeka Belajar atau Kebebasan Belajar. Merdeka belajar merupakan pemberian kebebasan kepada satuan lembaga pendidikan dan otonominya dan merdeka dari birokratisasi, yang mana pendidik di berikan kebebasan dari birokrasi yang sulit dan peserta didik dapat dengan bebas untuk menempuh bidang yang mereka sukai. Dengan demikian merdeka belajar bisa dimaksudkan dengan pemberian ruang kepada peserta didik yang memberikan kesempatan yang luas dan nyaman tanpa adanya tekanan dengan memperhatikan bakat yang dimiliki peserta didik.⁴

Sampai dengan Agustus 2023 telah ada 26 episode dari program Merdeka Belajar yang di luncurkan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi antara lain.⁵ 1) Asesmen Nasional, USBN, RPP, dan PPDD, 2) Kampus Merdeka, 3) Penyaluran dan Penggunaan Dana Bos, 4) Program Organisasi Penggerak, 5) Guru Penggerak, 6) Transformasi Dana Pemerintah Untuk Perguruan Tinggi, 7) Program Sekolah Penggerak, 8) SMK Pusat Unggulan, 9) KIP Kuliah Merdeka, 10) Perluasan Program Beasiswa LPDP, 11) Kampus Merdeka Vokasi, 12) Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah, 13) Merdeka Budaya dengan Kanal Indonesia, 14) Kampus Merdeka dari Kekerasan Sexual, 15) Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar, 16) Akselerasi dan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, 17) Revitalisasi Bahasa Daerah 18) Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesia, 19) Rapor Pendidikan Indonesia, 20) Praktisi Mengajar, 21) Dana

⁴ Fita putridiyanti, "Merdeka Belajar Dalam Pendidikan Indonesia," *Merdeka Belajar Dalam Pendidikan Indonesia* 3, no. 2 (2022): 1–13, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/jumpa>.

⁵ KSPTK, "26 Episode Merdeka Belajar Kemendikbudristek" (2024) <https://kspstendik.kemdikbud.go.id/berita/detail/26-episode-merdeka-belajar-kemendikbudristek>, diakses pada 6 Juni 2024

Abadi Perguruan Tinggi, 22) Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi, 23) Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia, 24) Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan, 25) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, 26) Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi.

Program-program dari Merdeka Belajar tersebut jika dijalankan dengan baik tentu akan meningkatkan hasil belajar siswa, dengan demikian program yang dijalankan dapat menjadi salah satu langkah awal dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara komprehensif.⁶ Salah satu bagian dari program Merdeka Belajar yaitu Program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak merupakan sekolah yang menekankan pada pengembangan hasil siswa secara holistik atau menyeluruh yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi serta karakter guna mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.⁷

Program Sekolah Penggerak merupakan program lanjutan untuk menyempurnakan transformasi sekolah sebelumnya. Sekolah Penggerak mengakselerasikan sekolah baik negeri maupun swasta dengan berbagai kondisi untuk bergerak maju 1 sampai 2 tahap. Program sekolah penggerak merupakan visi mewujudkan Indonesia maju melalui terciptanya Pelajar Pancasila dengan 5 intervensi yaitu; 1. Pendampingan Konsultatif dan Asimetris 2. Penguatan Sumber Daya Manusia Sekolah 3. Pembelajaran

⁶ Aisam, Sulafah Fathin Khannanah, and Lita Juniati, "Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar (Studi Pada Guru Penggerak Di SDN Pisang Candi 4 Kota Malang)," *Journal on Education* 05, no. 01 (2022): 1284–94.

⁷ Pratiwi et al., "Risalah Kebijakan Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan"

Dengan Paradigma Baru 4. Perencanaan Berbasis Data 5. Digitalisasi Sekolah.⁸

Program Sekolah Penggerak telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak.⁹ Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar kebijakan memiliki dampak serta tujuan yang diinginkan.¹⁰ Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah bagaimana suatu kebijakan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹¹ Menurut Mulyadi implementasi mengarah pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam sebuah keputusan.¹² Implementasi Program Sekolah Penggerak telah terlaksanakan di beberapa sekolah di Indonesia termasuk di Kabupaten Jember.

Tabel berikut ini merupakan jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Jember yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸Kemendikbudristek, “Tentang Sekolah Penggerak” (2021), <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 7 juni 2024

⁹ Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak

¹⁰ Rulinawaty Kasmad, “Studi Implementasi Kebijakan Publik,” *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, no. 1 (2017): 51–66,

¹¹ Gustaf Undap Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, “Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado,” *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat* 1, no. 2 (2021): 1–11.

¹² Dr. Muhammad Saidi M.M et al., “C. Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012,” *Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2021): 41, <https://doi.org/10.54980/imkp.v4i2.142>.

Tabel 1.1 Jumlah sekolah terpilih menjadi Sekolah Penggerak di Kabupaten Jember

Angkatan	Tahun	PAUD	SD	SMP	SMA	SLB	TOTAL
1	2021	0	0	0	0	0	0
2	2022	31	48	5	3	1	88
3	2023	7	7	4	0	0	18

Sumber: paudikdasmen kemdikbud¹³

Terlihat dari tabel diatas diketahui bahwa tidak ada sekolah terpilih yang mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak pada angkatan 1, hal tersebut dikarenakan Kabupaten Jember mendapatkan kesempatan untuk mendaftar menjadi Sekolah Penggerak mulai dari angkatan 2. Sehingga pada angkatan 2 sudah cukup banyak yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak dengan total 88 sekolah terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, SLB meskipun mengalami penurunan angka pada Angkatan ke 3. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan menengah No.0301/C/HK.00/2022 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan II,¹⁴ SDN Bagorejo 03 Gumukmas Jember menjadi salah satu sekolah yang lolos seleksi Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa selama Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember, ditemukan berbagai kendala yang menghambat optimalisasi pelaksanaannya yakni a) tidak semua

¹³ “Lokasi Program Sekolah Penggerak” Kemendikbudristek. 05 Mei 2025. <https://psp-web.paudikdasmen.kemdikbud.go.id/#/implementasi-psp>

¹⁴ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan menengah No.0301/C/HK.00/2022 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak

guru siap/terbiasa dengan pendekatan baru yang diterapkan misalnya, kesulitan dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek dan juga belum terbiasa dengan platform digital dan alat pembelajaran online, b) keterbatasan fasilitas yakni kurangnya fasilitas IT juga akses internet yang kurang stabil c) Informasi mengenai perubahan kebijakan, jadwal kegiatan, atau inisiatif baru tidak menyebar secara merata tidak tepat waktu kepada semua pihak yang berkaitan, d) Dukungan orang tua belum maksimal karena kurangnya pemahaman dari orang tua terhadap Program Sekolah Penggerak.¹⁵

Terlihat dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait Kebijakan Program Sekolah Penggerak yang merupakan salah satu kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Mendikbud terkait peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia. Kemendikbudristek menginisiasi Program Sekolah Penggerak untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik dan mengimbaskannya ke sekolah-sekolah lain untuk mempercepat proses transformasi sekolah tersebut. Peneliti ingin memfokuskan di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember yang merupakan satu-satunya Sekolah Dasar Negeri yang telah mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak se-Kecamatan Gumukmas Jember .

Sekolah Dasar Bagorejo 03 Gumukmas Jember telah mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak sejak tahun 2022 yang merupakan Angkatan 2 sehingga telah mengimplementasikan kebijakan

¹⁵ Observasi di SDN Bagorejo 03 Gumukmas, Jember 19 Juli 2024

Program Sekolah Penggerak selama 3 tahun berjalan. Dengan demikian di perlukan penelitian yang komprehensif untuk mengetahui apakah Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak dapat diimplementasikan dengan tepat atau tidak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember**”

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan konteks penelitian yang telah peneliti paparkan diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Komunikasi Dalam Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember ?
2. Bagaimana Sumber Daya Dalam Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember ?
3. Bagaimana Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember?
4. Bagaimana Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Komunikasi Dalam Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember
2. Untuk Mendeskripsikan Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Bagorejo 03 Gumukmas Jember
3. Untuk Mendeskripsikan Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Bagorejo 03 Gumukmas Jember
4. Untuk Mendeskripsikan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Bagorejo 03 Gumukmas Jember

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶ Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Jember dan sebagai kontribusi data ilmiah yang dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik dan tema yang relevan.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah UIN KHAS JEMBER 2024*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak

b. Bagi Instansi

Dapat membantu pihak Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak yang berlangsung di sekolah dan selanjutnya menjadi masukan serta bahan evaluasi bagi lembaga dalam mengimplementasikan kebijakan Program Sekolah Penggerak.

c. Bagi Universitas Islam KH. Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi terkait implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak sehingga bisa berkontribusi terhadap kajian keilmuan serta menambah literatur.

E. DEFINISI ISTILAH

1. Implementasi

Implementasi merupakan sebuah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, kebijakan, ide, atau progra ke dala tindakan yang nyata.

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan serangkaian prinsip, aturan atau keputusan yang ditetapkan oleh individu, organisasi atau pemerintah untuk mengatur tindakan dan mencapai tujuan tertentu.

3. Program Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak merupakan sekolah yang menekankan pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi (kognitif) serta karakter (non kognitif) dalam mengupayakan Profil Pelajar Pancasila yang diawali dengan SDM (kepala sekolah dan guru) yang unggul.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pada bagian awal skripsi ini berisi sampul, halaman sampul, halaman abstrak, halaman orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bab skripsi ini yang memuat pokok-pokok permasalahan yaitu dalam Bab I sampai dengan Bab V.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah dan fokus penelitian, diuraikan pula tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, menguraikan penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini dan kajian teori yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menguraikan terkait pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data hingga tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP, pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari beberapa pembahasan tentang hasil analisis data penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari objek penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Tedahulu

Pada bagian ini peneliti mencamtumkan beragam temuan penelitian tedahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yang kemudian meringkasnya.¹⁷

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dikukan yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Mawaddah Islamiyah yang berjudul “Impelementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar (Studi Kasus di Sekoah Dasar di Kota Bima NTB)” Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan (Fitk) Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam (Mpi) Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2022.¹⁸ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian adalah bahwa implementasi sekolah penggerak di SDN 28 Melayu Kota Bima, SDN 05 Rabangodu Utara Kota Bima dan SDIT Insan Kamil Santi Kota Bima melaksanakan sesuai dengan 5 intervensi yang diprogramkan oleh pemerintah. Proses pelaksanaan dari sekolah-sekolah tersebut memiliki persamaan yaitu pada program pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah UIN KHAS JEMBER 2024*.

¹⁸ Nur Mawaddah Islamiyah, “Impelementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar (Studi Kasus di Sekoah Dasar di Kota Bima NTB)” (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2022)

sekolah dan perencanaan berbasis data. Disamping itu, di setiap sekolah juga memiliki program yang berbeda terkait intervensi pembelajaran paradigma baru dan digitalisasi sekolah, karena sekolah dapat membuat program sesuai dengan kebutuhan SDM dan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Kendala dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah. Faktor pendukung pada SDN 28 Melayu Kota Bima yaitu adanya dukungan pemerintah pusat dan daerah, guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan dukungan masyarakat dan wali murid. Faktor pendukung SDN 05 Rabangodu Utara Kota Bima yakni letak geografis sekolah yang berada pada daerah kota, SDM sekolah, sarana dan prasarana, budaya kolaborasi dan adanya dukungan pemerintah dan masyarakat. Faktor pendukung SDIT Insan Kamil Santi Kota Bima adalah kebebasan sekolah untuk berkreasi, wali murid yang responsif, dan guru.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ja'far Shodiq dengan judul penelitian “ Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di UPT SMPN 3 Gresik” Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2023.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan atau *field reseacrh* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Pembelajaran

¹⁹ Ahmad Ja'far Shodiq, “Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di UPT SMPN 3 Gresik,” 2023.

Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di UPT SMPN 3 Gresik telah berjalan dengan baik dengan melalui 5 intervensi yakni, pendampingan konsultatif dan simetris, penguatan SDM sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, digitalisasi sekolah, perencanaan berbasis data. Faktor pendukung terdiri dari 2 faktor yakni internal (guru-guru dan sarana prasarana yang memadai) dan eksternal (komite, pemerintah daerah dan dinas terkait). Faktor penghambat yakni kesulitan dalam mencari referensi perangkat ajar, kondisi dan kemampuan peserta didik, dan intensitas pelatihan yang masih kurang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Sri Harningsih, Nurkolis, dan I made Sudana dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Dalam Kerangka merdeka Belajar di SMP Negeri 1 Tlomulyo Temanggung”, 2023²⁰, merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, hasil dari penelitian ini bahwa SMP Negeri 1 Tlomulyo Temanggung telah mengimplementasikan kebijakan Program Sekolah Penggerak selaa 3 tahun ajaran melalui 5 intervensi Program Sekolah Penggerak dan Pendampingan oleh Pelatih ahli, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pengawas Sekolah dalam pelaksanaan PSP meliputi aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi berjalan dengan baik terhindar dari miskonsepsi.

²⁰ Harningsih, Nurkolis, Sudana, ““Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Dalam Kerangka merdeka Belajar di SMP Negeri 1 Tlomulyo Temanggung” *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, Vol.4, No.2 (2023) DOI: 10.51874/jips.v4i2.171

4. Penelitian yang dilakukan oleh Amrullah, Fitriana, Shofyatun dengan judul penelitian “ Implementasi Kurikulum Merdeka Program Sekolah Penggerak Di Lembaga Paud Kabupaten Luwuk” 2023.²¹ Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap implementasi kurikulum merdeka program sekolah penggerak. Berdasarkan hasil penelitian data gain score pemahaman guru memiliki nilai $\text{sig} < \alpha$ ($0,000 < 0,05$) yang berarti gain score pemahaman guru siklus i berbeda positif dan signifikan dengan pemahaman guru siklus ii, dengan kata lain pemahaman guru meningkat tentang implementasi kurikulum merdeka program sekolah penggerak di lembaga paud di kabupaten luwuk.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Lazwardi, dkk. Dengan judul penelitian “ Implementasi Program Sekolah Penggerak Di SMAN 1 Tilatang Kamang “ 2024.²² Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa sekolah mengimplementasikan program sekolah penggerak yang berfokus pada pembelajaran paradigma baru yakni pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, proyek penguatan profil pelajar pancasila dan melakukan proses kenaikan kelas serta pemilihan mata pelajaran yang menerapkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

²¹ Amrullah, Fitriana, and Shofyatun, “Implementasi Kurikulum Merdeka Program Sekolah Penggerak Di Lembaga Paud Kabupaten Luwuk” 07, no. 02 (2023): 449–60.

²² Lisa Lazwardi et al., “Implementasi Program Sekolah Penggerak Di SMAN 1 Tilatang Kamang,” *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 12, no. 1 (2023): 319–38, <https://doi.org/10.47668/pkwu.v12i1.1125>.

Tabel 2.1 Persamaan & Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Mawaddah Islamiyah. 2022	Impelementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar (Studi Kasus di Sekoah Dasar di Kota Bima NTB)	1. Membahas tentang program sekolah penggerak 2. Jenis penelitian	1. Lokasi penelitian 2. Fokus penelitian
2.	Ahmad Ja'far Shodiq. 2023	Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di UPT SMPN 3 Gresik	1. Membahas program sekolah penggerak 2. Jenis penelitian	1. fokus dari penelitian ini yaitu pada implementasi sekolah penggerak dalam pembelajaran pendidikan agama islam 2. Lokasi penelitian
3.	Lilis Sri Harnigsih, Nurkolis, dan I made Sudana, 2023	Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Dalam Kerangka merdeka Belajar di SMP Negeri 1 Tlomulyo Temanggung	1. Membahas implementasi program sekolah penggerak 2. Jenis penelitian	1. Lokasi penelitian
4.	Amrullah, Fitriana, Shofyaton. 2023	Implementasi Kurikulum Merdeka Program Sekolah Penggerak Di Lembaga Paud Kabupaten Luwuk	1. Membahas program sekolah penggerak	1. Fokus penelitian ini yaitu pada tingkat pemahaman guru terkait implementasi kurikulum merdeka program sekolah penggerak 2. Jenis penelitian 3. Lokasi

No	Peneliti & Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Lisa Lazwardi, dkk. 2024	Implementasi Program Sekolah Penggerak Di SMAN 1 Tilatang Kamang	1. Membahas implementasi program sekolah penggerak 2. Jenis penelitian	penelitian 1. Fokus penelitian ini yaitu hanya pada pembelajaran paradigma baru yang merupakan salah satu program sekolah penggerak 2. Lokasi penelitian

Berdasarkan dari paparan mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas terdapat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang. Persamaannya terletak pada sama-sama membahas terkait program sekolah penggerak dan jenis penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yang mana ada yang berfokus di implementasi program sekolah penggerak pada pembelajaran pendidikan agama islam, selanjutnya berfokus pada pemahaman guru terhadap implementasi program sekolah penggerak, dan selanjutnya berfokus hanya pada salah satu program sekolah penggerak.

Dengan demikian, melihat dari beberapa tema yang sama tetapi berbeda fokus peneliti tertarik untuk meneliti terkait implementasi kebijakan program sekolah penggerak. Peneliti ingin mengetahui dan mempelajari apakah implementasi kebijakan program sekolah penggerak di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember dapat terlaksana dengan baik atau tidak.

B. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian implementasi kebijakan

Kata implementasi ialah terjemahan dari “*Implementation*” yang bermula dari kata kerja “*to implement*”, yang berarti melengkapi, menyelesaikan, menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu. Secara etimologis implementasi dapat diartikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penuntasan sebuah pekerjaan yang menggunakan alat atau fasilitas untuk mendapatkan hasil.²³

Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier ialah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang umumnya berbentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi dan menjabarkan secara jelas tujuan atau sasaran yang dicapai dengan berbagai cara untuk mengatur proses penerapannya. Sementara Van Metter dan Van Horn, mengartikan implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian aktivitas yang secara sengaja dilaksanakan untuk menggapai hasil.

Selanjutnya, Yulianto kadji menjelaskan bahwa implementasi kebijakan yaitu sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun organisasi swasta yang diatur untuk

²³ Tachjan. “Implementasi Kebijakan Publik”, 23-24

memperoleh tujuan yang sudah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Menurutnya hal yang perlu dipahami bahwa dalam tahap implementasi kebijakan tidak bisa dilakukan apabila tujuan dan sasaran belum ditetapkan, tahap implementasi bisa dilakukan setelah undang-undang ditetapkan dan sumber daya lainnya yang mendukung implementasi tersebut. Persyaratan utama dalam implementasi sebuah kebijakan; a) siapa yang mengimplementasikan sebuah keputusan harus mengetahui apa yang dilaksanakan, b) keputusan dan ketentuan implementasi harus diteruskan kepada personalia yang tepat sesuai dengan sasaran kebijakan, c) kebijakan harus dilaksanakan dengan tepat dan produk kebijakan mempunyai sasaran yang jelas.²⁴

Adapun menurut Abdoellah dan Rusfiana, Implementasi atau penerapan kebijakan publik adalah suatu deretan aktivitas setelah sebuah kebijakan dirumuskan. Kedudukan implementasi kebijakan sangat penting karena suatu kebijakan tanpa adanya implementasi merupakan hal yang sia-sia.²⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan dalam rangka melaksanakan suatu keputusan atau ketetapan untuk mencapai tujuan.

Abidin menyebutkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan diantaranya, a) faktor internal yang berisi, kebijakan yang akan dilakukan dan faktor-faktor

²⁴ Yulianto Kadji. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam fakta realitas*, (UNG Press Gorontalo, 2015).

²⁵ Awan Y. Abdoellah & Yudi Rusfiana "BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.Pdf," n.d. hal. 57

pendukung. b) faktor eksternal yaitu keadaan lingkungan dan pihak-pihak terkait.²⁶

b. Model-model Implementasi Kebijakan

Adanya sebuah model akan mempermudah dalam memberikan pandangan terkait objek, situasi dan proses serta komponen yang terkandung didalamnya. Komponen dalam model sistem implementasi kebijakan, meliputi 1) program yang dilaksanakan, 2) *target groups* (masyarakat yang menjadi objek memperoleh manfaat dari program tersebut, 3) unsur pelaksana, 4) faktor lingkungan (sosial, fisik, budaya, dan politik). Berikut ini adalah beberapa model implementasi kebijakan;²⁷

1.) Model implementasi kebijakan Smith

Model implementasi kebijakan Smith sering dikenal dengan model proses atau alur, dalam model ini terkandung empat variabel yang tidak bisa berdiri sendiri, saling mempengaruhi dan berhubungan secara timbal balik sehingga terjadi ketegangan-ketegangan yang akibatnya timbul protes-protes hingga aksi fisik, yang mana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru yang mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Empat variabel implementasi kebijakan tersebut meliputi; 1) kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*) yaitu pola-pola hubungan ideal yang telah dijabarkan dalam kebijakan yang berusaha untuk

²⁶ Awan Y. Abdoellah & Yudi Rusfiana, 59

²⁷ Tachjan, "Implementasi Kebijakan Publik"38-39

diinduksikan, 2) *target groups* adalah orang-orang yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, 3) *implementing organization* adalah badan pelaksana atau unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan, 4) *environmental factor* adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, misal aspek budaya, sosiasl, ekonomi dan politik.

2.) Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn bermula karena adanya argumentasi tentang perbedaan yang terjadi dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang dilakukan. Lalu munculah pendekatan yang mencoba mengaitkan

antara isu kebijakan dengan implementasi serta suatu model konseptual yang mengaitkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Van Meter dan Van Horn menyatakan secara tegas bahwa perubahan, control, dan kepatuhan bertindak ialah konsep penting dalam prosedur implementasi. Dari konsep tersebut, hal yang perlu dikaji yakni hambatan seperti apa yang akan muncul jika memperkenalkan perubahan dalam suatu organisasi? Seberapa penting keterikatan masing-masing orang dalam suatu organisasi, dari pandangan ini kedua ahli tersebut membuat tipologi kebijakan

menurut: a. Jumlah masing-masing perubahan yang diperoleh, b. Lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak yang terlibat dalam implementasi. Sementara itu Van Meter dan Van Horn menyebutkan bahwa tahapan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel bebas tersebut terdiri atas;

- a) Sasaran dan skala kebijakan
- b) Sumber-sumber kebijakan
- c) Karakteristik instansi/ badan pelaksana
- d) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan
- e) Lingkungan (sosial, ekonomi, dan politik).²⁸

3.) Model implementasi kebijakan George Edwards III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan George Edwards III menguraikan empat faktor dalam implementasi

kebijakan, diantaranya;²⁹

- a) Komunikasi

Agar suatu arahan dapat berjalan dengan efektif, diperlukan komunikasi yang jelas, tepat, dan tetap atau konsisten yang dilakukan oleh pembuat kebijakan kepada si pelaku kebijakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menjalankan kebijakan. Maka dari itu

²⁸Agus Subianto, ” Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi,dan Evaluasi” (Surabaya: Brilliant, 2012) 68-69

²⁹ George C Edward III, *Public Policy Implementing, Literary and Linguistic Computing*, 1980.

komunikasi merupakan hal yang penting agar para pelaku kebijakan mengetahui apa yang mereka jalankan sehingga implementasi kebijakan tidak melenceng dari tujuan yang diharapkan.

b) Sumber Daya

Sumber daya yang terpenting meliputi jumlah staf yang memadai dengan keahlian yang kompeten, informasi mengenai arahan implementasi kebijakan tersampaikan secara relevan dan cukup, otoritas yang menjamin bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan telah apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan, serta didukung oleh sarana dan prasana yang memadai. Apabila sumber daya tersebut tidak dapat dipenuhi maka kebijakan tidak dapat diimplementasikan.

c) Disposisi

Disposisi merupakan sikap pelaksana terhadap program yang dijalankan. Sikap pelaksana atau implementor merupakan hal yang penting dalam proses implementasi kebijakan, terkadang implementor tidak selalu melakukan kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Jika implementor mempunyai sikap yang baik terhadap kebijakan tertentu, maka mereka cenderung melaksanakannya sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan sebelumnya.

d) Struktur birokrasi

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam administrator kebijakan unit organisasi untuk menangani tugas rutin dalam pelaksanaan program. Jika standar yang telah dibuat tidak dapat difungsikan dengan maksimal maka kebijakan-kebijakan yang ada tidak bisa berjalan dengan lancar dan sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Fragmentasi disuatu organisasi harus dihindari dan diatasi melalui sistem koordinasi karena dapat menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya, menghambat koordinasi, melakukan tindakan yang tidak diharapkan. Hal ini merupakan sebab implementasi kebijakan menjadi gagal.

4.) Model implementasi kebijakan Jan Merse

Model implementasi kebijakan Jan Merse mengutarakan

beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan;

- a) Informasi
- b) Isi kebijakan
- c) Dukungan masyarakat
- d) Pembagian potensi

Jan Merse menekankan bahwa dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai stakeholder memiliki peran penting dalam setiap implementasi kebijakan.³⁰

Dari berbagai model implementasi kebijakan yang telah dijelaskan diatas, peneliti memilih model implementasi kebijakan George Edward III, karena terdapat empat variabel pada model implementasi kebijakan Edward III yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi, sehingga model dari Edward III memberikan kerangka yang lebih terstruktur untuk memahami kompleksitas implementasi kebijakan pada Program Sekolah Penggerak. Selain itu, model kebijakan George Edward III bersifat *top-down* sehingga relevan dengan penelitian implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak yang merupakan kebijakan yang bersifat *top-down* juga.³¹ Menurutnya untuk menakar kesuksesan dari pengimplementasian kebijakan terdapat empat faktor yang menentukannya yaitu:³²

1) Komunikasi

Komunikasi memiliki peran yang penting dalam mencapai keberhasilan atas pengimplementasian kebijakan. Implementasi kebijakan dapat berjalan lancar apabila pembuat kebijakan dapat

³⁰ Yulianto Kadji, Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam fakta realitas 63-70.

³¹ Bailah, "Tantangan Kepala Sekolah Penggerak Dalam mengimplementasikan Pembelajaran Paradigama Baru", *Jurnal Prajaiswara*, Vol. 2, No.2 (des 2021)

³² George C Edward III, *Public Policy Implementing, Literary and Linguistic Computing*, 1980.

memahami dengan jelas apa yang sedang dijalankannya. Untuk mengukur keberhasilan dari variabel komunikasi terdapat tiga faktor diantaranya:

- a) Transmisi (penyampaian), penyampaian pesan antara komunikator kepada komunikan yang dalam hal ini dilakukan oleh pembuat kebijakan kepada pelaku atau pelaksana kebijakan. Dengan menjalin komunikasi yang baik dan lancar maka akan menghasilkan wujud implementasi kebijakan yang baik pula. Namun dalam penerapannya sering terjadi ketidaksesuaian dalam menyalurkan komunikasi yang menimbulkan miskomunikasi. Hal ini karena komunikasi telah melewati birokrasi yang ada
- b) Kejelasan, bahwa dalam setiap informasi yang terjalin antara pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan harus dalam penyampaian yang jelas yang tidak menimbulkan kebingungan dalam mencapai tujuan. Ketidakjelasan pesan yang disampaikan akan menimbulkan interpretasi yang salah bahkan bertentangan dengan pesan awal.
- c) Konsistensi, kebijakan yang sudah disalurkan dalam komunikasi sebaiknya terjalin dengan konsisten atau tidak berubah-ubah, agar menghindari kebingungan bagi pelaksana kebijakan.

2) Sumber Daya

Faktor ini berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki dalam sebuah organisasi untuk menunjang pengimplementasian kebijakan agar berjalan seefisien mungkin. Dalam indikator sumber daya terdapat beberapa elemen diantaranya:

- a) Staf/ pegawai, sumber daya manusia mempunyai kedudukan sebagai aset yang penting dalam sebuah organisasi. Implementasi kebijakan sering mengalami kegagalan yang disebabkan oleh SDM atau staf pelaksana implementasi kebijakan tidak berkompeten dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
- b) Informasi, terdapat dua macam informasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yakni informasi tentang tata cara pelaksanaan kebijakan dan informasi tentang ketaatan pelaksana kebijakan terhadap regulasi yang berlaku. Implementor harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup tentang apa yang sedang atau akan mereka laksanakan.
- c) Wewenang, hal ini dimaksudkan sebagai otoritas yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Biasanya suatu kewenangan itu bersifat formal, sehingga apabila tidak adanya legitimasi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan akan menyebabkan tidak dianggapnya para implementor di mata masyarakat.

d) Fasilitas, faktor penting dalam proses implementasi kebijakan ialah dengan memiliki sarana dan prasarana yang baik, sehingga dapat mendukung kinerja pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada.

3) Disposisi

Sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan akan terlaksana dengan efektif, apabila pelaksana kebijakan itu memahami apa yang akan dijalankan dan cara mengerjakannya. Dengan demikian pelaksana tugas dalam penerapannya tidak akan terhambat.

4) Struktur birokrasi

Terdapat dua karakteristik yang dapat digunakan untuk mendorong kinerja struktur birokrasi, antara lain:

- a) Adanya SOP (*standard Operating Procedure*) yang fleksibel yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pegawai dalam menjalankan kegiatan.
- b) Adanya pembagian kerja melalui pembagian tanggung jawab atas kegiatan dan program-program yang dilakukan kepada beberapa unit kerja yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

2. Kebijakan Pendidikan

a. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris yakni *Policy*. Kebijakan merupakan suatu istilah yang menunjukkan rangkaian alternatif yang berguna bagi prinsip tertentu.³³ Selanjutnya, Kebijakan adalah suatu bentuk serangkaian aktivitas membuat rencana atau program yang dilakukan oleh pemerintah.³⁴ Ealau dan Prewitt berpendapat bahwa kebijakan merupakan suatu ketetapan yang berlaku yang ditandai dengan perilaku atau tindakan yang konsisten, dimulai dari pembuat kebijakan maupun yang menaatinya.³⁵

Kebijakan menurut Winarno diartikan sebagai suatu kegiatan atau tindakan yang di usung seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkup tertentu, yang memberikan peluang terhadap kebijakan yang di usung dalam menuju sebuah tujuan tertentu. Pengertian lain menjelaskan bahwa kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang digunakan dalam menjalankan sebuah pekerjaan dan cara seseorang, kelompok, ataupun pemerintah dalam bertindak.³⁶ Sedangkan Iskandar mendefinisikan kebijakan sebuah serangkaian desain program, aksi, aktivitas, sikap, keputusan, untuk bertindak

³³ Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik*, 2017.

³⁴ Ika Dyah Kurniati et al., "Buku Ajar, Kebijakan Publik, Administrasi, Perusumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik" 2015.

³⁵ Meutia, *AnalisisKebijak. Publik*.10.

³⁶ Santoso, "Menata Kebijakan Publik Yang Tepat Agar Tidak Terjadi Gejolak Di Masyarakat Bila Diundangkan."

maupun tidak yang jalankan oleh para aktor kebijakan untuk menyelesaikan masalah- masalah yang terjadi.³⁷

Dalam bidang pendidikan terdapat kebijakan yang berlaku yang dapat digunakan sebagai strategi dan metode untuk lembaga pendidikan bisa berkembang.³⁸ Adanya kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah dan menggapai tujuan serta sasaran yang ditetapkan³⁹, artinya terdapat kebijakan yang bisa mengatasi permasalahan dan menuju tujuan dalam bidang pendidikan.

Pendidikan menurut UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁰ Pengertian lain mengartikan pendidikan merupakan segala perbuatan dari proses sadar manusia sebagai proses pembentukan

³⁷ Dian Herdiana, "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar," *Stiacimahi.Ac.Id* 14, no. November (2018): 13–25.

³⁸ Lathifah Aulia Rahmah and Suci Megawati, "Implementasi Program Sekolah Penggerak Di SD Insan Mulya Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik," *Implementasi Program Sekolah Penggerak* 12, no. 1 (2024): 147–59.

³⁹ Muhammad Guntur Andi Cudai Nur, *Analisis Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik*, 2017, https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.Pdf.

⁴⁰ UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

kemampuan dasar yang fundamental yang berkaitan dengan daya pikir, maupun daya rasa manusia.⁴¹

Kebijakan yang mengatur tentang sistem pendidikan disebut dengan kebijakan pendidikan, kebijakan dalam pendidikan digunakan sebagai pedoman dan petunjuk bagi pelaksana pendidikan dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu peran kebijakan pendidikan sangat penting dalam memberikan pengawasan dan perlindungan bagi segala kegiatan agar pendidikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Carte V. Good berpendapat kebijakan pendidikan, *“Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situasional factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives”*, yang artinya kebijakan merupakan suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional yang dijalankan oleh sebuah lembaga sebagai perencanaan untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan dari pendidikan dapat dicapai.⁴²

Fatkuroji mendefinisikan kebijakan pendidikan ialah sebuah tindakan menguraikan langkah dan tahapan dalam menyelenggarakan pendidikan melalui uraian visi misi pendidikan agar tujuan pendidikan

⁴¹ Afandi Dhikrul Hakim, et al “khazanah Filsafat Pendidikan Barat Dan Islam.Pdf,” (Malang: CV Humanis, 2019).

⁴² Angelika Bule Tawa, “Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekola Dasar,” *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 4, no. 2 (2019): 107–17, <https://doi.org/10.53544/sapa.v4i2.82>.

dapat dicapai pada waktu tertentu. Sedangkan menurut Bakry menjelaskan kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik yang khusus mengatur bidang pendidikan yang berkaitan dengan alokasi, penyerapan dan distribusi sumber penyelenggaraan pendidikan. Pada dasarnya kebijakan pendidikan erat kaitanya dengan kebijakan yang ada dalam kebijakan publik, contohnya kebijakan politik, ekonomi, keagamaan, luar negeri dan lain sebagainya.⁴³ Oleh sebab itu setiap program yang ada dalam bidang pendidikan merupakan program rancangan dari pemerintah dalam rangka memecahkan masalah di dunia pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam hal memberikan pendidikan bagi setiap warga negara, adanya kebijakan dibuat untuk pedoman dalam menjalankan dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan.⁴⁴

b. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki tujuan agar tindakan yang akan dilakukan tersusun dan memiliki arah yang jelas dalam mengambil keputusan, dengan adanya tujuan yang jelas maka akan memudahkan dalam mencapai target yang diharapkan. Berikut adalah tujuan kebijakan pendidikan yang dapat dilihat dari tingkatan masyarakat, tingkatan politisi, dan tingkatan ekonomi;⁴⁵

⁴³ Aulia Farkhan et al., "Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (2022): 1921, <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>.

⁴⁴ D. Hamidah, "Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik," *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 34–44.

⁴⁵ Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018)

1) Tujuan kebijakan pendidikan dilihat dari tingkatan masyarakat

Hakekat pendidikan secara umum ialah proses penyempurnaan pemahaman dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya yang dijalankan secara terus menerus, oleh sebab itu perlu menciptakan pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat yang didasarkan dengan kebhinekaan. Selanjutnya dalam pendidikan ditanamkan norma-norma sehingga masing-masing individu dapat memahami hal yang dapat diterima oleh masyarakat.

2) Tujuan kebijakan pendidikan dilihat dari tingkatan politisi

Kontribusi pendidikan dalam perkembangan politik berbeda kedudukannya dengan tingkatan perkembangan sosial. Kontribusi pendidikan terhadap tingkat individu yakni memberi bantuan perkembangan perilaku dan kecakapan kewarganegaraan yang positif untuk mengasah warga negara yang baik dan penuh tanggungjawab. Disisi lain juga diinginkan agar peserta didik sadar akan tanggung jawab dan kewajiban, sehingga perilaku yang tercermin semakin demokratis.

3) Tujuan kebijakan pendidikan dilihat dari tingkatan ekonomi

Tujuan kebijakan yang didasarkan pada tingkatan ekonomi ini dapat dilihat berdasarkan pandangan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang, mengapa dikatakan demikian karena pendidikan merupakan fasilitas bagi peserta didik dalam

mendapatkan ilmu dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat dikatakan bahwa tingginya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi pendapatan yang diterima karena dianggap lebih produktif.

Secara umum fungsi dari kebijakan ialah menjadi arahan atau dasar dalam menjalankan sesuatu, memberikan bimbingan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.⁴⁶

Nanang fattah menyebutkan beberapa fungsi kebijakan pendidikan sebagai berikut;⁴⁷

- a) Mengadakan akuntabilitas norma budaya yang diharapkan ada dalam pendidikan oleh pemerintah
- b) Melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk menguji kerja siswa dan guru
- c) Memberi bantuan dalam mengambil keputusan

c. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Karakteristik adalah suatu ungkapan yang memperlihatkan ciri khas dari suatu hal, adanya karakteristik adalah sebagai tumpuan untuk membuat keputusan dalam penetapan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan memiliki 6 karakteristik diantaranya;⁴⁸

⁴⁶ Rozak, "Kebijakan Pendidikan Di Indonesia" *Journal Of Islamic Educatioan* Vol.2, No.3, 2021

⁴⁷ A Lestari, W S Putra, and A Alda, "Fungsi Kebijakan Pendidikan," *Journal of ...*, 2023, <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/107%0Ahttps://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/download/107/88>.

⁴⁸ Farkhan et al., "Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 5 2022, DOI : 10.35931/aq.v16i5.1354

1) Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah, agar dapat memberikan kontribusi yang aktual bagi pendidikan.

2) Memenuhi aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan dilakukan dengan cara yang aman, oleh sebab itu segala hal harus dipenuhi agar pendidikan dapat diakui secara sah dan diterapkan secara lokal. Kebijakan pendidikan harus melaksanakan syarat konstitusional yang berlaku di sebuah daerah sehingga bisa dikatakan sah dan resmi berlaku di daerah tersebut.

3) Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan, maka perlunya memiliki nilai operasional agar dapat diimplementasikan, hal ini untuk memperjelas fungsi pendukung keputusan, kebijakan yang akan di capai serta target pendidikan yang diharapkan.

4) Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan harus dibuat oleh ahli dalam bidangnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan berbagai pihak. Unsur minimal pembuat kebijakan

meliputi pengelola lembaga, pengelola pendidikan, serta politisi yang turut serta dalam pendidikan.

5) Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan mempunyai ciri yang terdapat kemungkinan adanya evaluasi yang dilakukan secara mudah dan efektif, disebabkan kebijakan pendidikan yang ada tentu tidak lepas dari kesalahan yang terjadi pada saat menjalankan, sehingga harus dievaluasi dan diperbaiki

6) Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan harus memiliki sistem yang jelas dalam segala hal yang akan diaturnya, sistem yang ada pun dituntut secara efektif, efisien dan berkelanjutan, agar kebijakan pendidikan tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan serta lemah strukturnya akibat hilangnya rangkaian faktor satu sama lain. Hal ini perlu diperhatikan secara detail agar tidak mengakibatkan kecacatan pada saat penerapan. Maka dari itu, kebijakan pendidikan perlu diintegrasikan secara eksternal dalam bidang kebijakan lainnya seperti kebijakan politik, moneter, maupun kebijakan pendidikan yang ada di atas, bawah dan samping, serta daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

d. Tahap-tahap Proses Pembuatan Kebijakan Pendidikan

Pembuatan kebijakan melalui proses yang tidak mudah, proses tersebut mulai dari tahapan perumusan masalah, penyusunan agenda,

formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan hingga penilaian kebijakan. Menurut Dunn dalam Madjid, beberapa tahapan kebijakan ialah sebagai berikut:⁴⁹

1) Tahapan Perumusan Masalah

Tahapan perumusan masalah adalah sebuah langkah dengan empat fase yang saling berkaitan yakni, pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah. Syarat-syarat sebelum perumusan masalah adalah adanya pengakuan atau dirasakannya keberadaan suatu situasi masalah.

Menurut Darwin dalam Madjid, terdapat beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi adanya masalah kebijakan, yakni

- a) Melibatkan kepentingan masyarakat luas
- b) Serius dimana suatu situasi dapat diangkat sebagai masalah kebijakan jika situasi tersebut berada di atas ambang toleransi untuk diabaikan begitu saja
- c) Berpotensi menjadi serius, dengan artian bahwa masalah mungkin pada saat ini belum serius namun dalam jangka panjang akan menjadi serius
- d) Mempunyai peluang untuk diperbaiki.

⁴⁹ Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. 33-35

2) Tahapan Penyusunan Agenda

Pada tahap ini sebuah masalah akan masuk ke dalam agenda kebijakan jika suatu masalah telah memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya suatu masalah tersebut membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan

3) Tahapan Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini dilakukan perumusan usulan-usulan kebijakan. Perumusan usulan kebijakan merupakan aktivitas menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah.

4) Tahapan Adopsi Kebijakan

Pada tahap ini dimana dari banyaknya alternatif yang telah ditawarkan, maka barulah pada tahap kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas penyusun kebijakan. Soenarko dalam

Madjid, berpendapat bahwa terhadap suatu rancangan yang disepakati harus dipertimbangkan oleh pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang, apakah dari sebuah keputusan yang diambil dapat diterima atau tidak. Apabila tidak diterima, maka bahwa rancangan kebijakan tersebut harus dirumuskan kembali atau memang ditolak sama sekali. Sebaliknya jika di terima, maka rancangan tersebut lalu disahkan dan selanjutnya diimplementasikan.

5) Tahapan Implementasi Kebijakan

Di tahap ini ialah tahapan pelaksanaan kebijakan oleh badan-badan administrasi maupun agen pemerintah ditingkat bawah.

6) Tahapan Penilaian Kebijakan

Pada tahap ini dilakukan penilaian sebuah kebijakan yang memuat terkait isi kebijakan, pelaksana kebijakan dan dampak kebijakan. Penilaian kebijakan adalah sebuah kegiatan yang dibuat untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat penting. Hal tersebut yang dibutuhkan oleh pembuat kebijakan dan masyarakat luas, karena dengan mengetahui hasil serta dampak kebijakan tersebut akan dengan mudah mengenali tingkat efektivitas suatu kebijakan, sehingga dapat menjadi bahan masukan yang berguna dalam membenahi kebijakan-kebijakan yang telah ada atau perumusan kebijakan baru.

3. Program Sekolah Penggerak

a. Pengertian Program Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak merupakan sekolah yang menekankan pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi (kognitif) serta karakter (non kognitif) dalam mengupayakan Profil Pelajar Pancasila

yang diawali dengan SDM (kepala sekolah dan guru) yang unggul.⁵⁰ Profil Pelajar Pancasila merupakan profil lulusan yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan kompetensi yang diharapkan dapat terpenuhi dan meningkatkan nilai-nilai luhur Pancasila dan pemangku kepentingan. Profil Pelajar Pancasila Tersusun dari beberapa aspek diantaranya: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Berkebinekaan Global 3. Mandiri 4. Gotong royong 5. Bernalar kritis 6. Kreatif. Dimensi-dimensi tersebut diharuskan dapat menjadi satu kesatuan yang mendukung dan saling berkesinambungan.⁵¹

Maksud dari ke-eman aspek Profil Pelajar Pancasila ialah, Aspek Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan Pelajar yang sadar akan keberadaan Tuhan sehingga mampu menaati perintah dan laranganNya. Aspek Berkebinekaan Globla merupakan pelajar yang mempunyai rasa percaya diri yang kuat dan mampu menampilkan dirinya sebagai representasi budaya bangsa dengan rasa kesadaran dan pemahaman yang kuat terhadap keberagaman budaya daerah, nasional dan global. Aspek Mandiri adalah pelajar yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, tanggung jawab dan rencana dalam melakukan suatu tindakan. Aspek Gotong royong merupakan pelajar yang berkemampuan untuk melakukan pekerjaan atau tindakan secara bersama-sama agar apa yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan.

⁵⁰ Pratiwi et al., "Risalah Kebijakan Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan."

⁵¹ "Program Sekolah Penggerak 2021," 2021.

Aspek Bernalar Kritis adalah pelajar yang dapat berpikir objektif sistematis dengan mempertimbangkan segala aspek. Aspek Kreatif adalah pelajar yang mempunyai kemampuan untuk selalu berinovasi dan memodifikasi sehingga menghasilkan sesuatu yang baru.⁵²

Program Sekolah Penggerak merupakan katalis dalam upaya mewujudkan visi pendidikan Indonesia⁵³. Program Sekolah Penggerak ialah program yang dijalankan dengan berkolaborasi antara Kemendikbud dan Pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah merupakan pemegang komitmen utama. Pendampingan dilakukan dengan durasi program selama 3 tahun ajaran dan kemudian dilanjutkan oleh sekolah secara mandiri. Sasaran dari Program Sekolah Penggerak yaitu kepala sekolah dan guru pada tingkat satuan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB di 34 provinsi serta *stakeholder* pendidikan di tingkat daerah beserta pengawas/pemilik sekolah dan dinas pendidikan pada daerah-daerah tersebut. Sekolah penggerak bukanlah sekolah unggulan dan tidak mengubah input tetapi mengubah proses serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga kedepannya semua sekolah akan menjadi Sekolah Penggerak.⁵⁴

Program Sekolah Penggerak adalah penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya yang mengakselerasikan sekolah baik negeri maupun swasta dengan berbagai kondisi untuk bergerak

⁵² Syafi'i, "Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak."

⁵³ Kemendikbudristek, <https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/#/home>, diakses pada 16 Juni 2024

⁵⁴ Kemdikbudristek, "Merdeka Belajar Episode Ketujuh: Program Sekolah Penggerak," *Paparan Launching Program Sekolah Penggerak*, 2021, 1–18.

maju 1 sampai 2 tahap. Berikut ini adalah 4 tahapan proses transformasi sekolah Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak

4 Tahapan Proses Transformasi Sekolah Indonesia



Gambar 2.1 Tahapan proses transformasi sekolah Indonesia⁵⁵

Sekolah pada tahap 1 memiliki capaian hasil belajar yang masih berada pada 3 level di bawah atau lebih rendah dari yang diharapkan dalam asesmen dan kurikulum. Selain itu sekolah masih berada pada lingkungan belajar yang mana masih banyak terjadi perundungan. Sekolah pada level ini secara rutin masih mengalami gangguan pembelajaran.

Sekolah pada tahap 2 memiliki capaian hasil belajar masih berada pada level 1-2 tingkat dibawah pada level yang diharapkan. Perundungan masih terjadi namun perlahan tidak menjadi norma, sekolah pada tahap ini masih memiliki lingkungan belajar yang belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid.

⁵⁵ Pratiwi et al., "Risalah Kebijakan Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan."

Sekolah pada tahap 3 memiliki capaian hasil belajar yang telah sesuai dengan harapan dalam asesmen dan kurikulum, sekolah pada tahap ini memiliki lingkungan belajar yang aman dan nyaman dengan di tandai tidak terjadinya perundungan. Proses pembelajaran sudah memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa, pada tahap ini pula kepala sekolah telah melakukan perancangan program dan anggaran berbasis pada hasil refleksi.

Sekolah pada tahap 4 merupakan sekolah dengan standar mutu tinggi dan dapat melakukan pengimbasan. Pada tahap ini hasil belajar peserta didik telah diatas level yang diharapkan dan memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman inklusif dan menyenangkan, proses pembelajaran telah berpusat pada peserta didik. Sekolah pada tahap 4 diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah lain agar dapat meningkatkan mutu pendidikan.⁵⁶

Dalam hal ini kepala sekolah sebagai sumber daya manusia sekolah merupakan tokoh utama dalam hal penyempurnaan tata kelola dan menjadi penggerak di sekolah dengan harapan terciptanya ekosistem belajar dapat terlaksana dengan menyenangkan. Dengan adanya sumber daya manusia yang unggul (kepala sekolah dan Guru) kendala yang dihadapi oleh sekolah akan dapat dihadapi dan dibenahi sendiri. Serupa dengan konsep transformasi bahwa setiap individu dapat memiliki keterampilan dan kemampuan secara mandiri dapat

⁵⁶ Pratiwi et al., “Risalah Kebijakan Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.”

menemukan solusi dengan sendirinya.⁵⁷ Dengan demikian pendidikan nasional bertujuan dan memiliki sasaran untuk mencerdaskan generasi bangsa yang mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki kecakapan hidup yang tinggi dengan memasukkan pengetahuan, moral dan spiritual.⁵⁸

Program sekolah penggerak terdiri dari 5 intervensi yang saling berkaitan yang tidak bisa di pisahkan yang terdiri dari 1. Pendampingan konsultatif dan asimetris 2. Penguatan SDM sekolah 3. Pembelajaran dengan paradigma baru 4. Perencanaan berbasis data dan 5. Digitalisasi sekolah.⁵⁹ Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendampingan konsultatif dan asimetris

Program kemitraan yang dilakukan antara Kemendikbud dan Pemerintah Daerah yang mana Kemendikbud melakukan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Kemdikbud

melalui UPT di masing-masing provinsi akan melakukan pendampingan bagi Pemda provinsi dan kab/kota dalam perencanaan program sekolah penggerak. UPT Kemdikbud di masing-masing provinsi akan melakukan pendampingan Pemda selama implementasi sekolah penggerak seperti memberikan

⁵⁷ Asnil Aidah Ritonga et al., "Program Sekolah Penggerak Sebagai Inovasi Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di SD Negeri 104267 Pegajahan," *Jurnal Pendidikan* 31, no. 2 (2022): 195, <https://doi.org/10.32585/jp.v31i2.2637>.

⁵⁸ Shoni Rahmatullah Amrozi. "Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia; Perspektif Sejarah Ibnu Kholdun". *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, no 1 (2020) 445-455,

⁵⁹ Sarlin Patilima, "Peran Kepala Sekolah Dalam Memberikan Motivator," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar* 0, no. 0 (2022): 228-36, <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSNPD/article/view/1069>.

fasilitas Pemda dalam sosialisasi terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan hingga mencari solusi apabila terjadi kendala pada saat implementasi.

2) Penguatan SDM sekolah

Penguatan Kepala sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru melalui program pendampingan intensif (*coaching*) *one to one* dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud. Satu pelatih ahli yang disediakan akan mendampingi lima sampai tujuh kepala sekolah, pelatih ahli akan mendampingi guru secara berkelompok. Pelatihan untuk Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik dan Guru yaitu:

- a) Pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru bagi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru
- b) Pelatihan kepemimpinan pembelajaran bagi Kepala Sekolah,

Pengawas Sekolah, Penilik

Pelatihan dilakukan 1 kali dalam setahun selama program, latihan nasional untuk perwakilan guru sementara guru yang lain *in- house training*.

Pendampingan untuk Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru yaitu:

- a) *In-house training*
- b) Lokakarya tingkat kab/kota
- c) Komunitas belajar/ praktisi (Kelompok Mapel)

d) Program pendampingan/*coaching*

1) 1on1 dengan kepala sekolah (1 pelatih ahli dengan 1 kepala sekolah)

2) bermitra dengan kepala sekolah, guru dilatih nasional untuk pendampingan berkelompok dengan guru

Pendampingan dilakukan secara berkala 2-4 minggu sekali selama program.

Implementasi teknologi terdiri dari:

- a) Literasi teknologi
- b) Platform guru: Profil dan pengembangan kompetensi
- c) Platform guru: Pembelajaran
- d) Platform sumber daya sekolah
- e) Platform rapor pendidikan

3) Pembelajaran Dengan Paradigma Baru

Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk menciptakan Profil Pelajar Pancasila yang Beriman dan Bertakwah kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, Berkebinekaan Global, Bergotong royong, Kreatif, Bernalar kritis dan Mandiri yang dapat di pelajari melalui program intrakurikuler dan program kokurikuler. Program intrakurikuler yang di maksud adalah pembelajaran terdiferensiasi, capaian

pembelajaran di sederhanakan, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, guru memiliki leluasa untuk memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan program kokurikuler adalah lintas mata pelajaran, berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, pembelajaran interdisipliner diluar kegiatan dalam kelas, melibatkan masyarakat, muatan lokal dikembangkan disesuaikan dengan isu nasional dan global

4) Perencanaan Berbasis Data

Manajemen berbasis sekolah merupakan perencanaan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2 Perencanaan berbasis data⁶⁰

⁶⁰ Sarlin Patilima, "Peran Kepala Sekolah Dalam Memberikan Motivator," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar* 0, no. 0 (2022): 228–36, <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSNPD/article/view/1069>.

5) Digitalisasi Sekolah

Penggunaan berbagai platform digital bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan efesiensi, menambah inspirasi dan pendekatan *customized*

a) Platform Guru: Profil dan Pengembangan Kompetensi

Alat bantu guru untuk meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berbasis *microlearning* dan habituasi

b) Platform Guru: Pembelajaran

Alat bantu guru untuk menjalankan pembelajaran kompetensi holistik dan pembelajaran terdiferensiasi

c) Platform Sumber Daya Sekolah

Meningkatkan fleksibilitas, transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya sekolah

d) Dashboard Rapor Pendidikan

e) Memotret kondisi mutu pendidikan secara akurat dan otomatis.

Dirujuk untuk evaluasi dan perencanaan.

b. Tujuan Program Sekolah Penggerak

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak.⁶¹ Program Sekolah Penggerak Bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila

⁶¹ Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak, bab I

- 2) Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas
- 3) Membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat dan berfokus pada peningkatan kualitas, dan
- 4) Menciptakan iklim kolaboratif bagi pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah.

Diharapkan dengan adanya mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak ini dapat digunakan sebagai acuan para pihak dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak agar sesuai dengan yang diharapkan.

c. Ruang Lingkup Program Sekolah Penggerak

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak.⁶² Ruang lingkup penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak meliputi:

- 1) Sosialisasi Program Sekolah Penggerak
- 2) Penetapan provinsi/ kabupaten/ kota sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak
- 3) Penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak

⁶² Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak, bab I.

- 4) Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota
- 5) Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan
- 6) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, dan
- 7) Sanksi

d. Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak.⁶³ Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak meliputi:

1) Sosialisasi Program Sekolah Penggerak

a) Sosialisasi bertujuan untuk;

(1) Memberikan pemahaman dan mempublikasikan Program

Sekolah Penggerak kepada pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota, dan

(2) Kemendikbudristek mendapatkan informasi kesanggupan provinsi/ kabupaten/ kota untuk melaksanakan Program

Sekolah Penggerak

b) Sasaran pelaksanaan sosialisasi

Sosialisasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dilaksanakan oleh Kemendikbudristek kepada

⁶³ Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak, bab II.

kepala daerah dan perangkat daerah terkait di tingkat provinsi/ kabupaten/ kota.

c) Penetapan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Sebagai Penyelenggara Program Sekolah Penggerak

1) Kriteria

Kemendikbudristek menetapkan semua pemerintah daerah provinsi dan menetapkan secara bertahap pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak, dengan mempertimbangkan kriteria paling sedikit sebagai berikut:

a) Kesanggupan untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak di satuan pendidikan wilayahnya

b) Kebijakan/peraturan daerah/program pembangunan daerah yang mendukung kemajuan pendidikan, dan

c) Komitmen daerah berupa alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari pendapatan asli daerah

1. Mekanisme penetapan

a) Kemendikbudristek memastikan pemerintah daerah kabupaten/kota siap untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak

b) Kemendikbudristek melakukan penetapan berdasarkan kriteria dengan mempertimbangkan keterwakilan daerah yang merepresentasikan keragaman wilayah Indonesia

c) Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan menjadi pelaksana Program Sekolah Penggerak akan ditindak lanjuti dengan Nota Kesepakatan. Nota Kesepakatan ditanda tangani antara pemimpin unit utama terkait pada Kemendikbudristek dengan masing-masing kepala daera provinsi/ kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

2) Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Pelaksana Program Sekolah Penggerak

a) Penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dilaksanakan dengan seleksi kepala satuan pendidikan pada:

(1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5 tahun sampai dengan 6 tahun

(2) Sekolah Dasar (SD)

(3) Sekolah Menengah Pertama (SMP)

(4) Sekolah Menengah Atas (SMA)

(5) Sekolah Luar Biasa (SLB)

b) Seleksi kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan:

(1) Kepala satuan pendidikan memiliki kompetensi berdasarkan model kompetensi kepemimpinan sebagai berikut:

(a) Mengembangkan diri dan orang lain

- (b) Memimpin pembelajaran
- (c) Memimpin manajemen satuan pendidikan dan
- (d) Memimpin pengembangan satuan pendidikan.

(2) Kepala satuan pendidikan pelaksana Sekolah Penggerak:

- (a) Memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan paling singkat 1 periode masa tugas;

- (b) Terdaftar dalam data pokok pendidikan

(3) Menyampaikan surat pernyataan dengan format yang di unduh dari aplikasi Program Sekolah Penggerak dan ditandatangani oleh;

- (a) Kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk bagi kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, atau

- (b) Kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk bagi kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan di ketahui oleh ketua yayasan/badan perkumpulan di wilayahnya atau pejabat yang ditunjuk.

Yang memberikan dukungan kepada kepala satuan pendidikan dalam hal;

- 1) Keikutsertaan dalam proses seleksi;
 - 2) Izin untuk melaksanakan tugas sebagai kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- dan

- 3) Tidak memindahtugaskan yang bersangkutan ke luar provinsi/ kabupaten/kota ataupun sekolah lain yang bukan pelaksana Program Sekolah Penggerak selama empat tahun;
- (c) Menyampaikan pakta integritas yang diunduh dari aplikasi Program Sekolah Penggerak dan ditanda tangani oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (d) Menyampaikan surat pernyataan yang diunduh dari aplikasi Program Sekolah Penggerak yang menerangkan bahwa kepala satuan pendidikan yang bersangkutan tidak akan mengundurkan diri apabila terpilih sebagai kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak paling sedikit 4 (empat) tahun sejak ditetapkan;
- (e) khusus bagi kepala satuan pendidikan yang sudah mendaftar untuk ikut seleksi Program Sekolah Penggerak angkatan II akan melengkapi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 5) setelah ditetapkan sebagai kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- (f) surat keterangan sehat dari dokter puskesmas/rumah sakit yang ditandatangani dokter dan diberikan cap (stempel) puskesmas/rumah sakit tersebut;

(g) tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(h) tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Seleksi kepala satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

(a) Pemerintah daerah bersama Kemendikbudristek mengadakan sosialisasi kepada kepala satuan pendidikan untuk mendaftar proses seleksi;

(b) Kemendikbudristek membuka pendaftaran bagi kepala satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah

Penggerak;

(c) Khusus bagi kepala SMA dan kepala SLB keikutsertaannya

mengikuti kabupaten dan kota yang telah ditetapkan sebagai daerah penyelenggara Program Sekolah Penggerak

sebagaimana dimaksud huruf b;

(d) Kepala satuan pendidikan mendaftar pada laman yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk mengikuti

2(dua) tahap proses seleksi berdasarkan model kompetensi kepemimpinan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) seleksi tahap 1

- a) melengkapi dokumen administrasi
- b) membuat daftar riwayat hidup, dan
- c) menulis esai

2) seleksi tahap II

simulasi mengajar dan wawancara;

(e) Kemendikbudristek mendokumentasikan hasil penilaian kepala satuan pendidikan yang telah mengikuti seleksi dan memberikan hasil penilaian yang lolos seleksi kepada tim panel yang terdiri atas unit pelaksana teknis Kemendikbudristek dan pemerintah daerah;

(f) Tim panel bertugas:

- 1) membuat pertimbangan terhadap hasil penilaian kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan memperhatikan hasil perangkaian dan keterwakilan keberagaman satuan pendidikan; dan
- 2) mengirimkan berita acara hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada pemimpin unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan;

(g) pemimpin unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan bertugas:

1) Menetapkan hasil seleksi kepala satuan pendidikan berdasarkan berita acara tim panel sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2);

2) Berita acara tim panel sebagaimana dimaksud pada angka 1) berisi informasi mengenai:

a) Daftar kepala satuan pendidikan yang akan ditetapkan sebagai kepala satuan pendidikan pada pelaksana Program Sekolah Penggerak; dan

b) Daftar kepala satuan pendidikan yang lolos seleksi sebagai cadangan kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak; dan

3) Menyampaikan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada pemimpin unit utama yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

(h) Pemimpin unit utama yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah menetapkan satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak;

(i) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf h dicatat dalam data pokok pendidikan sebagai satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak;

- (j) kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat berubah apabila mengalami kondisi sebagai berikut.

Tabel 2.2 Kondisi Kepala Satuan Pendidikan

No	Kondisi	Dokumen/bukti
1.	Mutasi/rotasi kepala satuan pendidikan antar-satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak	Surat mutasi
2.	Promosi jabatan	Surat promosi/surat keputusan jabatan
3.	Sakit dan tidak dapat menjalankan tugas selama paling sedikit 6 bulan secara terus-menerus	Surat keterangan dokter
4.	Meninggal dunia	Surat keterangan kematian
5.	Pensiun dini	Surat keputusan pensiun

- (k) Kepala satuan pendidikan atau wakilnya (bagi kepala satuan pendidikan yang sakit atau meninggal dunia) dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf j melapor ke dinas pendidikan setempat dan dinas pendidikan mengusulkan calon pengganti kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak kepada pemimpin unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan;

- (l) Calon pengganti kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam huruf j angka 2 sampai dengan angka 5, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Calon kepala satuan pendidikan pengganti merupakan kepala satuan pendidikan cadangan calon kepala sekolah penggerak;
- 2) Apabila kepala satuan pendidikan cadangan calon kepala sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak ada, maka calon kepala sekolah penggerak dapat diganti dari guru penggerak;
- 3) Apabila guru penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 2) tidak ada, maka dapat diangkat plt. kepala satuan pendidikan dari unsur anggota komite pembelajaran pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan ditetapkannya kepala satuan pendidikan definitif;
- 4) Apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dipenuhi, maka calon kepala sekolah penggerak dapat diangkat dari kepala satuan pendidikan lain yang bukan sekolah penggerak sepanjang telah mengikuti pelatihan komite pembelajaran.

(m) Pemerintah daerah mengusulkan calon pengganti kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak kepada pemimpin unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf l.

(n) pemimpin unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan:

- 1) Merekomendasikan calon pengganti kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam huruf m kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai kepala/plt. kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak yang telah ditetapkan; dan
- 2) Menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran data kepala satuan pendidikan pada data pokok pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak ditetapkan dengan petunjuk teknis oleh pemimpin unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan.

e. Manfaat Program Sekolah Penggerak

Terdapat beberapa manfaat yang di harapkan dari Program Sekolah Penggerak diantaranya bagi pemerintah daerah maupun satuan pendidikan.⁶⁴

- 1) Bagi pemerintah daerah Program Sekolah Penggerak diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya;

⁶⁴ Tioria Pasaribu et al., "Analisis Penerapan Program Sekolah Penggerak Terhadap Prestasi Belajar Siswa Tingkat Sekolah Dasar (SD) Se-Kotamadya Binjai," *Journal on Education* 6, no. 2 (2024): 11951–63, <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/5005>.

- a) Meningkatkan pendidikan mutu di daerah
 - b) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di satuan pendidikan
 - c) Memberikan efek *multiplier* dari sekolah penggerak akan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah
 - d) Menjadi daerah rujukan praktik baik dalam pengembangan sekolah penggerak
- 2) Bagi satuan pendidikan Program Sekolah Penggerak diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya;
- a) Meningkatkan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan
 - b) Mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru
 - c) Mendapatkan akses teknologi/ digitalisasi sekolah
 - d) Mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi satuan pendidikan

f. Evaluasi

1) Tahapan Evaluasi

Evaluasi ialah faktor penting dalam Program Sekolah Penggerak yang dapat mengukur kesuksesan maupun kegagalan program. Dalam proses evaluasi terdapat dua fungsi penting, yakni sebagai alat ukur implementasi program secara berkelanjutan dan alat ukur dampak program secara keseluruhan. Berikut ini merupakan tahapan pengukuran evaluasi:

a) Evaluasi awal program

Evaluasi awal program dilakukan dengan tujuan untuk menilai kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program. Hasilnya mempunyai beberapa manfaat atau fungsi:

- (1) Untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan yang memudahkan Kemendikbud dalam membentuk kategorisasi satuan pendidikan berdasarkan kondisi dan permasalahannya.
- (2) Sebagai tolak ukur yang dapat dijadikan petunjuk dalam melihat perubahan atau dampak yang diharapkan setelah dilakukan intervensi.
- (3) Menjadi referensi dalam menyusun dan melengkapi indikator perubahan yang diharapkan dari suatu program

b) Evaluasi pertengahan program

Evaluasi pertengahan program dilakukan setiap satu semester selama program berlangsung. Evaluasi pertengahan program dilakukan dengan tujuan untuk menilai pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan kinerja satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak. Hal ini memiliki manfaat bagi pemangku kepentingan dalam a) memantau implementasi program, b) melihat capaian berkala sehingga

hasilnya dapat dibandingkan hingga akhir Program Sekolah Penggerak, c) melaksanakan perubahan terhadap desain intervensi berdasarkan pemahaman tentang implementasi dan dampak.

c) Evaluasi akhir program

Dilakukan dengan tujuan untuk menilai kinerja satuan pendidikan pada akhir masa intervensi Program Sekolah Penggerak dengan cara membandingkan hasil dari evaluasi awal, pertengahan, dan akhir program. Hasilnya berguna untuk menerapkan strategi sehingga dapat mengalami perbaikan secara terus menerus di masa yang akan datang.⁶⁵



⁶⁵ Pratiwi et al., “Risalah Kebijakan Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan | 2020.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, yang mana peneliti merupakan instrumen kunci.⁶⁶ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus yakni suatu yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, batas-batas antara fenomena dan konteks yang tidak nampak dengan tegas dan multi sumber bukti yang dimanfaatkan. Penelitian deskriptif ialah bentuk penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik secara alamiah ataupun buatan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menuangkan secara lengkap terkait suatu kejadian untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi.⁶⁷

Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan segala sesuatu yang terjadi terkait dengan implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak yang ada di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 yang ber-alamat di Jl. Ponpes Darul Muhajirin, No.100 Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Lokasi tersebut dipilih dengan alasan bahwa

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)

⁶⁷ Rusandi and Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

SDN Bagorejo 03 telah mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak sejak tahun 2022 dan termasuk ke dalam Program Sekolah Penggerak angkatan 2 selain itu juga SDN Bagorejo 03 merupakan Sekolah Dasar Negeri satu-satunya di kecamatan Gumukmas yang telah mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak sehingga dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya dalam mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan informan yang memahami informasi terkait fokus pada objek penelitian dan merupakan informan kunci.⁶⁸ Subyek penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap yang paling tahu atau menguasai terhadap sesuatu yang akan diteliti.⁶⁹

Berdasarkan hal tersebut subyek penelitian yang di tetap sebagai informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Bagorejo 03
2. Holifah Muzayyanah, S.Pd. selaku Komite Pembelajaran
3. Anis Mawati, S.Pd, selaku Guru SDN Bagorejo 03

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶⁸ Abd. Muhith, et al. *Metodologi Penelitian*, cetakan pertama (Yogyakarta: BILDUNG, 2020) 26.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 218-219.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan mengamati suatu gejala yang diteliti untuk pengumpulan suatu data. Peneliti bisa menggabungkan data hasil observasi tersebut dengan teknik lain seperti wawancara dan teori serta penelitian terdahulu.⁷⁰ Sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik atau cara untuk mengumpulkan data secara sistematis terhadap obyek penelitian yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷¹ Adapun data yang akan diperoleh dengan teknik observasi, yakni:

- a. Mengamati Terkait Komunikasi Dalam Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember
- b. Mengamati Sumber Daya Dalam Implementasi/Penerapan Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember
- c. Mengamati Disposisi Dari Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember
- d. Mengamati Struktur Birokrasi Dari Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember

⁷⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022)

⁷¹ Hardani, et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group ,2020.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan metode tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber dengan tujuan untuk menemukan informasi dalam topik tertentu. Dalam teknik ini hasil dari interview yang dilakukan sangat bergantung pada kemampuan pewawancara atau peneliti dalam menggali informasi dan menafsirkan setiap jawaban.⁷² Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yang mana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur, tujuannya untuk menemukan permasalahan dengan lebih terbuka, pihak yang di wawancara atau informan diminta pendapat serta ide-idenya.⁷³ Beberapa informasi yang akan didapat melalui teknik wawancara, antara lain:

- a. Bagaimana Komunikasi Dalam Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember?
- b. Bagaimana Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Bagorejo 03 Gumukmas Jember?
- c. Bagaimana Disposisi Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember?
- d. Bagaimana Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember?

⁷² Abdusammad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021)

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 233.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “dokumen” yaitu barang-barang tertulis. Metode dokumentasi merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan suatu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada.⁷⁴ Dokumen terdapat berbagai macam bentuk seperti gambar, tulisan dan karya-karya monumental seseorang. Dokumen dengan bentuk tulisan misalnya seperti sejarah kehidupan, catatan harian, peraturan, kebijakan. Dokumen dengan bentuk karya seperti gambar, film, patung. Sedangkan dokumen bentuk gambar seperti foto, sketsa, gambar hidup dan lain sebagainya. Dokumentasi ialah bahan pelengkap dari penggunaan metode lainnya dalam mengumpulkan data.⁷⁵ Adapun data yang akan diperoleh melalui teknik dokumentasi, yakni:

- a. Profil Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember
- b. Dokumen Kebijakan Pemerintah Tentang Program Sekolah Penggerak
- c. Dokumen tambahan yang relevan dengan penelitian seperti, lokakarya, PMO, buku panduan, rencana pembelajaran, rencana aksi sekolah, dan dokumen berupa foto.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menggali serta menyusun secara sistematis transkrip, catatan di lapangan, materi lain yang peneliti telah kumpulkan untuk menemukan sebuah temuan.⁷⁶ Menurut Sugiyono analisis data ialah suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang

⁷⁴ Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.149.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

⁷⁶ Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

peneliti peroleh dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan di lapangan yang kemudian data di organisasikan berdasarkan kategori lalu menjabarkan dalam unit-unit, menyusun pola, memilah data yang penting untuk di pelajari hingga membuat kesimpulan yang mudah di pahami diri sendiri ataupun orang lain.⁷⁷

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah model Miles, Huberman dan Saldana dengan langkah-langkah sebagai berikut.⁷⁸

1. Pengumpulan Data

Pada tahap dasar peneliti melakukan pencarian secara umum terhadap objek penelitian, semua yang dapat dilihat penglihatan dan didengar peneliti dapat merekamnya. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi atau menggabung ketiganya. Dengan begitu peneliti mendapatkan banyak data dan bervariasi.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data mengarah pada suatu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, atau transformasi data yang muncul dalam catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan materi-materi lainnya. Dengan adanya kondensasi data yang disajikan akan lebih kuat.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 244.

⁷⁸ Matthew B. Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, (United States Of America: Sage Publications, 2014)

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan suatu kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan dan tindakan. Dengan penyajian data dapat membantu dalam memahami suatu kejadian dan melakukan tindakan, baik dengan analisis lanjutan ataupun melakukan tindakan atas dasar pemahaman tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusion*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ke empat dalam analisis data, kesimpulan ini menafsirkan maksud dengan mencatat pola, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Namun kesimpulan awal yang di paparkan masih terkesan samar-samar dan sementara, kesimpulan akhir akan terlihat pada saat pengumpulan data selesai tergantung pada besar kecilnya data dari catatan lapangan, penyimpanan, kemahiran peneliti, pengambilan yang digunakan serta waktu yang perlu dipenuhi peneliti.

Apabila kesimpulan yang di paparkan peneliti pada tahap awal dengan di dukung bukti-bukti yang valid serta konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan sebuah data, maka kesimpulan yang di paparkan adalah kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data mengarah pada seberapa jauh data yang telah dikumpulkan dapat dipercaya, akurat serta mencerminkan fenomena yang

diteliti.⁷⁹ Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber ialah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan suatu data dari sumber yang berbeda-beda namun dengan teknik yang sama. Triangulasi teknik ialah teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dalam mendapatkan data dari sumber yang sama⁸⁰.

G. Tahap-tahap Penelitian

Peneliti menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, dimulai dari pendahuluan, pengembangan desain, peneliti yang sebenarnya hingga pada laporan penulisan. Tahap-tahap pelaksanaan penelitian sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan penelitian

a. Menyusun rencana penelitian

Rancangan penelitian yang meliputi judul penelitian, latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, dan rancangan pengecekan keabsahan data.

b. Studi eksplorasi

Studi eksplorasi yaitu kunjungan ke lokasi penelitian sebelum penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan lokasi penelitian. Yang dilakukan pada 10 Juni 2024

⁷⁹ Aditya Wardhana, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data," December 2023.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 241.

c. Mengurus surat perizinan penelitian

Setelah menentukan lokasi penelitian, yang akan dilakukan selanjutnya yaitu mengurus surat perizinan penelitian yang mana perizinan tersebut berasal dari universitas yang ditanda tangani oleh Cahya Putri Anggraeni dan diserahkan kepada lokasi penelitian yaitu SDN Bagorejo 03 Gumukmas Jember

d. Penyusunan instrumen penelitian

Kegiatan ini meliputi penyusunan daftar pertanyaan wawancara, membuat proposal observasi, dan pencatatan dokumen yang diperlukan

2. Tahap pelaksanaan penelitian

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan peneliti pada 3- 22 Januari 2025 di SDN Bagorejo 03 Gumukmas Jember

b. Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu hasil dari mengumpulkan data dari penelitian untuk mempermudah dalam analisis data

c. Analisis data

Data yang telah terkumpul akan dilakukan analisis data dengan teknik analisis kualitatif yang hasilnya diuraikan dalam paparan data dan temuan penelitian

d. Kesimpulan

Meninjau ulang pada catatan-catatan dengan bertukar pikiran
untuk mengembangkan pemikiran

3. Tahap pelaporan

Tahap pelaporan merupakan penyusunan hasil penelitian dalam
bentuk skripsi atau tugas akhir perkuliahan sesuai dengan pedoman yang
berlaku pada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Lembaga

Nama Sekolah	UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03
NPSN	20525101
NSS	101052406025
Alamat	Jl. Ponpes Darul Muhajirin No. 100, RT001/RW010, Dusun Krajan, Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
Kode Pos	68165
SK Pendirian	Tahun 2007
Tanggal SK Pendirian	20-06-2007
Daerah	Pedesaan
Status Sekolah	Negeri
Akreditasi	B
Tahun berdiri	1965
Bangunan Sekolah	Milik Sendiri
Kegiatan Belajar	Pagi
Lokasi sekolah	A. Jarak ke pusat kecamatan: 5 KM B. Jarak ke pusat kab/kota: 42 KM
Organisasi Penyelenggara	Pemerintah
Nomor Telepon	081259111261
Email	sdnbagorejotiga@gmail.com

2. Moto Juang, Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah

a. Moto Juang

Man Jadda Wa Jadda: Berarti Program Peningkatan Mutu UPTD Satuan Pendidikan SDN Bagorejo memiliki motto *Man Jadda Wa Jadda* yang artinya kurang lebih siapa yang bersungguh-sungguh makan akan mendapatkan hasil yang baik. Bekerja maksimal, bekerja yang cerdas, bekerja secara ikhlas dan bekerja secara tuntas.

b. Visi Sekolah

“Mewujudkan generasi “**MAKAN ROTI MANIS**” (beriMAN, bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berkebhineKAANn global, gotong ROyong, kreaTif, MANdiri, kritIS)

Indikator Visi Sekolah

- 1) Pembentukan Spiritualitas
- 2) Pembentukan Karakter
- 3) Pengembangan Kebhinekaan Global
- 4) Pendorongan Kreatifitas
- 5) Pengembangan Kemandirian
- 6) Pengembangan Kritis

c. Misi Sekolah

- 1) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut budaya bangsa indonesia dengan berdo'a setiap melakukan kegiatan, serta membiasakan budaya 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun) antar warga sekolah

- 2) Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana berkesinambungan
- 3) Menumbuh kembangkan kreatifitas peserta didik melalui projek penguatan profil pelajar pancasila
- 4) Menumbuhkan semangat belajar secara intensif dengan keteladanan melalui program pembelajaran dan bimbingan dengan disiplin dan tanggung jawab sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan
- 5) Melestarikan kearifan lokal serta menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa

d. Tujuan Sekolah

Mengacu pada visi dan misi sekolah, serta tujuan umum pendidikan dasar, maka tujuan sekolah periode tahun 2020-2025 dalam mengembangkan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Unggul dalam kegiatan keagamaan dan kepedulian sekolah
- 2) Mampu dalam persaingan masuk ke jenjang SMP Negeri/Unggulan
- 3) Unggul dalam lomba olah raga, seni, MAPSI, dan Pramuka
- 4) Cakap dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang Sains dan Matematika
- 5) Cakap dalam kebersihan lingkungan sekolah
- 6) Menjadi sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat sekitar

7) Menjadi sekolah yang diminati masyarakat.

Mengacu pada visi dan misi sekolah, serta tujuan umum pendidikan dasar, maka tujuan sekolah dalam pendidikan sebagai berikut:

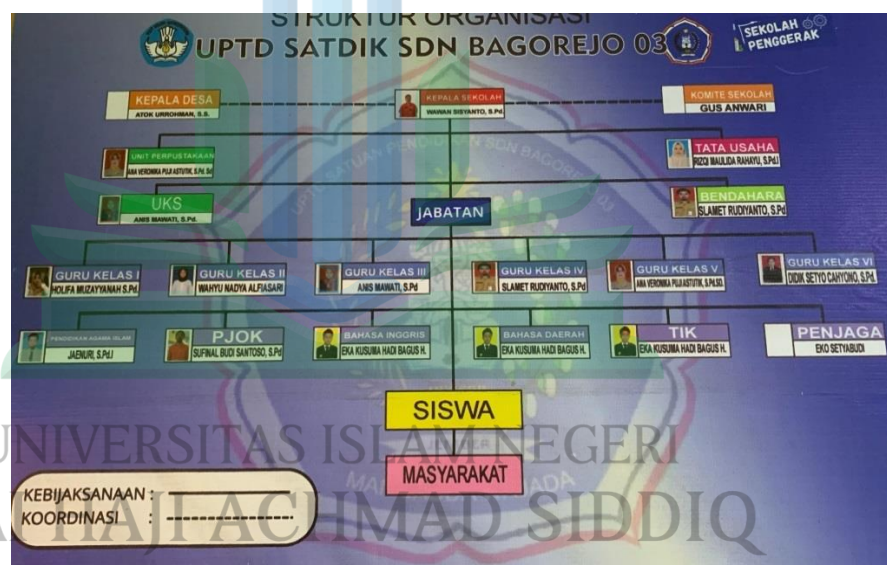
- 1) Semua warga sekolah memiliki dan mengamalkan sikap toleransi antar pemeluk agama
- 2) Semua warga sekolah membiasakan menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut
- 3) Semua warga sekolah memiliki sikap bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri
- 4) Membiasakan warga sekolah untuk mampu memberi dan menjadi teladan yang baik secara konsisten dan memiliki karakter sesuai adat ketimuran
- 5) Semua warga sekolah menjalin hubungan yang baik dengan orang tua siswa, Komite Sekolah, masyarakat, dan lembaga pemerintah
- 6) Semua warga sekolah memiliki kegemaran membaca
- 7) Semua pendidik melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran PAKEM sehingga peserta didik dapat bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain
- 8) Semua pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik menurut standar pengelolaan pendidikan

- 9) Semua warga sekolah memiliki jiwa kompetisi positif sehingga mampu berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
- 10) Semua warga sekolah memiliki dan membiasakan budaya bersih, peduli pada diri sendiri dan lingkungan
- 11) Semua warga sekolah memiliki dan mengamalkan sikap cinta tanah air dan semangat kebangsaan, serta suka bermusyawarah

3. Data Lengkap

a. Struktur Organisasi

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi



b. Sumber Daya Manusia

1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 4.1 Data Pendidik dan Tenaga Pendidikan

No.	Nama	Jabatan
1.	Wawan Sisyanto, S.Pd	Kepala Sekolah
2.	Holifah Muzayyanah, S.Pd	Guru kelas 1
3.	Ana Veronika Puji Astutik, S.Pd.SD	Guru kelas V
4.	Didik Setyo Cahyono, S.Pd	Guru kelas VI
5.	Anis Mawati, S.Pd	Guru kelas III

No.	Nama	Jabatan
6.	Sufinal Budi Santoso, S.Pd	Guru PJOK
7.	Didin Selvi Yudha S.Pd	Guru kelas II
8.	Rizqi Maulida Rahayu, S.Pd	Guru PAI dan BTA
9.	Wahyu Nadya Alfiasari, S.Pd	Guru mulok
10.	Eka Kusuma Hadi Bagus Hanafi, S.Pd	Guru kelas IV
11.	Eko Setyabudi	Penjaga sekolah

2) Peserta didik

Tabel 4. 2 Data Peserta didik SDN Bagorejo 03

Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	10	14	24
II	11	8	19
III	7	11	17
IV	5	10	15
V	9	7	16
VI	8	8	16
JUMLAH	50	58	108

3) Sarana dan Prasarana

Luan tanah	:750m ²
Status kepemilikan tanha	:Hak pakai
Asal tanah	:Tanah desa
Sumber listrik	:PLN
Daya listrik	:1300KWh
Jaringan internet	:indihome
Kapasitas intenet	:20 MBpS

a) Prasarana

Tabel 4. 3 Prasarana SDN Bagorejo 03

No	Jenis gedung	Jumlah	Ukuran	Kondisi
1.	Ruang kelas I	1	7x8	Baik
2.	Ruang kelas II	1	7x8	Baik
3.	Ruang kelas III	1	7x8	Baik
4.	Ruang kelas IV	1	7x4	Baik
5.	Ruang kelas V	1	7x8	Baik
6.	Ruang kelas VI	1	7x8	Baik
7.	Ruang guru	1	7x4	Baik
8.	Ruang kepala sekolah	-	-	-
9.	Perpustakaan	-	-	-

No	Jenis gedung	Jumlah	Ukuran	Kondisi
10.	Laboratorium TIK/ANBK	-	-	-
11.	UKS	-	-	-
12.	Kamar mandi guru	-	-	-
13.	Kamar mandi Pa	1	1,5x2	Rusak ringan
14.	Kamar mandi Pi	1	1,5x2	Rusak ringan
15.	Musholla	-	-	-
16.	Tempat wudhu	1	-	-
17.	Parkir	1	2x3	Baik
18.	Halaman bermain/upacara	1	10x8	Baik
19.	Taman/kebun	-	16x8	Baik
20.	Gudang	-	-	-
21.	Kantin	-	-	-
22.	Dapur	-	-	-

b) Sarana

Tabel 4. 4 Sarana SDN Bagorejo 03

No.	Nama sarana	Jumlah	Kondisi
1.	Papan tulis	8	Baik
2.	Meja guru	6	1 rusak
3.	Kursi guru	6	Baik
4.	Meja murid	55	5 rusak ringan
5.	Kursi murid	-	-
6.	Meja murid (isi satu)	-	-
7.	Kursi murid (isi satu)	109	5 rusak ringan
8.	Papan pajangan	5	Baik
9.	Almari kelas	6	Rusak ringan
10.	Meja kepala sekolah	1	Baik
11.	Kursi kepala sekolah	1	Baik
12.	LCD proyektor	1	Baik
13.	PC	7	Baik
14.	Laptop	1	Baik
15.	Chrome book	1	Baik
16.	Printer	21	Baik
17.	Pengeras suara	2	Baik
18.	Megaphone	1	Baik

No.	Nama sarana	Jumlah	Kondisi
19.	Almari arsip	1	Rusak ringan rusak ringan
20.	Papan nama kepala sekolah	1	Baik
21.	Pompa air listrik	1	Baik
22.	Kursi tamu	1	Baik
23.	Tandon air	1	baik
24.	Kipas angin	10	4 rusak, 4 rusak ringan
25.	Jam dinding	7	Baik

B. Penyajian dan Analisis Data

Pada bagian ini akan menyajikan data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan triangulasi sumber dengan tiga informan yaitu kepala sekolah SDN Bagorejo 03, komite Pembelajaran dan guru dan triangulasi teknik yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari ketiga teknik dan informan tersebut diperoleh data terkait Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember. Adapun penyajian dan analisis data disesuaikan dari masing-masing fokus penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting karena di dalamnya terdapat proses penyampaian informasi, dalam hal ini proses penyampaian informasi terjadi dari si pembuat kebijakan kepada si penerima kebijakan. Terdapat 3 indikator dalam dimensi komunikasi diantaranya: Penyampaian, Kejelasan, Konsisten.

a. Penyampaian

Program Sekolah Penggerak disampaikan langsung oleh Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 1 Februari 2021. Dalam sosialisasinya melalui media Youtube KEMDIKDASMEN, Nadiem Anwar Makarim memaparkan mengenai apa itu Program Sekolah Penggerak, ruang lingkup, serta tujuan.

Pada tingkat daerah, pihak satuan pendidikan yang di wakili oleh kepala sekolah SDN Bagorejo 03 mendapatkan sosialisasi terkait Program Sekolah Penggerak yang disosialisasikan oleh fasilitator Program Sekolah dari BBGP (Balai Besar Guru Penggerak) sebagaimana yang dijelaskan kepala sekolah SDN Bagorejo 03 Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd,

Awalnya saya tidak tahu ya apa itu program sekolah penggerak, terus saya beberapa kali disuruh ikut Zoom Meeting itu tidak hadir, lalu dihubungi oleh fasilitatornya melalui WhatsApp, fasilitator program sekolah penggerak “Pak wawan kok tidak daftar Program Sekolah Penggerak”. Kemudian dari situ saya diberi tahu tentang Program Sekolah Penggerak, lalu daftarlal ikut seleksi Program Sekolah Penggerak. Jadi untuk sosialisasinya disampaikan oleh fasilitator dari BBGP.⁸¹

Kabupaten Jember memperoleh kesempatan untuk mendaftar Program Sekolah Penggerak pada Angkatan Ke-2. Pada tahap awal semua kepala sekolah di Kabupaten Jember yang memenuhi syarat administrasi bisa mendaftarkan diri secara mandiri melalui website Kemendikbud,

⁸¹ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

SDN Bagorejo 03 ini adalah satu-satunya SD Negeri di kecamatan Gumukmas yang lolos menjadi Sekolah Penggerak Angkatan 2 ini, dulu ada dua tahap *kayaknya* pertama, seleksi kompetensi kepala sekolah terus ada seleksi admin sama buat esai, nah yang kedua wawancara sama praktik ngajar. Alhamdulillah dari banyak sekolah yang daftar SDN 03 lolos di angkatan 2 ini .⁸²

Berdasarkan penjelasan dari kepala sekolah bahwa setelah Sekolah di nyatakan lolos Program Sekolah Penggerak, Sekolah membentuk komite pembelajaran,

Setelah sekolah terekrut sebagai Sekolah Penggerak pada saat itu ada yang namanya pembentukan komite pembelajaran, dua orang waktu itu Pak Rudi dan Bu Ifa selaku guru kelas dari kelas 1 dan 4, karena di awal kan yang melaksanakan kurikulum merdeka kelas 1 dan 4. Jadi saya dan dua guru mengikuti BIMTEK selama enam bulan. Kalau sekarang semua kelas sudah melaksanakan kurikulum merdeka.⁸³

Adapun pada tingkat sekolah, sosialisasi dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan sasaran pertama yakni anggota sekolah, berikut penjelasan dari Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd , “Seperti yang saya jelaskan tadi ya, setelah SDN Bagorejo 03 lolos sebagai Sekolah Penggerak kemudian saya sampaikan saya sosialisasikan kepada semua termasuk guru-guru, tenaga kependidikan, pengawas, dan juga wali murid.”⁸⁴

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd bahwa sekolah selain mensosialisasikan pada anggota sekolah juga mendapatkan tugas untuk melakukan sosialisasi kepada sepuluh SD

⁸² Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

⁸³ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

⁸⁴ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

yang berada di kecamatan Gumukmas. Berikut ini yang disampaikan

Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd ,

Untuk SDN Bagorejo 03 ini juga kebagian untuk mensosialisasikan program ini kepada sekolah lain, kebetulan SDN Bagorejo 03 kebagian 10 lembaga pendidikan untuk melakukan sosialisasi program sekolah penggerak itu kepada Gugus 04 Bagorejo Tembokrejo, di Tembokrejo ada 5 lembaga dan di Bago ada 4 lembaga karena memang tujuan program ini kan adalah sebagai contoh dan melakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah yang lain, begitu .⁸⁵

Berdasarkan paparan tersebut dipahami bahwa untuk menjadi Sekolah Penggerak ini berangkat dari mengikuti seleksi kepala sekolah secara nasional yang melalui berbagai tahapan dan setelah dinyatakan lolos kemudian pembentukan komite pembelajaran hingga melakukan pengimbasan ke sekolah lain. Begitu juga yang disampaikan Ibu Holifah Muzayyanah, S.Pd selaku komite pembelajaran dan guru penggerak,

Jadi awalnya kepala sekolah daftar untuk ikut program sekolah penggerak kemudian ada seleksi dari sekian banyak sekolah Alhamdulillah di Bagorejo 03, pak Wawan selaku kepala sekolah yang mengikuti seleksi. Dan Alhamdulillah bisa terekrut dalam angkatan 2 sekolah penggerak. Di kecamatan Gumukmas ini sekolah negeri yang menjadi sekolah penggerak hanya di SDN Bagorejo 03. Kemudian kita sosialisasikan murid dan kepada wali murid kelas satu dan empat.⁸⁶

Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Anis Mawati, S.Pd juga
Selaku Guru Penggerak,

Kebetulan saya masuk di SDN Bagorejo 03 ini ditahun 2022 ketika saya masuk di SDN 03, sekolah ini sudah menjadi sekolah penggerak ditahun pertama. Kemudian yang saya tau di

⁸⁵ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

⁸⁶ Holifah Muzayyanah , diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

Bagorejo 03 ini kok bisa menjadi sekolah penggerak karena mengikuti uji kompetensi selaku kepala sekolah untuk menjadi sekolah penggerak. Ketika saya masuk ini memang ada sosialisasi dari kepala sekolah itu memang ada, bahkan juga ketika rapat wali murid itu juga diberi tahu bahwa sekolah kita itu sudah menjadi sekolah penggerak, mengenai sekolah penggerak itu dijelaskan runtut oleh Pak Wawan sebagai kepala sekolah dan juga Pak Rudi dan Bu Ifa selaku KP (Komite Pembelajaran) itu dijelaskan dan disosialisasikan bahkan pada saat acara karnaval itu disosialisasikan ke warga sekitar bahwa sekolah kita itu sudah menjadi sekolah penggerak dengan program-programnya. Juga kita sosialisasikan melalui brosur juga tentang kelebihan dan kekurangan menjadi sekolah penggerak. Jadi untuk sosialisasi saya rasa sudah dilakukan dengan cukup baik.⁸⁷

Pendukung dalam sosialisasi Program Sekolah penggerak terletak pada fasilitator yang memberikan bantuan kepada sekolah dalam menjalankan program, seperti yang sampaikan oleh Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd, “Kalau untuk pendukungnya mungkin dari fasilitator ke sekolah contohnya dalam memberikan arahan dan informasi tentang apa-apa saja yang harus dikerjakan”⁸⁸

Sedangkan kendala yang di alami dalam sosialisasi yang dijelaskan oleh Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd berikut ini, “Untuk penghambat ya itu ada sedikit penghambat, kadang-kadang kita menerima perubahan jadwal untuk Google Meet atau jadwal lokakarya tidak tepat waktu, sehingga dari situ berbenturan jadi terkadang ada waktu yang dimana kita tidak bisa mengikutinya”⁸⁹

⁸⁷ Anis Mawati, diwawancara oleh penulis, Jember , 8 Januari 2025

⁸⁸ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

⁸⁹ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis , Jember, 15 Januari 2025

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam sosialisasi yang dilakukan disekolah yang dijelaskan oleh Bu Anis mawati, S.Pd berikut ini,

Kalau pendukung itu jelas dari kekompakan para guru, itu pasti yang utama. Kalau untuk penghambat itu, *kayak* wali murid itu kan belum paham *apa sih* itu sekolah penggerak, bedanya itu apa dengan sekolah-sekolah yang lain, kan sosialisasinya itu sudah tetapi kita itu tidak terhenti di sosialisasi itu saja. Jadi kita harus sering memberikan pemahaman kepada anak-anak juga wali murid tentang apa itu sekolah penggerak, apa saja program-programnya jadi hambatannya itu harus lebih lagi dalam memberikan pemahaman dan juga dukungan yang penuh dari wali murid.⁹⁰

Lebih lanjut disampaikan oleh Bu Holifah muzayyanah, S.Pd bahwa yang menjadi pendukung dalam sosialisasi Program Sekolah Penggerak adalah semangat warga sekolah baik dari kepala sekolah, para guru dan juga para murid, “Alhamdulillah semuanya semangat. itu pendukungnya, semangatnya luar biasa baik dari teman-teman semua dan dari kepala sekolah”⁹¹

Berbeda dengan pendapat Bu Anis mawati, S.Pd, Bu Holifah muzayyanah, S.Pd menyampaikan tidak ada penghambat dalam kegiatan sosialisasi disekolah, “Saya rasa dalam kegiatan sosialisasi tidak ada, maksudnya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sebelum program ini dilaksanakan sekolah melakukan sosialisasi kepada wali murid didampingi oleh pengawas jadi tidak ada hambatan.”⁹²

⁹⁰ Anis Mawati , diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Januari 2025

⁹¹ Holifah Muzayyanah, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Januari 2025

⁹² Holifah Muzayyanah, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Januari 2025

Pendapat tersebut diperkuat oleh Pak Wawan Sisyanto, S.Pd selaku kepala SDN 03 Bagorejo, “Alhamdulillah sejauh ini gak ada ya hambatan yang sulit, semua antusias mulai dari para guru sampai wali murid itu semangat dalam sosialisasi”⁹³

Dari hasil penjelasan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 mendapatkan sosialisasi Program Sekolah Penggerak melalui fasilitator PSP dari BBGP (Balai Besar Guru Penggerak) kepada sekolah-sekolah. Adapun sasaran sosialisasi yang dilakukan disekolah adalah warga sekolah yang memuat komite pembelajaran, para guru, pengawas, wali murid, termasuk juga sekolah lain yang mendapatkan pengimbasan praktik. Terdapat 2 tahapan seleksi yang di ikuti oleh kepala sekolah dalam mendaftar Program Sekolah Penggerak yakni pada tahap pertama terdiri dari seleksi kompetensi kepala sekolah, seleksi administrasi dan seleksi esai, pada tahap kedua yakni wawancara dan praktik mengajar.

Adapun pendukung dalam sosialisasi yakni bantuan dari fasilitator Sekolah Penggerak dan semangat anggota sekolah, sedangkan hambatan yang dialami dalam sosialisasi yang diberikan oleh fasilitator yakni perubahan jadwal yang tidak tepat waktu. Selain itu, hambatan yang dialami sekolah dalam memberikan sosialisasi berupa pemberian pemahaman yang ekstra kepada wali murid. Meskipun demikian, hal tersebut bukan hambatan yang sulit, para guru

⁹³ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Januari 2025

hingga wali murid tetap memiliki semangat dan antusias dalam sosialisasi.

b. Kejelasan

Kejelasan mengenai informasi, tujuan serta sasaran dari Program Sekolah Penggerak harus disampaikan dengan tepat oleh pembuat kebijakan dan dipahami oleh para implementor. Terkait informasi Program Sekolah Penggerak telah disampaikan oleh Kemendikbud melalui sosialisasinya kepada semua pihak yang terlibat dan kejelasan kebijakan tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak.

Informasi tentang Program Sekolah Penggerak secara runtut disampaikan baik dari Kemendikbud maupun dari FSP (Fasilitator Sekolah Penggerak) melalui sosialisasinya, berikut ini yang disampaikan oleh Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd terkait kejelasan informasi,

Alhamdulillah sejauh ini untuk penyampaianya ya sesuai apa yang harus kita jalankan. Awalnya saya belum tau sekolah penggerak itu apa dan bagaimana, tapi melalui fasilitator sekolah penggerak ya jadi tau dijelaskan Program Sekolah Penggerak itu gini-gini programnya ini-ini. Fasilitator juga informatif selalu membantu kalau kita ada kesulitan apa begitu dibantu, kalau ada program-program yang harus dijalankan juga penyampaiannya Alhamdulillah jelas, misal belum ada yang kita pahami kita saling sharing.⁹⁴

⁹⁴ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

Berdasarkan Keputusan Mendikbud Ristek bahwa Program Sekolah memiliki tujuan diantaranya: meningkatkan kompetensi karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila, menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas, membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas, dan, menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah.

Pemerintah membentuk ruang lingkup penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dalam rangka mencapai tujuan tersebut yang dimulai dari sosialisasi Program Sekolah penggerak, penempatan provinsi/kabupaten/kota sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak, penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan dan yang terakhir evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Kejelasan mengenai kebijakan program dapat dipahami melalui 5 intervensi Program Sekolah Penggerak yang di implementasikan di satuan pendidikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd,

Kami menerima kejelasan kebijakan Program Sekolah Penggerak ini melalui program-programnya, ada 5 intervensi dari Program Sekolah Penggerak yang memang harus diterapkan di sekolah yang pertama ada pendampingan seperti yang saya jelaskan bahwa sekolah lolos menjadi Sekolah Penggerak kita mendapatkan pendampingan dari fasilitator Sekolah Penggerak namanya Pak Miftahul Hakim yang membantu sekolah mulai dari memberi informasi, lokakarya, evaluasi, *sharing* dan lainnya. Kalau penguatan SDM ada *workshop*, pelatihan-pelatihan, ada diklat, ada juga KOMBEL buat saling *sharing*. Kemudian untuk pembelajaran paradigma baru ini diimplementasikan pada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar yang mana menggunakan kurikulum merdeka, kalau ekstrakurikuler ada pramuka, pancak silat, sepak bola, sama tari, terus untuk kokurikuler itu dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berbasis Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Untuk perencanaan berbasis data ya data-data sekolah bentuknya berdasarkan rapor pendidikan. Selanjutnya digitalisasi sekolah itu SDN bagorejo 03 memanfaatkan berbagai platform digital untuk pembelajaran, di semua kelas sudah ada LCD dan proyektor jadi semua guru bisa berkreasi dengan memanfaatkan media itu.⁹⁵

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa SDN Bagorejo 03 sudah melaksanakan 5 intervensi Program Sekolah Penggerak.

Penjelasan Bu Holifah Muzayyanah, S.Pd mengenai kejelasan kebijakan Program Sekolah Penggerak berikut ini,

Kebijakan setelah terekrut menjadi Sekolah Penggerak ini, kepala sekolah bersama komite pembelajaran termasuk saya karena saya komite pembelajaran waktu itu menjalani Bimbingan Teknis (bimtek) ya yang di sediakan kemendikbud melalui fasilitator selama kurang lebih 6 bulan secara daring. Di sana kami menjalani pelatihan-pelatihan yang kemudian dari disitu kita bisa ajarkan ke guru-guru yang lain agar saling berbagi untuk peningkatan kompetensi sebagai bentuk berbagi praktik baik. Selain itu juga ada komunitas belajar dan PMM bagi para guru untuk saling *sharing*. Kemudian kebijakan selanjutnya yaitu kurikulum merdeka yang dilaksanakan

⁹⁵ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

disekolah untuk pembelajaran yang tadinya masih menggunakan kurikulum 2013 berubah menjadi kurikulum merdeka, dalam pembelajaran kita juga menggunakan berbagai media dan platform digital biar anak-anak itu merasakan pembelajaran yang menyenangkan, di sini semua kelas sudah di sediakan proyektor dan LCD jadi saya sebagai guru dalam mengajar itu bisa dengan mudah lah dengan memanfaatkan media itu.⁹⁶

Hal yang sejalan juga di sampaikan oleh Bu Anis mawati, S.Pd berikut ini,

Ketika saya diberi tahu oleh kepala sekolah “Bu Anis Sekolah kita itu sudah menjadi sekolah penggerak” seperti itu, juga ada buku panduannya kayak ada file nya sekolah penggerak itu apa kemudian programnya itu bagaimana, juga kita itu ada komunitas belajar (kombel) nah disitu kita sama-sama *sharing* bagaimana program-programnya bagaimana. Jadi dari sana itu saya sedikit banyak tahu lah bagaimana program-programnya kan seperti kita itu mendapatkan pendampingan dari fasil kalau sekolah lain yang bukan Sekolah Penggerak kan tidak mendapatkan ya, nah terus kita juga ada yang saya bilang tadi kayak komunitas belajar ada PMM ada pelatihan sama diklat begitu-begitu tujuan untuk peningkatan kompetensi para guru dari PMM itu ada setifikatnya langsung. Kemudian sekolah juga menerapkan kurikulum merdeka ya karna Sekolah Penggerak ini wajib merenapkan kurikulum merdeka, cuma untuk tahun pertama kan masih kelas 1 dan 4 dilanjut taun kedua kelas 3 dan 5 dan sekarang tahun terakhir semua sudah menerapkan merdeka belajar. Kemudian sekolah juga menerapkan digitalisasi ya, kami para guru banyak menggunakan seperti Canva, Youtube, Google Form dan lainnya untuk menunjang pembelajaran karena setiap kelas ada LCD dan Proyektor,⁹⁷

Dengan demikian dapat diketahui bahwa mengenai informasi Program Sekolah Penggerak telah di komunikasikan dan kejelasan mengenai Program Sekolah Penggerak terlihat dari informasi terkait 5 intervensi Program Sekolah Penggerak yang dilaksanakan di sekolah berupa pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM

⁹⁶ Holifah Muzayyanah, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

⁹⁷ Anis Mawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

sekolah, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah.

c. Konsisten

Kebijakan yang disalurkan dalam komunikasi yang terjalin sebaiknya dilakukan secara konsisten. Hal tersebut menghindari adanya hal yang berubah-ubah dan kebingungan. Seperti pendapat Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd bahwa kebijakan Program Sekolah Penggerak ini telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jadwalnya,

Betul, secara konsisten. Bahwa Program Sekolah Penggerak menerima pelatihan-pelatihan atau melalui lokakarya dan pendampingan-pendampingan itu secara luring maupun daring. Nah disini sudah ada jadwalnya oleh BBGP untuk penyampaian PSP. Untuk lokakarya dilakukan 1 bulan sekali, komunitas belajar 1 bulan 2 kali, Google Meeting dilakukan 2 bulan sekali, terus ada 2 bulanan itu PMO, PMO diadakan 2 bulan sekali.^{98]}

Penyampaian dari Kepala SDN Bagorejo 03 terkait hal nya bentuk konsistensi kebijakan Program Sekolah Penggerak terlihat dari jadwal telah yang di buat. Lokakarya dilakukan 1 bulan sekali secara luring untuk semua Sekolah Penggerak ditingkat kabupaten/kota. Coaching Project Management Office (PMO) dilakukan 2 bulan sekali bagi kepala sekolah dan komite pembelajaran di satuan pendidikan, Google Meeting yang membahas berbagai topik dan komunitas belajar bagi komite pembelajaran guru dan didampingi fasilitator/pelatih ahli.

Begitu juga yang disampaikan oleh Bu Anis mawati, S.Pd terkait konsistensi Program Sekolah Penggerak,

⁹⁸ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

Iya secara konsisten. Kebetulan juga ada setiap satu bulan sekali itu ada kegiatan lokakarya sekolah penggerak. Kemudian disitu kegiatannya di awasi oleh fasilitator, setiap sekolah penggerak itu ada fasilitatornya, jadi informasinya yang diberikan itu cukup konsisten, karena setiap satu bulan sekali di adakan lokakarya jadi cukup konsisten, kemudian juga komite belajarnya juga berjalan satu bulan dua kali. Jadi cukup konsisten dan *continue* bahkan terus diawasi oleh fasilitator.⁹⁹

Penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik, guru/pendidik melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (coaching) 1 to 1 dengan pelatih ahli yang di sediakan oleh Kemendikbud. Adapun pelatihan bagi kepala sekolah, pengawas/penilik, guru/pendidik yakni: pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru bagi kepala sekolah, pengawas/penilik, dan perwakilan guru setiap mata pelajaran dan guru kelas yang dilakukan 1 kali program di tingkat nasional dan, pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru bagi seluruh guru di sekolah penggerak oleh kepala sekolah, pengawas, dan guru yang telah mendapat pelatihan di tingkat nasional yang dilakukan 1 kali di tingkat sekolah.

Adapun pendampingan bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru/pendidik dilakukan secara berkala setiap bulan berupa lokakarya tingkat kabupaten/kota, belajar melalui komunitas praktisi, program *coaching one to one* bagi kepala sekolah. Selanjutnya implementasi teknologi berupa literasi teknologi, platform guru:profil

⁹⁹ Anis mawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

dan pengembangan kompetensi, platform guru: pembelajaran, platform sumber daya sekolah, platform rapor pendidikan.

Bentuk pengembangan kompetensi kepala sekolah di Sekolah Penggerak yakni kepala sekolah belajar dengan 1 to 1 pelatih ahli mengenai pembelajaran dengan paradigma baru selama 70 JP (jam pelajaran), lokakarya dan pertemuan komunitas praktisi kepala sekolah setiap bulan bersama pengawas dan pelatih ahli di kabupaten. Selanjutnya kepala sekolah memiliki peran untuk mengembangkan kelompok belajar guru di sekolah, melakukan coaching bagi guru dan tenaga kependidikan secara berkala, mendorong merefleksikan dan meningkatkan pelaksanaan pembelajaran secara holistik di sekolah melalui (penyelenggaraan In House Training, asesmen diagnosis, pemilihan toolkit yang tepat, pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid), membuat perencanaan sekolah berdasarkan data rapor pendidikan dengan melibatkan orang tua murid dan komunitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa kebijakan Program Sekolah yang dilaksanakan di SDN Bagorejo 03 telah dilakukan secara konsisten.

Sehingga dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa komunikasi kebijakan Program Sekolah Penggerak di SDN Bagorejo 03 telah berjalan dengan baik, mulai dari penyampaian dalam sosialisasi Program Sekolah Penggerak, kejelasan informasi terkait kebijakan Program Sekolah Penggerak dan konsistensi dalam pelaksanaan

kebijakan Program Sekolah Penggerak. Faktor pendukung dalam komunikasi ialah semangat dan kekompakkan anggota sekolah, sedangkan hambatan yang dialami dalam komunikasi yang diberikan oleh fasilitator yakni perubahan jadwal yang tidak tepat waktu, sehingga terdapat jadwal tidak bisa diikuti. Selain itu, hambatan yang dialami sekolah dalam memberikan komunikasi berupa pemberian pemahaman yang ekstra kepada wali murid. Meskipun demikian, hal tersebut bukan hambatan yang sulit, para guru hingga wali murid tetap memiliki semangat dan antusias dalam menjalankan kebijakan Program Sekolah Penggerak.

2. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember

Sumber daya yang di maksud dalam penelitian ini ialah hal yang harus dimiliki dalam pengimplementasian kebijakan yang meliputi: sumber daya manusia/ staf, informasi, wewenang, dana/ anggaran, dan fasilitas.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi penting dalam pengimplementasian kebijakan Program Sekolah Penggerak, maka dari itu pelaksana kebijakan harus memiliki keahlian dan berkompeten dalam bidangnya. Menurut Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd dalam wawancara menyampaikan bahwa guru dan staf di sekolah dapat

dikatakan sudah sesuai melalui program-program pendampingan dan pelatihan yang di sediakan,

Melalui pendampingan dan pelatihan, apa yang telah disampaikan oleh fasilitator sekolah penggerak bisa dikatakan saat ini sumber daya manusia yang ada disekolah sudah sesuai, melalui pendampingan dan apa yang disampaikan telah di praktikkan dengan baik, jadi Alhamdulillah untuk guru-guru kami sudah kompeten dan sudah menjalankan apa yang telah disampaikan oleh fasilitator sekolah penggerak.¹⁰⁰

Begitu juga pendapat Bu Anis Mawati, S.Pd dalam wawancaranya menyampaikan bahwa ,

Tentunya ketika awal saya masuk di sekolah ini tahun 2022 sekolah ini masih ada yang menggunakan kurikulum 13, jadi kalau sekolah penggerak itu kan lebih fokus ke kurikulum merdeka. Karena sekolah sudah menjadi Sekolah Penggerak dari situ banyak pendampingan banyak pelatihan-pelatihan kayak webinar, workshop, komunitas belajar atau kombel. jadi saya rasa waktu itu saya masih harus belajar lagi. Kemudian pada tahun 2024 saya itu lulus sebagai guru penggerak karena sekolah penggerak itu langkah baiknya jika ada guru penggeraknya. Saya juga melalui pendidikan guru penggerak selama 6 bulan dan dinyatakan lulus sangat memuaskan. Jadi untuk saat ini saya sudah merasa cukup berkompetensi untuk bisa melaksanakan program sekolah penggerak dengan dasar saya sebagai guru penggerak.¹⁰¹

Pengembangan kompetensi kepala sekolah di Sekolah Penggerak adalah kepala sekolah akan mempelajari mengenai pembelajaran dengan paradigma baru selama 70 JP (jam pelajaran), lokakarya dan pertemuan komunitas praktisi kepala sekolah setiap bulan bersama pengawas dan pelatih ahli di kabupaten. Hal tersebut diperkuat dengan dokumentasi dibawah ini

¹⁰⁰ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

¹⁰¹ Anis Mawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025



Gambar 4. 2 Kegiatan Lokakarya Tingkat Kabupaten

Selain itu terdapat pendampingan yang dilakukan untuk kepala sekolah dan komite pembelajaran setiap satuan pendidikan yang dilakukan setiap dua bulan sekali melalui *Project Manajement Office* (PMO). PMO merupakan divisi atau bagian dalam suatu organisasi yang menentukan, mengembangkan dan menjaga standar dalam manajemen program. struktur PMO terdiri dari empat level diantaranya, level pertama pusat yakni PAUD Dikdasmen, Balitbang, Sekjen, Ikjen, UPT GTK. Kedua level PAUD Dikdasmen yakni Direktur PAUD Dikdasmen, kepala UPT PAUD, TIM UPT, Konsultan, WP UPT PAUD Dikdasmen. Ketiga level daerah yakni UPT GTK/ koordinator FSP, Dinas kab/kota, perwakilan PAUD Dikdasmen, pengawas sekolah. Keempat level satuan pendidikan yakni fasilitator Sekolah Penggerak, pengawas sekolah, kepala sekolah, komite pembelajaran



Gambar 4. 3 Kegiatan PMO di Sekolah

Dari dokumentasi gambar di atas diketahui bahwa kepala SDN Bagorejo telah melaksanakan kegiatan PMO. Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan, menemukan akar permasalahan, dan menyepakati solusi yang berhubungan dengan hasil belajar siswa. Kegiatan PMO level satuan pendidikan terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah dan komite pembelajaran yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang disampaikan kepala SDN Bagorejo 03 yaitu 2 bulan sekali pada PSP angkatan 2.

Adapun bentuk program pengembangan kompetensi guru yang dijalankan dalam rangka mendukung Program Sekolah Penggerak yang dijelaskan oleh Bu Anis Mawati, S.Pd berikut ini,

Ada. Yang pastinya ada, kita ada program yang namanya PMM. PMM itu Platform Merdeka Mengajar disitu banyak sekali modul-modul pembelajaran, banyak sekali diklat-diklat mandiri. Kemudian disitu juga ada yang namanya aksi nyata. Nah di aksi nyata itu setelah kita belajar modul dan menyelesaikan modul tersebut kemudian kita bisa melakukan aksi nyata kita kirim, nanti kita mendapatkan sertifikat. Sertifikat itu resmi dari PMM, jadi untuk kompetensinya saya rasa memang kita memang sudah di fasilitasi sama pemerintah bahwa kita tidak harus keluar keman-mana. Kebetulan saya

ditahun 2024 sudah mendapat beberapa sertifikat dari PMM. Jadi peningkatan kompetensi kita lakukan secara konsisten dan itu memang berhubungan dengan sekolah penggerak tersebut.¹⁰²



Gambar 4. 4 Sertifikat PMM

Hal senada juga di sampaikan oleh Bu Holifah Muzayyanah, S.Pd bahwa terdapat program-program pengembangan kompetensi yang dilakukan dalam menjalankan Progam Sekolah Penggerak,

Ada. Programnya ada, jadi bapak/ibu guru bisa mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri yang ada di SIM BKP terus dari BBGP sendiri ada program setiap 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali, programnya ada lokakarya bersama fasilitator program sekolah penggerak. Saya juga mengikuti PMM itu ya belajar modul-modul dan melakukan aksi nyata.¹⁰³



Gambar 4.5 Sertifikat PMM

¹⁰² Anis Mawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

¹⁰³ Holifah Muzayyanah, wawancara oleh penulis, Jember 8 Januari 2025

Selain dari itu kepala sekolah juga mempunyai peran dalam mengembangkan kelompok belajar dan memberikan coahing bagi para guru untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran secara holistik di sekolah salah satunya dengan *In House Training* (IHT) oleh komite pembelajaran.



Gambar 4. 6 Kegiatan IHT di SDN Bagorejo 03

Tidak berhenti disitu banyak kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru yang

kaitanya dalam pengembangan kompetensi dalam Program Sekolah Penggerak seperti pada gambar berikut ini



Gambar 4.7 Kegiatan Komunitas Belajar (Kombel)



Gambar 4. 8 Workshop Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bagi Guru

Berdasarkan hasil obeservasi SDN bagorejo telah melaksanakan kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan kompetensi dirinya untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak.

Terdapat keunggulan sumber daya manusia di SDN Bagorejo 03 menurut Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd berikut ini,

Untuk keunggulannya mungkin di kecamatan Gumukmas ini kan yang sudah menjadi Sekolah Penggerak 4 lembaga, nah kita yang satu-satunya SD Negeri, di SDN Bagorejo 03 ini terdapat 2 guru penggerak. Untuk menjadi guru penggerak kan mesti daftar dulu seleksi dulu kalau sekolah penggerak yang lain di kecamatan Gumukmas *kayaknya* belum ada dan di SDN

ini Alhamdulillah sudah ada 2 guru penggeraknya, jadi itu mungkin keunggulan tersendiri ya.¹⁰⁴

Faktor pendukung dalam melaksanakan program sekolah penggerak yang disampaikan Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd berikut ini, “Terutama dari semangat dan kolaborasi semua dewan guru dan bantuan dari pihak-pihak lain yang mendukung berjalannya Program Sekolah Penggerak ini.”¹⁰⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Holifah Muzayyanah, S.Pd bahwa semangat para guru yang menjadi pendukung utama, “karena kami sebelumnya sudah mendapatkan diklat dan pelatihan sebagai modal untuk menjalankan Program Sekolah Penggerak, dan tidak semua bisa terekrut jadi kami merasa semangat.”¹⁰⁶

Adapun faktor penghambat dalam menjalankan Program Sekolah Penggerak sebagaimana tutur Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd berikut ini,

Ya untuk penghambat tidak banyak, karena memang sudah diniati dan apa yang disampaikan oleh fasilitator semua sejauh ini sudah kita kerjakan. Hanya mungkin Guru-guru ada yang belum terbiasa dengan pembelajaran berbasis proyek dan belum terbiasa dengan platform-platform digital tetapi itu bisa diatasi misal ada hambatan semua di sampaikan ketika ada kombel. Untuk siswa sudah menerima kebijakannya melalui pembelajaran, kalau wali murid mungkin itu ya tidak semua bisa hadir pada saat panen karya P5 karena mungkin ada kesibukan, jadi banyak dari orang tua itu yang mungkin belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat dari pendekatan berbasis proyek, mereka merasa tidak mempunyai keterampilan yang cukup untuk membantu anak-anak mereka dalam tugas proyek yang diberikan, ini menjadi tantangan kita pihak

¹⁰⁴ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Januari 2025

¹⁰⁵ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Januari 2025

¹⁰⁶ Holifah Muzayyanah, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Januari 2025

sekolah untuk terus memberikan pengertian kepada mereka melalui komunikasi, kami berusaha memberi tahu mereka bahwa melalui pendekatan berbasis proyek ini dapat mengembangkan keterampilan siswa.¹⁰⁷

Sejalan dengan pendapat Bu Anis mawati, S.Pd terkait penghambat dalam menjalankan Program Sekolah Penggerak berikut ini, “Kalau penghambat dari wali murid, karena masih banyak yang belum paham mungkin ya terkait program-program dari Sekolah Penggerak ini,”

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi simpulkan bahwa kepala sekolah dan para guru berupaya dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki agar bisa mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak dengan cara ikut serta menjalani pelatihan-pelatihan bersama pelatih ahli, mengikuti lokakarya, menjalankan IHT, dan *workshop* baik yang dilakukan di dalam maupun diluar sekolah. Sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam Program Sekolah Penggerak diantaranya struktur PMO terdiri dari empat level dan sumber daya manusia lain yang mendukung jalannya program seperti fasilitator Sekolah Penggerak, kepala sekolah, Guru, murid, komite orang tua dan lembaga lain.

Adapun faktor pendukung dalam menjalankan Program Sekolah Penggerak yakni semangat dan kolaborasi dari para guru serta bantuan dari pihak terkait. Sedangkan penghambat terlatak pada guru-guru yang belum terbiasa dengan pendekatan baru dan penggunaan

¹⁰⁷ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Januari 2025

platform digital, juga wali murid yang masih belum paham akan program-program Sekolah Penggerak. Meskipun demikian hambatan tersebut dapat diatasi dan hanya di alami pada tahun pertama.

b. Sumber daya informasi

Informasi terkait kebijakan Program Sekolah Penggerak merupakan hal yang dibutuhkan dan penting bagi implementor dalam pelaksanaan. SDN Bagorejo 03 mendapatkan kemudahan informasi melalui fasilitator Sekolah Penggerak dan berbagai media, seperti yang disampaikan Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd berikut ini,

Yang menjembatani sekolah kami mengenai sekolah penggerak yaitu melalui Google Meeting yang diadakan, dari Fasilitator Sekolah Penggerak yang mengadakan lokakarya, dari situ saya mengetahui informasi mengenai sekolah penggerak, selain itu juga sekarang kan mudah mengakses apapun melalui media sosial ya, ya dari situ kita bisa menggali informasi melalui Youtube, Website Kemendikbud, juga Group WhatsApp kita gunakan¹⁰⁸

Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Anis Mawati, S.Pd berikut ini,

Untuk mendapat informasi tentunya saya tidak bingung kemana-mana, dari kepala sekolah sudah di sosialisasi, dari guru senior juga kita bisa sharing. Selain itu juga dari apa namanya? PMM itu tadi, workshop, terus dari kegiatan lokakarya setiap bulan kabupaten tersebut jadi kita kumpul semua sekolah penggerak, untuk informasi ya langsung saja di dapat dari semua Sekolah Penggerak di Jember, kebetulan tahun ini juga saya jadi Komite Pembelajaran di situ juga dibuatkan Group WhatsApp buat sharing.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

¹⁰⁹ Anis Mawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

Lebih lanjut Bu Holifah Muzayyanah, S.Pd memberi tanggapan terkait kemudahan akses informasi mengenai kebijakan Program Sekolah Penggerak,

Alhamdulillah saat ini sampai tahun ke tiga informasinya sudah sangat baik yang kami terima dari fasilitator kami, juga sangat membantu kami dalam membersamai dalam melaksanakan program sekolah penggerak selama sampai tiga tahun ini, dari media sosial juga kita bisa mengakses informasi sendiri dengan mudah mungkin hanya terhambat sinyal kalau lagi susah ya.¹¹⁰

Berdasarkan penjelasan terkait sumber daya informasi Program Sekolah Penggerak dapat diterima di SDN Bagorejo 03 melalui pendampingan dari fasilitator Sekolah Penggerak, lokakarya, komunitas belajar dan workshop. Selain itu informasi yang diperoleh dapat melalui media sosial seperti Youtube, Website, group WhatsApp.

c. Wewenang

Kewenangan dalam hal ini dipahami sebagai suatu kekuasaan yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd bahwa kewenangan yang diberikan sebagai kepala sekolah di Sekolah Penggerak adalah sebagai berikut,

Karena dalam menjalankan program ini kita bersama-sama jadi saya sebagai kepala sekolah tidak bisa berjalan sendiri, maka dari itu kami melangkah bersama untuk melaksanakan program sekolah penggerak, wewenangnya mungkin saya sebagai kepala sekolah bisa mengembangkan kemampuan diri saya dan juga guru-guru di sini, melakukan pendampingan dan

¹¹⁰Holifah Muzayyanah, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

memfasilitasi kalau ada kegiatan pelatihan-pelatihan atau melalui kegiatan *in house training* begitu kegiatan kumpul¹¹¹

Adapun wewenang yang diberikan guru dalam menjalankan Program Sekolah Penggerak disampaikan oleh Bu Holifah muzayyanah, S.Pd berikut ini,

Kewenangan yang kami peroleh di SDN Bagorejo 03 ini, kami memperoleh kewenangan untuk melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri dari tahun pertama 2022, karena terekrut menjadi sekolah penggerak jadi kami diberi kewenangan untuk melaksanakan kumer secara mandiri. Jadi kita mengajar di sesuaikan dengan kebutuhan para murid.¹¹²

Berdasarkan hal tersebut dipahami bahwa kepala sekolah diberikan kewenangan untuk meningkatkan kompetensi dirinya dan para guru, melakukan pendampingan serta mengembangkan komunitas pembelajaran dalam mendukung Program Sekolah Penggerak. Kewenangan yang diberikan kepada guru ialah melaksanakan kurikulum merdeka dalam pembelajaran di sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan murid.

d. Dana

Dalam pelaksanaan kebijakan dana merupakan unsur penting untuk mendukung berjalannya suatu program. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun 2022 menjelaskan bahwa BOS kinerja adalah program

¹¹¹Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

¹¹²Holifah Muzayyanah, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

Pemerintah Pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian. Sekolah yang menerima Dana BOS Kinerja salah satunya yakni Sekolah Penggerak.

SDN Bagorejo 03 mendapatkan bantuan dana dari BOS Kinerja dan BOS Reguler dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sebagaimana yang disampaikan Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd, “kita mendapatkan bantuan dana untuk program ini berupa dana BOS, ada dana BOS reguler dan BOS kinerja, pada tahun pertama sekolah mendapatkan 80 juta, tahun kedua sekitar 40 juta-an dan dana ditahun ketiga 20 juta-an”¹¹³

Selain itu seperti yang dijelaskan Bapak wawan Sisyanto, S.Pd bahwa sekolah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah berupa Chromebook, LCD, dan pertemuan terkait dengan Program Sekolah Penggerak, “Disamping itu melalui pemerintah daerah, sekolah dibantu berupa fasilitas chromebook, kita mendapatkan 21 chromebook dan LCD proyektor mendapatkan 7 di kelas-kelas, jadi itu fasilitas yang mendukung untuk menjalankan program”¹¹⁴

Seperti halnya pendapat Bu Anis mawati, S.Pd terkait bantuan anggaran Program Sekolah Penggerak berikut ini,

Kalau sekolah penggerak itu ada yang namanya BOSKIN. boskin itu Bos Kinerja. Jadi selain mendapatkan BOS reguler yang dari pemerintah sekolah mendapatkan BOSKIN yang

¹¹³ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

¹¹⁴ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

memang khusus diberikan kepada sekolah penggerak untuk dapat melaksanakan program-programnya.¹¹⁵

Lebih lanjut tidak jauh berbeda yang dijelaskan Bu Holifah muzayyanah, S.Pd terkait bantuan anggaran Program Sekolah Penggerak berikut ini,

Kami yang terekrut dalam sekolah penggerak, selain dari BOS reguler kami mendapatkan BOS kinerja. Itu yang digunakan kami untuk apa-apa yang terprogram dalam kegiatan Sekolah Penggerak, jadi ada dananya sendiri yaitu BOS kinerja selama kami melaksanakan program sekolah penggerak. Jadi yang terekrut mendapatkan BOS kinerja, kalau yang tidak kan hanya mendapat BOS reguler. Dalam penggunaanya ya terpisah, di pisahkan antara BOS reguler dan BOS kinerja itu¹¹⁶

Bantuan dana yang diberikan tersebut telah mencukupi sekolah dalam menjalankan Program Sekolah Penggerak. Penjelasan Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd berikut ini,

Alhamdulillah untuk memanfaatkan dana cukup dan bisa direalisasi dalam menjalankan program salah satunya untuk membeli buku-buku setiap siswa, meskipun pada tahun pertama kita itu kurang teliti ya dalam mempergunakan uangnya. Jadi tiap semester itu kan kita ada panen karya P5, nah kita terlalu banyak pengeluaran disitu kita buat acara besar tapi ternyata kurang. Dari situ kita belajar lagi mengatur anggarannya di tahun kedua.¹¹⁷

Hal yang sama diungkapkan Bu Anis mawati, S.Pd mengenai kecukupan dana yang diberikan, “Alhamdulillah sampai tahun ke tiga, dananya cukup meskipun terkadang ada kurangnya tapi tidak sampai yang kurang banget”¹¹⁸

¹¹⁵ Anis Mawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

¹¹⁶ Holifah Muzayyanah, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

¹¹⁷ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

¹¹⁸ Anis Mawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sekolah mendapatkan bantuan dana yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOSKIN) dan bantuan dari pemerintah daerah berupa *Chromebook* dan LCD proyektor guna menunjang digitalisasi sekolah. Adapun kendala yang dialami ialah alokasi dana pada tahun pertama, namun bisa diatasi pada tahun berikutnya.

e. Fasilitas

Selain dari dana, fasilitas juga mempengaruhi berjalannya suatu program. Fasilitas yang dibutuhkan baik langsung maupun tidak langsung yang menunjang dalam pelaksanaan kebijakan. Berikut ini tanggapan Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd terkait fasilitas yang ada disekolah dalam mendukung jalannya program,

Seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam menjalankan program ini kita kan dibantu berupa fasilitas *chromebook*, kita mendapatkan bantuan 21 *chromebook* dan LCD Proyektor mendapatkan 7 dimasing-masing kelas. Kalau sejauh ini fasilitas itu bisa dibilang cukup, tetapi kalau melihat jumlah siswa dikelas yang paling banyak itu masih kurang untuk *chromebook*-nya ketika ada mata pelajaran TIK, kita masih kekurangan *chromebook*, jadi masih meminjam punya guru . masih perlu peningkatan kedepannya. Selain dari itu fasilitas di SDN Bagorejo 03 tidak jauh berbeda dari sekolah-sekolah lain, fasilitas pendukung ada wifi juga, jadi dengan adanya wifi ini sangat membantu prosesnya walau kadang-kadang wifi ini juga ada kendalanya seperti lemot, atau jaringannya tidak stabil, mati lampu.¹¹⁹

Pendapat yang sama juga disampaikan Bu Holifah muzayyanah, S.Pd bahwa fasilitas yang ada di sekolah sudah mendukung jalannya program,

¹¹⁹ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

Alhamdulillah di SDN Bagorejo 03 untuk fasilitas sudah mendukung. Karena di sekolah kami setiap kelas sudah disiapkan media pembelajarannya, sudah disiapkan audio visual dan proyektor yang memungkinkan anak-anak belajar banyak kegiatan-kegiatan yang menarik, jadi setiap hari bapak/ibu bisa mengembangkan kreatifitasnya untuk meningkatkan pembelajaran secara maksimal dengan memanfaatkan media pembelajaran yang ada disekolah.¹²⁰

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Bu Anis Mawati, S.Pd terkait fasilitas yang ada disekolah,

Untuk fasilitas sama, maksudnya tidak jauh berbeda ya dengan sekolah lainnya. Kelasnya, bangku, kursi semua cukup. Mungkin sedikit yang berbeda kalau Program Sekolah Penggerak itu mendapat bantuan fasilitas seperti LCD proyektor dan beberapa chromebook, jadi alhamdulillah fasilitas yang ada di SDN Bagorejo 03 ini mendukung untuk jalannya program.¹²¹

Berdasarkan observasi peneliti bahwa fasilitas di SDN Bagorejo 03 dalam mendukung digitalisasi sekolah terlihat dengan adanya fasilitas IT dan LCD proyektor di setiap kelas untuk mempermudah para guru dalam menciptakan kreativitas pembelajaran.¹²²

Pendapat tersebut diperkuat melalui dokumentais di bawah ini

¹²⁰ Holifah Muzayyanah, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

¹²¹ Anis Mawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

¹²² Observasi di SDN Bagorejo 03, Jember, 8 Januari 2025



Gambar 4. 9 Fasilitas Setiap Kelas di SDN Bagorejo 03 ¹²³

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa dalam mendukung digitalisasi, sekolah mendapatkan bantuan berupa Chromebook dan LCD dari pemerintah daerah, selain itu juga wifi termasuk dalam pendukung. Adapun hambatan terletak pada kurangnya fasilitas chromebook.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember telah memadai dalam mendukung program. Mulai

¹²³ SDN Bagorejo 03 Gumukmas, “fasilitas setiap kelas”, 8 Januari 2025

dari sumber daya manusia, informasi, wewenang, dana/anggaran hingga fasilitas.

Sumber daya manusia di SDN Bagorejo 03 mulai dari kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, komite orang tua dan fasilitator sebagai sumber daya manusia lain yang berperan dalam Program Sekolah Penggerak. Dimensi informasi, SDN Bagorejo 03 mendapat informasi terkait Program Sekolah Penggerak melalui fasilitator, workshop, lokakarya, kombel dan IHT, selain itu juga melalui media sosial seperti youtube, website dan group whatsapp. Dimensi wewenang, di SDN Bagorejo 03 kepala sekolah diberikan kewenangan untuk meningkatkan kompetensi dirinya dan para guru, melakukan pendampingan serta mengembangkan komunitas pembelajaran dalam mendukung Program Sekolah Penggerak. Kewenangan yang diberikan kepada guru ialah melaksanakan kurikulum merdeka dalam pembelajaran di sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan murid.

Selanjutnya dimensi dana, SDN Bagorejo 03 mendapatkan bantuan dana dari BOS Kinerja dan bantuan dari pemerintah berupa Chromebook dan LCD. Dan yang terakhir dimensi fasilitas, fasilitas di SDN Bagorejo telah memadai dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak, sekolah mendapatkan bantuan fasilitas berupa Chromebook dan LCD Proyektor setiap kelas guna mendukung digitalisasi sekolah.

3. Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember

Sikap pelaksana kebijakan juga menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Kebijakan akan berjalan efektif apabila pelaksana kebijakan memahami dengan baik tugas yang akan dijalankan. Berikut ini yang disampaikan Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd terkait pemahaman pelaksanaan kebijakan Program Sekolah Penggerak,

Sekolah Penggerak ini kan bentuk dari peningkatan kualitas pendidikan ya, dengan program ini kita mengubah proses pembelajaran menjadi lebih baik. Saya berusaha paham dalam menjalankan program sekolah penggerak ini tentu dibantu dengan fasilitator. Dari fasilitator sekolah penggerak saya mendapatkan tugas ini-ini juga sudah saya lakukan dan juga sebagai bentuk laporan dari kegiatan-kegiatan yang dijalankan melalui laman sekolah penggerak.¹²⁴

Begitupun dengan pendapat Bu Holifah muzayyanah, S.Pd sebagai guru dalam hal pemahaman kebijakan Program Sekolah Penggerak yang dituturkan berikut ini,

Alhamdulillah dari banyaknya pelatihan, lokakarya dan sebagainya yang sudah terjadwal untuk program sekolah penggerak ini, kami bisa memahami apa-apa yang harus dilakukan dalam program sekolah penggerak, tentunya dengan berkolaborasi semua dengan guru dan kepala sekolah yang di lembaga, selain dari itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan program-program yang ada dalam program sekolah penggerak.¹²⁵

Sikap anggota sekolah dalam implementasi Program Sekolah Penggerak dapat dilihat dari komitmen mereka dalam proses

¹²⁴ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

¹²⁵ Holifah Muzayyanah, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

pembelajaran maupun pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagaimana yang dijelaskan Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd ,

Kita semua berperan aktif dalam implementasi program, memang kolaborasi dan komitmen itu yang utama. Dalam pembelajaran kita semua berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kerangka merdeka belajar, disesuaikan dengan kebutuhan siswanya juga. Selain dari itu juga sudah melaksanakan P5 dan untuk tema setiap kelas memang beda jadi nanti guru dan murid bisa memilih tema untuk pelaksanaan P5 di kelas masing-masing dan jadwalnya hari sabtu nanti setiap semester baru panen P5, Alhamdulillah dari murid-murid semangat dalam kegiatan jadi kita semua juga nggak kalah semangatnya.¹²⁶

Tanggapan Bu Anis mawati, S.Pd bahwa Sekolah Penggerak membawa dampak positif bagi sekolah melalui program-programnya sebagaimana yang dituturkan berikut ini,

Sekolah Penggerak ini bagus membawa banyak dampak positifnya, contohnya dari kepala sekolah, komite pembelajaran itu dapat pelatihan dari sana kemudian disalurkan kepada anggota sekolah yang namanya komunitas belajar dari situ kita bisa belajar menambah wawasan. Dan juga program ini diberi bantuan yang namanya BOSkin. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga pasti ada hambatan atau kendala ya di awal karena kan ini program baru, contohnya namanya program baru kita masih harus banyak belajar, di awal-awal kita harus banyak mengikuti pelatihan-pelatihan ini-itu, tambah tugas dan tanggung jawab juga. Tetapi semakin kesini kita sudah lah namanya butuh adaptasi ya.¹²⁷

Dengan adanya kebijakan Program Sekolah Penggerak diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi sekolah sebagaimana yang dituturkan Bu Holifah muzayyanah, S.Pd , “Harapan saya untuk Program Sekolah Penggerak ini memberikan dampak positif tentunya buat sekolah, buat murid-murid, buat kami juga sebagai tenaga pendidik disini.

¹²⁶ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

¹²⁷ Anis Mawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

Harapannya dapat memberikan semangat baru dan pengetahuan baru untuk semuanya.”¹²⁸

Hal serupa juga disampaikan Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd bahwa Program Sekolah Penggerak membawa peningkatan terkait penerimaan siswa baru,

Harapan saya untuk Sekolah Penggerak di tahun ini penerimaan siswa baru terus meningkat. Karena kita sudah melaksanakan dan merasakan hasilnya, siswa bahkan wali murid juga sudah merasakan dampak positif programnya. Sebelum menjadi Sekolah Penggerak ini siswa baru tidak sampai 20 an siswa, dan Alhamdulillah setelah menjadi Sekolah Penggerak ini banyak diminati dan juga harapannya dengan adanya transformasi pendidikan seperti Sekolah Penggerak kedepannya kualitas pendidikan terus meningkat menjadi lebih baik¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam disimpulkan bahwa adanya pemahaman pelaksanaan kebijakan Program Sekolah Penggerak dari kepala sekolah maupun guru serta sikap komitmen semua anggota sekolah yang dilihat dari proses pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kendala yang dihadapi yakni banyaknya pelatihan yang harus dijalani dan menambah tugas dan tanggung jawab, namun hal tersebut hanya memerlukan adaptasi dan berjalan lancar ditahun berikutnya.

4. Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember

Terdapat dua ciri dalam memaksimalkan struktur birokrasi yakni Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas

¹²⁸ Holifah Muzayyanah, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

¹²⁹ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Adanya SOP dalam administrasi kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana program dalam menangani tugas rutin. Di satuan pendidikan SOP berasal langsung dari pusat dan dalam pengimplementasiannya sudah berjalan dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang dituturkan Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd .

Untuk SOP nya sekolah menerima dari pusat, jadi tiap ada pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan Sekolah Penggerak itu ada panduan-panduan yang harus dijalani yang disampaikan oleh fasilitator, kami harus begini-begini ya kami jalani sesuai ketentuan misalnya ada kan pelatihan bagi kepala sekolah ya itu saya jalani sesuai panduan yang ada, kalau lokakarya juga pasti ada juknisnya. Ya itu semua dari pusat kami tinggal menjalani sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi mungkin dalam pelaksanaan di sekolah kami juga diberikan kebebasan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah, misal pada kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila itu diberi kebebasan memilih tema.¹³⁰

Sama halnya yang disampaikan Bu Holifah Muzayyanah, S.Pd bahwa sekolah menjalankan Program Sekolah Penggerak sesuai dengan SOP yang telah disusun,

Yang pastinya sudah ada SOP-nya untuk program sekolah penggerak, jadi kami sudah melaksanakan program sekolah penggerak ini sesuai dengan SOP yang sudah disusun. Panduan-panduannya kami terima dari pusat lalu kita dapat informasinya dari kepala sekolah. Kalau ada pendampingan dan pelatihan begitu-begitu pasti ada panduannya, jadi kita tinggal melaksanakan¹³¹

Dalam pengimplementasian SDN Bagorejo 03 merasa tidak mengalami kesulitan dengan SOP yang berlaku sebagaimana yang

¹³⁰ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

¹³¹ Holifah Muzayyanah, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Januari 2025

disampaikan Bu Anis mawati, S.Pd , “kesulitan dengan SOP selama saya menjalani disini, saya rasa tidak ada kesulitan yang besar. Mungkin kesulitannya hanya pada hanya pada dana. Kita ngepas-pas in dana yang ada, kalau untuk pendukung itu dari kolaborasi semua guru dan pengawas sama BOSKin.”¹³²

Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Bu Holifah muzayyanah, S.Pd , “Sampai saat ini tidak ada, karena semua terprogram dan berjalan dengan baik walaupun mungkin belum sempurna, masih perlu peningkatan. Tapi kalau dibidang kesulitan atau penghambat tidak ada.”¹³³

Salah satu panduan implementasi Program Sekolah Penggerak dapat dilihat dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Terdapat beberapa tema yang ditetapkan Kemendikbudristek diantaranya: empat pilihan tema untuk jenjang PAUD, enam tema pilihan untuk jenjang SD, tujuh untuk jenjang SMP, delapan untuk SMK/SMA dan sederajat. Beberapa tema tersebut dijelaskan dalam Panduan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila edisi revisi di susun oleh Rizky,dkk (2024). Tema Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada jenjang SD dan sederajat:

- 1) Gaya hidup berkelanjutan
- 2) Kearifan lokal

¹³² Anis Mawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Januari 2025

¹³³ Holifah Muzayyanah, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Januari 2025

- 3) Bhinneka Tunggal Ika
- 4) Bangunlah jiwa dan raganya
- 5) Suara demokrasi
- 6) Kewirausahaan
- 7) Rekayasa dan teknologi
- 8) Kebekerjaan

Dalam 1 tahun ajaran pada jenjang SD dan sederajat mengikuti Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan 2 s.d 3 proyek profil dengan tema berbeda. Contoh pemetaan tema P5 di SDN Bagorejo 03 dalam satu tahun ajaran:

- 1) Kelas 1 semester 1: Gaya hidup berkelanjutan

Kelas 1 semester 2: kearifan lokal

- 2) Kelas 2 semester 1: Kewirausahaan

Kelas 2 semester 2: Gaya hidup berkelanjutan

- 3) Kelas 3 semester 1: Gaya hidup berkelanjutan

Kelas 3 semester 2: Bhinneka tunggal ika

- 4) Kelas 4 semester 1: Kewirausahaan

Kelas 4 semester 2: Kearifan lokal

- 5) Kelas 5 semester 1: Bhinneka tunggal ika

Kelas 5 semester 2: Gaya hidup berkelanjutan

- 6) Kelas 6 semester 1: Bhinneka tunggal ika

Kelas 6 semester 2: Gaya hidup berkelanjutan

Berdasarkan hasil observasi bahwa SDN Bagorejo 03 telah melaksanakan kegiatan P5 dengan memilih 2 tema selama 1 tahun ajaran yang dijelaskan pada tabel berikut ini¹³⁴:

Tabel 4.5 Pelaksanaan Kegiatan P5 di SDN Bagorejo 03 tahun ajaran 2024/2025

No.	Kelas	Tema	Kegiatan
1.	I	Gaya hidup berkelanjutan	“Tamanku Dari Sampah”
2.	II	Kewirausahaan	“ Ide Seru Mengolah Buah dan Sayur”
3.	III	Gaya hidup berkelanjutan	“Memanfaatkan sedotan Plastik dari Sisa Minuman Es di Sekolah”
4.	IV	Kewirausahaan	“Asyiknya Menanam Jamu Toga”
5.	V	Bhinneka tunggal ika	“Karya Bhinneka Untuk Indonesia”
6.	VI	Bhinneka Tunggal Ika	“Membuat Buket Keberagaman Budaya Indonesia”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹³⁴Observasi di SDN Bagorejo 03, Jember, 22 Januari 2025



Gambar 4.10 Panen Karya P5 di SDN Bagorejo 03

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut dapat dipahami bahwa SDN Bagorejo 03 telah melaksanakan kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan menjalankan dua dari enam pilihan tema selama 1 tahun ajaran.

b. Pembagian Tugas

Adanya pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap unit agar para pelaksana dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan bidangnya. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Wawan Sisyanto, S.Pd berikut ini,

Untuk pembagian tugas disini semua sudah mendapat tugasnya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Ada komite pembelajaran, guru, tenaga kependidikan sampai dengan murid sudah ada tugasnya. Contohnya pada kegiatan P5 disini guru kelas mendapatkan bantuan apa ya namanya nanti kalau ingat lagi, pokoknya guru kelas ada yang bantu.¹³⁵

Sama dengan tanggapan Bu Holifah muzayyanah, S.Pd bahwa dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak semua anggota sekolah terlibat, “Kalau sekolah penggerak ini semua terlibat, mulai dari kepala sekolah, guru, komite, pengawas terlibat dalam kegiatan program sekolah penggerak. Jadi kami semua berkolaborasi dalam menjalankan.”¹³⁶

Sejalan dengan pendapat diatas Bu Anis mawati, S.Pd juga mengatakan bahwa semua terlibat dalam Program Sekolah Penggerak, “Tentunya semua guru, kepala sekolah kemudian murid juga wali murid. termasuk juga komite sekolah dan juga kita selalu melaporkan perkembangan kita kepada fasilitator sekolah penggerak.”¹³⁷

¹³⁵ Wawan Sisyanto, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Januari 2025

¹³⁶ Holifah Muzayyanah, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

¹³⁷ Anis Mawati, diwawancara oleh penulis, Jember, 8 Januari 2025

Tabel 4. 6 Susunan Komite Pembelajaran di SDN Bagorejo 03

No.	Nama/NIP	Jabatan	Penugasan
1.	Heni Tri Rahmawati, S.Pd NIP.197005202000112001	Pengawas	Pembina
2.	Wawan Sisyanto, S.Pd NIP.196705131991111001	Kepala sekolah	Penanggung jawab
3.	Holifah Muzayyanah, S.Pd NIP.198406152014122002	Guru	Koordinator
4.	Ana Veronika Puji.A, S.Pd.SD NIP.19001282014122004	Guru	Anggota
5.	Didik Setyo Cahyono, S.Pd NIP.1978044122014121001	Guru	Anggota
6.	Anis Mawati, S.Pd NIP. 19811032023212017	Guru	Anggota
7.	Sufinal Budi. S, S.Pd NIP. 197511162021211002	Guru	Anggota
8.	Didin Selvi Yudha. S.Pd	Guru	Anggota
9.	Rizqi Maulida Rahayu,S.Pd	Guru	Anggota
10.	Wahyu Nadya Alfiasari, S.Pd	Guru	Anggota
11.	Eka Kusuma Hadi Bagus. H, S.Pd	Guru	Anggota

Tabel 4. 7 Tim Pelaksanaan P5 di SDN Bagorejo 03

Penanggung jawab	Wawan Sisyanto, S.Pd
Manajer	Sufinal Budi Santoso, S.Pd
Konsultan	Rizqi Maulida Rahayu, S.Pd
Pelaksana	1. Holifah Muzayyanah, S.Pd (guru kelas 1) 2. Didin Selvi Yudha. S.Pd (guru kelas 2) 3. Anis Mawati, S.Pd (guru kelas 3) 4. Eka Kusuma Hadi Bagus. H, S.Pd (guru kelas 4) 5. Ana Veronika Puji.A (guru kelas 5) 6. Didik Setyo Cahyono, S.Pd (guru kelas 6)
Pembantu umum	Wahyu Nadya Alfiasari, S.Pd

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas yang dibebankan yang disampaikan Bu Holifah muzayyanah, S.Pd sebagai berikut,

Kalau pendukung seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami dalam menjalankan Program Sekolah Penggerak di sekolah ini lagi-lagi yaitu dari kekompakan warga sekolah, meskipun saya sebagai guru kelas juga komite pembelajaran saya tidak mengalami kesulitan yang besar semua bisa diatasi. Untuk penghambat menurut saya tidak yang terlalu gimana-gimana mungkin pada awal program saya butuh waktu banyak untuk belajar dalam memberikan pembelajaran dengan kurikulum baru, berusaha dalam menciptakan ide-ide kreatif kepada murid-murid.¹³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi dapat diketahui bahwa struktur birokrasi sudah terlaksanakan dengan adanya SOP dan pembagian tugas. Dalam menjalankan Program Sekolah Penggerak, sekolah diberikan panduan-panduan terutama pada kegiatan P5. Sekolah tidak mengalami kesulitan dengan SOP dari pusat hanya kesulitan dengan mengatur dana yang diberikan. Adapun pembagian tugas semua pihak terlibat dalam program, mulai dari kepala sekolah, pengawas, komite pembelajaran, guru, murid, komite orang tua sudah menjalankan sesuai dengan bidangnya. Tidak banyak kendala yang dirasakan, namun pada masa awal program kesulitan yang dirasakan guru yakni harus banyak belajar dan berinovasi dalam memberikan pembelajaran pada siswa dengan kurikulum baru.

¹³⁸ Holifah Muzayyanah, diwawancara oleh penulis, Jember, 15 Januari 2025

Tabel 4. 8 Hasil Temuan

No.	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1.	Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember	Komunikasi disini berkenaan dengan penyampaian, kejelasan, dan konsistensi a. Penyampaian kebijakan Program Sekolah Penggerak disosialisasikan oleh Kemendikbud tahun 2021 pada peluncuran Merdeka Belajar Episode 7 Program Sekolah Penggerak melalui kanal <i>Youtube</i> Kemdikdasmen, yang menjelaskan tentang Program Sekolah Penggerak, ruang lingkup, serta tujuan. Pada satuan pendidikan, sekolah mendapatkan sosialisasi Program Sekolah Penggerak melalui fasilitator dari BBGP secara luring maupun daring. Sekolah juga melaksanakan sosialisasi dengan sasaran anggota sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah, komite pembelajaran, guru, murid, wali murid dan sekolah lain sebagai pengimbasan praktik baik b. Kejelasan kebijakan Program Sekolah Penggerak diketahui melalui informasi terkait 5 intervensi Program Sekolah Penggerak antara lain: pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah c. Konsistensi pelaksanaan Program Sekolah Penggerak terlihat dari jadwal yang telah tersusun pada kegiatan pendampingan dan pelatihan seperti lokakarya, komunitas belajar, IHT, <i>workshop</i>, dll
2.	Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan	Sumber Daya dalam pengimplementasian PSP meliputi: sumber daya manusia,

No.	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
	Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagaorejo 03 Gumukmas Jember	informasi, wewenang, dana, fasilitas - SDM terdiri dari empat level PMO yakni PMO level pusat, level PAUD Dikdasmen, level daerah, dan level satuan pendidikan. PMO level satuan pendidikan meliputi kepala sekolah, pengawas, komite pembelajaran dan fasilitator PSP. guru, murid, komite orang tua sebagai sumber daya manusia lain yang mendukung pelaksanaan PSP - SDN Bagorejo 03 mendapatkan informasi terkait PSP melalui fasilitator, workshop, lokakarya, kombel dan IHT, selain itu juga melalui media sosial seperti youtube, website dan group whatsapp - kepala sekolah SDN Bagorejo 03 diberikan kewenangan untuk meningkatkan kompetensi dirinya dan para guru, melakukan pendampingan serta mengembangkan komunitas pembelajaran dalam mendukung Program Sekolah Penggerak. Kewenangan yang diberikan kepada guru ialah melaksanakan kurikulum merdeka dalam pembelajaran disekolah yang di sesuaikan dengan kebutuhan murid. - SDN Bagorejo 03 mendapatkan bantuan dana berupa BOS Kinerja - Fasilitas SDN Bagorejo 03 dalam mendukung PSP yakni Chromebook dan LCD Proyektor disetiap kelas guna menunjang digitalisasi sekolah
3.	Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri	Sikap anggota sekolah dalam pengimplementasian PSP terlihat dengan adanya pemahaman dan komitmen semua anggota sekolah dalam proses

No.	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
	Bagaorejo 03 Gumukmas Jember	pembelajaran dan pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sekolah Penggerak memberikan dampak positif bagi sekolah sehingga para pelaksana kebijakan memberikan respon yang baik pula dan berharap terus memberikan semangat baru bagi pelaksana kebijakan.
4.	Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagaorejo 03 Gumukmas Jember	PSP di SDN Bagaorejo 03 telah terlaksanakan dengan adanya SOP dan pembagian tugas. Prosedur dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak telah diatur dalam Keputusan Mendikbudristek No. 371/M/2021. Dan semua pihak telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku

C. Pembahasan Temuan

1. Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagaorejo 03 Gumukmas Jember

Komunikasi memiliki peran penting yang menjadi tolak ukur dalam kelancaran implementasi kebijakan.¹³⁹ Dalam penelitian ini komunikasi terjalin antara Kemendikbud sebagai pembuat kebijakan, fasilitator dari BBGP dan satuan pendidikan sebagai penerima kebijakan. Berikut ini merupakan pembahasan terkait komunikasi pada model implementasi kebijakan George Edward III:

a. Penyampaian

Edward menjelaskan yang menjadi persyaratan utama dalam implementasi kebijakan ialah mengetahui apa yang seharusnya akan dilakukan. Sebelum seseorang dapat menjalankan sebuah keputusan,

¹³⁹ Retno Sunu Astuti, "Modul Komunikasi Dan Advokasi Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I," *Lembaga Administrasi Negara*, 2021, 63.

mereka harus sadar bahwa keputusan tersebut telah dibuat dan diperintahkan untuk melaksanakan. Maka dari itu dibutuhkan penyampaian kebijakan secara tepat.¹⁴⁰

Program Sekolah Penggerak diluncurkan pada Kebijakan Merdeka Belajar Episode 7 Program Sekolah Penggerak yang disosialisasikan oleh mendikbud melalui siaran langsung pada kanal Youtube Kemdikbud pada tahun 2021. Mendikbud secara rinci menjelaskan Program Sekolah Penggerak, tujuan, serta ruang lingkupnya. Di kabupaten Jember sosialisasi Program Sekolah Penggerak juga dilakukan dengan sasaran sosialisasi yakni PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB yang dilakukan baik secara luring melalui rapat, lokakarya atau workshop, dan daring melalui Zoom, Google Meet, dan WhatsApp.

Di sekolah atau satuan pendidikan target sosialisasi Program Sekolah Penggerak yakni kepala sekolah, guru, murid, dan wali murid dan sekolah lain sebagai bentuk pengimbasan praktik baik. Sosialisasi yang disampaikan pada guru dilakukan dengan menyusun komite pembelajaran yang kemudian komite pembelajaran tersebut menyalurkan kepada guru yang lain. Sosialisasi yang disampaikan kepada murid dilakukan langsung di sekolah dan sosialisasi pada wali murid disampaikan pada awal ajaran baru baik melalui rapat, brosur, dan pada saat kegiatan seperti karnaval. Sosialisasi dengan sekolah lain

¹⁴⁰ Edward III, *Public Policy Implementing*.17

dilakukan SDN Bagorejo 03 kepada 10 sekolah yang berada di sekitar sebagai bentuk pengimbasan praktik.

b. Kejelasan

Arahan komunikasi dalam pelaksanaan bukan sekedar diterima tetapi harus jelas agar kebijakan dapat dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan.¹⁴¹ Seperti yang dijelaskan Naway, salah satu aspek agar komunikasi berjalan dengan efektif yaitu kejelasan, kejelasan yang dimaksud ialah dalam komunikasi sebaiknya dikemas dengan bahasa dan informasi yang mudah dimengerti dan diterima oleh komunikan.¹⁴²

Berdasarkan hasil penelitian informasi terkait Program Sekolah Penggerak telah dikomunikasikan dengan jelas, hal tersebut dapat dilihat dari kejelasan tujuan yang tertulis dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak. Kejelasan informasi kebijakan Program Sekolah Penggerak dapat dipahami dan dilaksanakan oleh sekolah melalui 5 intervensi Program Sekolah Penggerak yang dilaksanakan di sekolah yang terdiri dari pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah.

Informasi mengenai Program Sekolah Penggerak diperoleh dari fasilitator, selain itu website dan kanal Youtube Kemendikbudristek juga menyediakan informasi Program Sekolah Penggerak.

¹⁴¹ Edward III. *Public Policy Implementing*. 26

¹⁴² Fory Armin Naway, *Komunikasi Organisasi Pendidikan*, (Ideas Publishing: Gorontalo, 2017). Cetakan ke-2, hal.89

c. Konsistensi

Edward III menjelaskan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berjalan dengan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan maka perintah pelaksanaan harus dilaksanakan secara konsisten.¹⁴³ Konsisten berkenaan dengan informasi yang disampaikan harus dilakukan secara berulang-ulang dan konsistensi terhadap penyampaiannya agar pesan dapat dengan mudah di mengerti.¹⁴⁴ Dari hasil penelitian diketahui informasi yang disampaikan kepala sekolah, komite pembelajaran, dan guru penggerak memperoleh persamaan persepsi dalam pengimplementasian Program Sekolah Penggerak.

Bentuk konsistensi dalam pengimplementasian Program Sekolah Penggerak yakni dengan adanya jadwal rutin yang telah disusun berdasarkan mingguan, bulanan dan semesteran. Jadwal tersebut meliputi pelatihan atau *coaching*, lokakarya, IHT, kombel, workshop. Selain itu dapat dilihat pula dalam pembelajaran maupun pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang dilakukan satu minggu sekali dan panen karya setiap semester. Berdasarkan hal tersebut Program Sekolah Penggerak yang dijalankan di sekolah telah terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah tersusun.

Hasil temuan ini didukung penelitian oleh Yakob yang menekankan bahwa komunikasi memegang peran yang sangat penting

¹⁴³¹⁴³ Edward III, *Public Policy Implementing*. 40-41

¹⁴⁴ Jihan Afizha and Abdul Kholik, "Penerapan Komunikasi Efektif 7C Dalam Pelayanan Informasi Publik Oleh Kpknl Jakarta Ii," *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 3 (2021): 111–25.

karena mempunyai keterkaitan oleh berbagai faktor yang dapat meningkatkan faktor keberhasilan, komunikasi merupakan faktor pengaruh terhadap keberhasilan kebijakan.¹⁴⁵ Pada dimensi komunikasi terdapat faktor pendukung dan penghambat dialami SDN Bagorejo dalam pelaksanaannya, yakni faktor pendukung dalam komunikasi ialah semangat dan kekompakan anggota sekolah, sedangkan hambatan yang dialami dalam komunikasi yang diberikan oleh fasilitator yakni perubahan jadwal yang tidak tepat waktu, sehingga terdapat jadwal tidak bisa diikuti. Selain itu, hambatan yang dialami sekolah dalam memberikan komunikasi berupa pemberian pemahaman yang ekstra kepada wali murid.

2. Sumber Daya Dalam Implementasi Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember

Van Metter dan Van Horn mengungkapkan bahwa sumber daya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan, maka dari itu sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kebijakan tidak bisa di sepelekan.¹⁴⁶ Selain dari itu, penelitian yang dilakukan oleh Permana Dody juga menunjukkan bahwa sumber daya memiliki pengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Yakob Noho Nani, "Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo) *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 7, No.3 2021, DOI:10.32884/ideas.v7i3.463

¹⁴⁶ Kasmad, "Studi Implementasi Kebijakan Publik."

¹⁴⁷ Dody Sukma Artha Permana, "Pengaruh Sumber Daya Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar Di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2015): 1–15, <http://jurnafis.untan.ac.id>.

Berikut ini adalah pembahasan sumber daya berdasarkan model implementasi dari George Edward III, sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya informasi, wewenang, dana, dan fasilitas:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berperan dalam implementasi Program Sekolah Penggerak secara garis besar terdiri dari empat level PMO yakni PMO level pusat, level PAUD Dikdasmen, level daerah, dan level satuan pendidikan. PMO level satuan pendidikan terdiri dari kepala sekolah, komite pembelajaran, pengawas sekolah, fasilitator. Selain itu guru, murid, wali murid, dan lembaga lain sebagai sumber daya manusia lain yang juga berperan dalam pengimplementasian Program Sekolah Penggerak.

Berdasarkan hasil penelitian, SDM di SDN Bagorejo 03 Gumukmas Jember sudah berkompetensi dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak, hal tersebut di dukung dengan adanya pendampingan dan pelatihan yang diikuti bersama pelatih ahli atau fasilitator seperti mengikuti lokakarya, menjalankan IHT, dan *workshop* baik yang dilakukan di dalam maupun diluar sekolah.

b. Informasi

Informasi untuk melakukan kebijakan dapat di artikan sebagai segala keterangan yang berbentuk tulisan, pedoman, arahan atau petunjuk, dan cara untuk melaksanakan kebijakan. Informasi disini

berhubungan dengan tata cara pelaksanaan dan ketaatan pelaksana kebijakan kepada aturan yang berlaku.¹⁴⁸ Dari hasil penelitian SDN Bagorejo 03 mendapatkan kemudahan akses informasi terkait Program Sekolah Penggerak baik secara langsung melalui fasilitator, workshop, lokakarya, kombel dan IHT, selain itu juga melalui media sosial seperti Youtube, WhatsApp group, dan Website Kemendikbud yang juga menyediakan layanan informasi.

c. Wewenang

Wewenang merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.¹⁴⁹ Kewenangan yang diperlukan para implementor sangat beragam bergantung pada kebijakan yang harus dilakukan.¹⁵⁰ Dari hasil penelitian, kepala sekolah SDN Bagorejo 03 diberikan kewenangan untuk meningkatkan kompetensi dirinya dan para guru, melakukan pendampingan serta mengembangkan komunitas pembelajaran dalam mendukung Program Sekolah Penggerak. Kewenangan yang diberikan kepada guru ialah melaksanakan kurikulum merdeka dalam pembelajaran disekolah yang di sesuaikan dengan kebutuhan murid.

d. Dana/Anggaran

Dari hasil penelitian, ditemukan bantuan finansial dari pemerintah pusat untuk Program Sekolah Penggerak dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) yang dialokasikan

¹⁴⁸ Raviansyah et al., *Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*,
http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/70book_chapter_menejemen_evaluasi_kebijakan_2022.pdf.

¹⁴⁹ Raviansyah dkk. *Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 69

¹⁵⁰ Sahya Anggara "Kebijakan Publik," (CV Pustaka Setia: Bandung, 2018). 252

untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan 5 intervensi Program Sekolah Penggerak. Bantuan tersebut di dapat oleh sekolah hanya selama tiga tahun masa program.

e. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan hal yang penting bagi kelancaran implementasi kebijakan, fasilitas fisik juga bervariasi bergantung pada kebutuhan kebijakan.¹⁵¹ Fasilitas yang ada di SDN Bagorejo 03 dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak ini untuk mendukung digitalisasi sekolah yakni chromebook dan LCD proyektor di masing-masing kelas.

Semua aspek dalam dimensi sumber daya dapat dikatakan telah terpenuhi. Teori dari George Edward III mendukung penelitian ini yang menjelaskan jika pelaksana kebijakan memiliki sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan efektif.¹⁵² meskipun demikian terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, faktor pendukung dalam menjalankan Program Sekolah Penggerak yakni semangat dan kolaborasi dari para guru serta bantuan dari pihak terkait. Sedangkan penghambat terlatak pada guru-guru yang belum terbiasa dengan pendekatan baru dan penggunaan platform digital, juga wali murid yang masih belum paham akan program-program Sekolah Penggerak.

¹⁵¹ Sahya Anggara “Kebijakan Publik,” 253

¹⁵² Edward III, *Public Policy Implementing*. 53

3. Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember

Disposisi dapat dimaknai dengan sikap atau komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang dijalankan, karena setiap kebijakan memerlukan pelaksana-pelaksana yang bersikap baik terhadap suatu kebijakan dan mereka melaksanakan kebijakan sesuai yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.¹⁵³ Berdasarkan hasil penelitian, terlihat adanya pemahaman dari pelaksanaan kebijakan Program Sekolah Penggerak dari kepala sekolah maupun guru serta sikap komitmen semua anggota sekolah yang dilihat dari proses pembelajaran maupun pelaksanaan kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Adanya Program Sekolah Penggerak sekolah merasakan dampak positif dari program dan berharap terus memberikan semangat baru. Dengan demikian mereka sudah menjalankan kebijakan sesuai yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Hasil temuan ini sejalan dengan teori dari George Edward III mendukung penelitian ini dengan menjelaskan jika para pelaksana kebijakan cenderung mendukung kebijakan tertentu, mereka cenderung akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.¹⁵⁴

Adapun faktor pendukung dan penghambat yakni semangat dan komitmen anggota sekolah dalam pengimplementasian kebijakan,

¹⁵³ Awan, Y. Abdoellah & Yudi Rusfiana "TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.Pdf."(Alfabeta: Bandung, 2016), 69

¹⁵⁴ Edward III, *Public Policy Implementing*. 89

sedangkan faktor penghambat yakni banyaknya pelatihan yang harus dijalani dan menambah tugas dan tanggung jawab

4. Stuktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember

Birokrasi adalah salah satu badan yang sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi dalam pelaksanaannya terdapat dua karakteristik untuk mendorong kinerja struktur birokrasi yakni adanya Standar Operasional Prosedur dan Pembagian Tugas¹⁵⁵, yang akan dibahas berikut ini

a. Standar Operasional Prosedur

Prosedur pelaksanaan Program Sekolah Penggerak diatur dalam mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan panduan atau pedoman pembelajaran pada Program Sekolah Penggerak tercantum dalam Keputusan Mendikbudristek No. 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak. Dari hasil penelitian sekolah memperoleh pedoman pelaksanaan Program Sekolah Penggerak untuk membantu dalam pengimplementasian seperti kegiatan pelaksanaan P5 dan telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

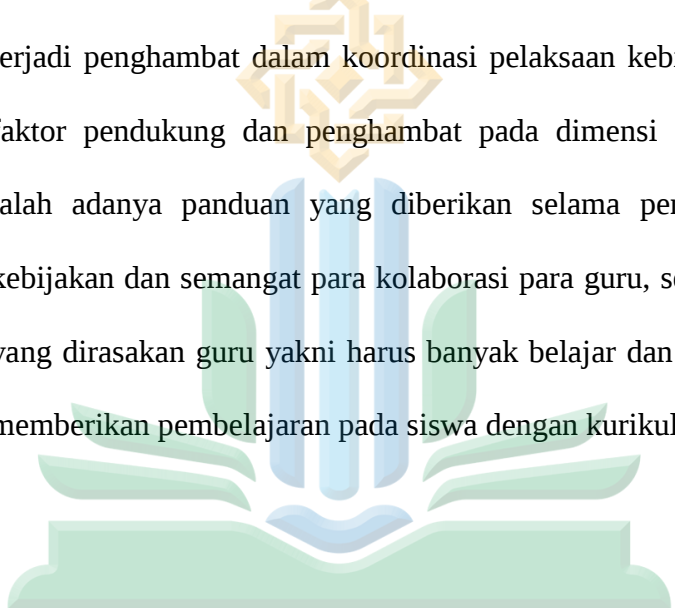
b. Pembagian Tugas

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pembagian tugas semua pihak terlibat dalam program, mulai dari kepala sekolah,

¹⁵⁵ Awan, Y. Abdoellah & Yudi Rusfiana , 70

pengawas, komite pembelajaran, guru, murid, komite orang tua sudah menjalankan sesuai dengan bidangnya.

Hasil dari penelitian ini selaras dengan teori George Edward III yang menjelaskan bahwa SOP memberikan keseragaman dalam tindakan di organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Selain itu, pembagian tugas juga penting dalam pelaksanaan kebijakan agar tidak terjadi penghambat dalam koordinasi pelaksanaan kebijakan.¹⁵⁶ Adapun faktor pendukung dan penghambat pada dimensi struktur birokrasi ialah adanya panduan yang diberikan selama pengimplementasian kebijakan dan semangat para kolaborasi para guru, sedangkan kendala yang dirasakan guru yakni harus banyak belajar dan berinovasi dalam memberikan pembelajaran pada siswa dengan kurikulum baru.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁵⁶ Edward III, *Public Policy Implementing*. 141

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember pada model implementasi kebijakan George Edward III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak di SDN Bagorejo 3 telah memenuhi aspek penyampaian, kejelasan dan konsistensi. Penyampaian mengenai Program Sekolah Penggerak dilaksanakan melalui sosialisasi yang dilakukan Kemendikbud, FSP, maupun sekolah. Kebijakan Program Sekolah Penggerak telah dikomunikasikan secara jelas dilihat dari kejelasan tujuan yang tertera dalam Keputusan Mendikbudristek no. 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak Komunikasi secara konsisten dilakukan melalui pendampingan dan pelatihan oleh FSP kepada sekolah.
2. Sumber daya manusia terkait Program Sekolah Penggerak pada tingkat sekolah terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah, komite pembelajaran, FSP. guru, murid, dan komite orang tua adalah sumber daya manusia lain yang mendukung jalannya program. SDM di SDN Bagorejo 03 telah berkompetensi dalam pelaksanaan kebijakan di dukung dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Informasi dalam pengimplementasian program diperoleh langsung dari fasilitator. Semua

anggota sekolah telah melaksanakan program sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. PSP mendapatkan bantuan dana berupa BOS Kinerja dan bantuan fasilitas dari pemerintah daerah berupa Chromebook dan LCD Proyektor di setiap kelas. kendala yang dirasakan pada dimensi ini seperti terdapat guru yang masih belum terbiasa dengan pendekatan baru dan dukungan wali murid belum maksimal. aspek fasilitas masih perlu peningkatan khususnya pada fasilitas IT seperti penambahan chromebook. Tetapi dalam pengimplementasian program hal ini telah memenuhi aspek sumber daya yang dibutuhkan.

3. Disposisi dalam implementasi Program Sekolah Penggerak dilihat dari sikap dan komitmen pelaksana kebijakan. Kepala sekolah, komite pembelajaran, guru dan murid telah memahami kebijakan program yang terlihat dari komitmen semua anggota sekolah dalam proses pembelajaran maupun dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.. Pada dimensi ini kendala yang dialami yaitu banyaknya pelatihan dan tugas serta tanggung jawab yang dibebankan. Namun dengan adanya semangat dan komitmen dari semua anggota sekolah, kendala yang dirasakan dapat diatasi pada tahun berikutnya.
4. Struktur birokrasi pada satuan pendidikan dalam implementasi Program Sekolah Penggerak telah berjalan sesuai dengan prosedur pelaksanaan. Semua ketentuan, panduan, dan hal-hal terkait Program Sekolah Penggerak berasal dari Kemendikbudristek.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian, tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh pihak. Agar dalam pengimplementasian Program Sekolah Penggerak di sekolah semakin lancar, izinkan penulis memberikan sedikit saran untuk SDN Bagorejo 03 Gumukmas Jember sebagai berikut:

1. Bagi kepala sekolah, diharapkan untuk selalu mendukung dalam proses pengimplementasian program dengan terus meningkatkan sumber daya khususnya sumber daya fasilitas teknologi untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program.
2. Bagi komite pembelajaran dan guru, diharapkan untuk selalu meningkatkan kompetensi diri agar dapat mengimplementasikan program-program secara maksimal
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai implementasi kebijakan di wilayah masing-masing dengan jangkauan yang lebih luas sehingga menjadi pengalaman dan penemuan yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusammad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021)
- Afizha, Jihan, and Abdul Kholik. "Penerapan Komunikasi Efektif 7C Dalam Pelayanan Informasi Publik Oleh Kpknl Jakarta Ii." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 3 (2021): 111–25.
- Aisam, Sulafah Fathin Khannanah, and Lita Juniati. "Implementasi Kebijakan Program Merdeka Belajar (Studi Pada Guru Penggerak Di SDN Pisang Candi 4 Kota Malang)." *Journal on Education* 05, no. 01 (2022): 1284–94.
- Amrozi, Shoni Rahmatullah. "Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia; Perspektif Sejarah Ibnu Kholdun". *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, no 1 (2020)
- Amrullah, Fitriana, and Shofyatun. "Implementasi Kurikulum Merdeka Program Sekolah Penggerak Di Lembaga Paud Kabupaten Luwuk" 07, no. 02 (2023): 449–60.
- Andi Cudai Nur, Muhammad Guntur. *Analisis Kebijakan Publik. Analisis Kebijakan Publik*, 2017. Analisis-Kebijakan-Publik.pdf.
- Anggara, Sahya "Kebijakan Publik," (CV Pustaka Setia: Bandung, 2018).
- Astuti, Retno Sunu. "Modul Komunikasi Dan Advokasi Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I." *Lembaga Administrasi Negara*, 2021, 63.
- Awan Y. Abdoellah and Yudi Rusfiana "Buku - Teori Dan Analisis Kebijakan Publik.Pdf," N.D.
- Bailah, "Tantangan Kepala Sekolah Penggerak Dalam mengimplementasikan Pembelajaran Paradigama Baru", *Jurnal Prajaiswara*, Vol. 2, No.2 (des 2021)
- Dian Herdiana. "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar." *Stiacimahi.Ac.Id* 14, no. November (2018): 13–25.
- Edward III, George C. *Public Policy Implementing. Literary and Linguistic Computing*, 1980.
- Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, Gustaf Undap. "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Di Kota Manado.” *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat* 1, no. 2 (2021): 1–11.

Farkhan, Aulia, Anisa Rahmah, Umar Alwatasi, and Farid Setiawan. “Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (2022): 1921. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>.

Fiantika, feni rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif.* Rake Sarasin, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

Hakim, Dhikrul , Jazilurrahman, Affandi, Muizzuddin, Anwar Khoirul, Mu'minin Amirul, Sholahuddin, Abidin Achmad Anwar, Ubaidillah, Ansori, Kusnan “khazanah Filsafat Pendidikan Barat Dan Islam.Pdf,” 2017.

Hamidah, D. “Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik.” *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 34–44.

Hardani, Andriani, Ustiawaty, Utami, Istiqomah, Fardani, Sukmana, Auliya. *Analisis Kebijakan Publik. Analisis Kebijakan Publik*, 2017.

Indah Pratiwi, lukman Solihin, Genardi Atamadiredja, and Bkti Utama. “Risalah Kebijakan Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan | 2020.” [Http://Puslitjadikbud.Go.Id/](http://Puslitjadikbud.Go.Id/), 2020, 39–40.

Islamiyah, Nur Mawaddah “Impelementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar (Studi Kasus di Sekoah Dasar di Kota Bima NTB)” (Skripsi. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2022)

Kasmad, Rulinawaty. “Studi Implementasi Kebijakan Publik.” (2017): 51–66.

Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam fakta realitas*, (UNG Press Gorontalo, 2015).

Kemdikbudristek. “Merdeka Belajar Episode Ketujuh: Program Sekolah Penggerak.” *Paparan Launching Program Sekolah Penggerak*, 2021, 1–18.

Kemendikbudristek, “Tentang Sekolah Penggerak” (2021), <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 7 juni 2024

Kemendikbudristek, <https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/#/home>, diakses pada 16 Juni 2024

Kemendikbudristek, “Program Sekolah Penggerak 2021,”

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan menengah No.0301/C/HK.00/2022 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak, bab I.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No 371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak, bab II.
- KSPTK, “26 Episode Merdeka Belajar Kemendikbudristek” (2024) <https://kspstendik.kemdikbud.go.id/berita/detail/26-episode-merdeka-belajar-kemendikbudristek> ,diakses pada 6 Juni 2024
- Kurniati, Ika Dyah, Riza Setiawan, Afiana Rohmani, Aisyah Lahdji, Arief Tajally, Kanti Ratnaningrum, Rochman Basuki, Sc Reviewer, and Zulfachmi Wahab. “Buku Ajar,” 2015.
- Lazwardi, Lisa, Suswati Hendriani, M. Haviz, Ridwal Trisoni, and Fadriati Fadriati. “Implementasi Program Sekolah Penggerak Di SMAN 1 Tilatang Kamang.” *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 12, no. 1 (2023): 319–38. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v12i1.1125>.
- Lestari, A, W S Putra, and A Alda. “Fungsi Kebijakan Pendidikan.” *Journal of ...*, 2023. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/107%0Ah> <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/download/107/88>.
- Lilis Sri Harningsih, Nurkolis, Sudana, ““Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Dalam Kerangka merdeka Belajar di SMP Negeri 1 Tlomulyo Temanggung” *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, Vol.4, No.2 DOI: 10.51874/jips.v4i2.171
- Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018) Abd.
- Miles,Matthew B., A.Michael Huberman and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. United Satates Of America: Sage Publications, 2014.
- Muhith, Abd. et al. *Metodologi Penelitian*, cetakan pertama (Yogyakarta: BILDUNG, 2020) 26.

- Nani, Yakob Noho “Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo) *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 7, No.3 2021, DOI:10.32884/ideas.v7i3.463
- Naway, Fory Armin *Komunikasi Organisasi Pendidikan*, cet. ke-2 (Ideas Publishing: Gorontalo, 2017).
- Nurachma, Dinta and Arenawati “Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Kebijakan Merdeka Belajar Di Kabupaten Pandeglang.” *Ilmiah Niagara* 16, no. 1 (2024).
- Pasaribu, Tioria, Achmad Fauzi, Zira Fatmaira, Stmik Kaputama, Jl Veteran No, Kec Binjai Kota, Kota Binjai, and Sumatera Utara. “Analisis Penerapan Program Sekolah Penggerak Terhadap Prestasi Belajar Siswa Tingkat Sekolah Dasar (SD) Se-Kotamadya Binjai.” *Journal on Education* 6, no. 2 (2024): 11951–63. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/5005>.
- Patilima, Sarlin. “Peran Kepala Sekolah Dalam Memberikan Motivator.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar* 0, no. 0 (2022): 228–36. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PSNPD/article/view/1069>.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Ilmiah UIN KHAS JEMBER 2024*.
- Permana, Dody Sukma Artha. “Pengaruh Sumber Daya Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar Di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2015): 1–15. <http://jurnafis.untan.ac.id>.
- Putridiyanti, Fita. “Merdeka Belajar Dalam Pendidikan Indonesia.” *Merdeka Belajar Dalam Pendidikan Indonesia* 3, no. 2 (2022): 1–13. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/jumpa>.
- Rahmah, Lathifah Aulia, and Suci Megawati. “Implementasi Program Sekolah Penggerak Di SD Insan Mulya Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.” *Implementasi Program Sekolah Penggerak* 12, no. 1 (2024): 147–59.
- Raviansyah dkk. *Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*, 2022. http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/70book_chapter_menejemen_evaluasi_kebijakan_2022.pdf.
- Ritonga, Asnil Aidah, Yudha Wijaya Lubis, Siti Masitha, and Chichi Paramita Harahap. “Program Sekolah Penggerak Sebagai Inovasi Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di SD Negeri 104267 Pegajahan.” *Jurnal Pendidikan* 31, no. 2 (2022): 195. <https://doi.org/10.32585/jp.v31i2.2637>.
- Rozak, “Kebijakan Pendidikan Di Indonesia” *Journal Of Islamic Educatioan* Vol.2, No.3, 2021

- Rusandi, and Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.
- Sahir, Syafrida Hafni *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022)
- Saidi, Muhammad, Wiyono Bagus Djulig, Ulva Roifatul Lailin, and Muzairi "C. Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012." *Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2021): 41. <https://doi.org/10.54980/imkp.v4i2.142>.
- Santoso, Bibit. "Menata Kebijakan Publik Yang Tepat Agar Tidak Terjadi Gejolak Di Masyarakat Bila Diundangkan." *Jurnal Pemerintahan* 13, no. 1 (2018): 36–53. <https://doi.org/10.55745/jpstipan.v13i1.91>.
- Shodiq, Ahmad Ja'far. "Implementasi Program Sekolah Penggerak Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Di UPT SMPN 3 Gresik," 2023.
- Suaib, Muhamad Ridha. "Pengantar Kebijakan Publik," 2016.
- Subianto, Agus "Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi" (Surabaya: Brilliant, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Syafi'i, Fahrian Firdaus. "Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar "Merdeka Belajar Dalam Menyambut Era Masyarakat 5.0,"* no. November (2021): 46–47.
- Tachjan. "Implementasi Kebijakan Publik", cetakan 1 (Bandung: AIPI-Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006)
- Tantawi, Muhammad Fahrurroji "Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Implementasi Sekolah Penggerak Di SMPN 18 Banda Aceh" (skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023)
- Tawa, Angelika Bule. "Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar." *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 4, no. 2 (2019): 107–17. <https://doi.org/10.53544/sapa.v4i2.82>.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wardhana, Aditya. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data," December 2023.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cahya Putri Anggraeni
 NIM : 211101030023
 Program Studi : Manajemen Pendidikan islam
 Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian yang berjudul

"Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember" tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember, 14 April 2025
 Saya yang menyatakan



Cahya Putri Anggraeni
 Nim. 211101030023

LAMPIRAN

Lampiran 1

MATRIKS PENELITIAN

NO	JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
1.	Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember	Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi - Penyampaian - Kejelasan informasi - Konsistensi 2. Sumber daya - Sumber Daya manusia - Informasi - Kewenangan - Fasilitas 3. Disposisi - Dampak disposisi - Staff - Insentif	1. Pendekatan penelitian: kualitatif yang bersifat deskriptif 2. Lokasi penelitian : SDN Bagorejo 03 Gumukmas Jember 3. Subjek penelitian: kepala sekolah SDN 03 Bagorejo Gumukmas, guru dan staf 4. Teknik pengumpulan data : - wawancara - observasi - dokumentasi 5. keabsahan data: - Triangulasi sumber - Triangulasi teknik	Fokus penelitian menggunakan model implementasi kebijakan dari George Edward III: - Bagaimana Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember? - Bagaimana Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas

NO	JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
			4. Struktur birokrasi a. Prosedur operasional standar b. Pembagian tanggung jawab		Jember? 3. Bagaimana Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember?
		Program Sekolah Penggerak	1. Pendampingan konsultatif dan asimetris 2. Penguatan SDM sekolah 3. Pembelajaran dg paradigma baru 4. Perencanaan berbasis data 5. Digitalisasi sekolah		4. Bagaimana Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember?

Lampiran 2

LAMPIRAN PEDOMAN

A. Pedoman Observasi

No	Instrumen Observasi
1.	2.
1.	Observasi tentang komunikasi yang terjalin dalam implementasi kebijakan program sekolah penggerak
2.	Observasi tentang sumber daya yang ada di sekolah dalam implementasi kebijakan program sekolah penggerak
3.	Observasi tentang disposisi dalam implementasi kebijakan program sekolah penggerak
4.	Observasi tentang struktur birokrasi dalam implementasi program sekolah penggerak

B. Pedoman Dokumentasi

No	Instrumen dokumentasi
1.	2.
1.	Dokumen profil sekolah
2.	Dokumen pendidik dan tenaga kependidikan
3.	Dokumen kurikulum UPTD Satuan Pendidikan SDN Bagorejo 03
4.	Dokumen pelaksanaan kegiatan P5
5.	Dokumen sertifikat PMM
6.	Dokumen berupa foto-foto kegiatan lokakarya, IHT, Kombel, P5, Workshop, Fasilitas, panen karya P5

C. Pedoman Wawancara

Kepala sekolah SDN 03 Bagorejo Gumukmas

No.	Fokus Penelitian	Dimensi	Pertanyaan
1.	2.	3.	4.
1.	Bagaimana Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember?	1. Penyampaian 2. Kejelasan 3. konsistensi	1.) lembaga apa saja yang memberikan sosialisasi program sekolah penggerak ? Bagaimana penyampaian sosialisasi yang diberikan oleh lembaga terkait yang berkaitan dengan Program Sekolah Penggerak? Apakah penyampaian tersebut telah tersalurkan sesuai dengan sasaran ? 2.) Bagaimana bapak memahami kejelasan kebijakan program sekolah penggerak yang

No.	Fokus Penelitian	Dimensi	Pertanyaan
1.	2.	3.	4.
			dilaksanakan di sekolah? 3.) Apakah penyampaian informasi yang diberikan oleh lembaga terkait dalam sosialisasi dilakukan secara konsisten? apakah ada ketentuan jadwal dalam melaksanakan program sekolah penggerak di sekolah? apakah jadwal tersebut berjalan secara konsisten? Sejauh mana program sekolah penggerak yang dilaksanakan di sekolah? 4.) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam sosialisasi ?
2.	Bagaimana Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Bagorejo 03 Gumukmas Jember?	1. Sumber Daya Manusia 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas 5. Dana	1) Apakah sumber daya manusia yang ada di sekolah telah sesuai dengan program sekolah penggerak? Apakah guru yang ada di sekolah telah berkompetensi dalam melaksanakan program sekolah penggerak? Bagaimana bapak meningkatkan kompetensi guru di sekolah dalam melaksanakan program sekolah penggerak? 2) Dari mana bapak mendapatkan informasi mengenai kebijakan program sekolah penggerak? Seberapa mudah akses informasi mengenai program sekolah penggerak bagi guru dan staf di sekolah? platform atau media apa saja yang digunakan dalam mendapatkan informasi ? apakah semua anggota sekolah memahami informasi yang disampaikan tentang program sekolah

No.	Fokus Penelitian	Dimensi	Pertanyaan
1.	2.	3.	4.
			penggerak? 3) Kewenangan seperti apa yang dimiliki kepala sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan program sekolah penggerak ? apa ada perbedaan sebelum dan sesudah menjadi sekolah penggerak? 4) Fasilitas apa saja yang ada disekolah untuk mendukung dalam implementasi kebijakan program sekolah penggerak? Bagaimana kondisi fasilitas tersebut, apakah memadai untuk mendukung kegiatan program sekolah penggerak? a. Pendampingan konsultatif dan asimetris b. Penguatan sumber daya manusia disekolah c. Pembelajaran dengan paradigma baru d. Perencanaan berbasis data e. Digitalisasi sekolah 5) Dari mana sekolah mendapatkan dana/ anggaran dalam menjalankan program sekolah penggerak? Apakah dana/ anggaran yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan pelaksanaan program sekolah penggerak? 6) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menyiapkan sumber daya?
3.	Bagaimana Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di	1. Sikap pelaksana kebijakan	1) Apakah bapak selaku kepala sekolah dapat memahami tugas yang dilakukan dalam melaksanakan program sekolah penggerak? 2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program?

No.	Fokus Penelitian	Dimensi	Pertanyaan
1.	2.	3.	4.
	Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember?		
4.	Bagaimana Struktur Birokasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember?	1. Adanya SOP 2. Pembagian kerja melalui tanggung jawab kegiatan	1) Apakah sekolah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk mengimplementasikan program sekolah penggerak? Apakah bisa dijelaskan? 2) Bagaimana bapak mensosialisasikan SOP tersebut kepada seluruh anggota sekolah 3) Apakah seluruh anggota sekolah dapat mematuhi SOP yang berlaku ? apakah ada tantangan dalam penerapan SOP dalam program sekolah penggerak ? 4) Bagaimana pembagian kinerja yang ada di sekolah dalam melaksanakan kebijakan program sekolah penggerak yang memiliki kompeten sesuai dengan bidangnya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Komite Pembelajaran dan Guru

No	Fokus Penelitian	Dimensi	Pertanyaan
1.	2.	3.	4.
1.	Bagaimana Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember?	1. Penyampaian 2. Kejelasan 3. konsistensi	1. Bagaimana sekolah atau lembaga terkait melaksanakan sosialisasi program sekolah penggerak? Apakah penyampaian dalam sosialisasi dapat dipahami? 2. Bagaimana bapak/ibu memahami kejelasan kebijakan program sekolah penggerak yang dilaksanakan di sekolah? 3. Apakah penyampaian informasi yang diberikan oleh lembaga atau sekolah terkait dalam sosialisasi dilakukan secara konsisten? apakah jadwal dalam melaksanakan program sekolah penggerak di sekolah dilakukan sesuai dengan <i>time-line</i> yang telah ditetapkan? 4. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam dalam sosialisasi PSP?
2.	Bagaimana Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Bagorejo 03 Gumukmas Jember?	1. Sumber Daya Manusia 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas 5. Dana	1. apakah bapak/ibu sudah berkompetensi dalam menjalankan kebijakan program sekolah penggerak? Apakah ada program untuk peningkatan kompetensi guru yang dijalankan untuk mendukung program sekolah penggerak? 2. Bagaimana bapak/ibu mendapatkan informasi dalam mendukung 5 intervensi (pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan sumber daya

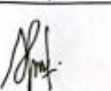
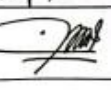
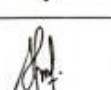
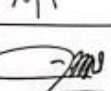
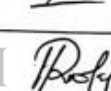
			manusia, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah) program sekolah penggerak? Apakah informasi tersebut telah memenuhi kebutuhan? 3. Kewenangan seperti apa yang diberikan bapak/ibu dalam melaksanakan program sekolah penggerak? 4. Apakah fasilitas dan kondisi sekolah telah mendukung dalam melaksanakan program sekolah penggerak? a. Pendampingan konsultatif dan asimetris b. Penguatan sumber daya manusia c. Pembelajaran dengan paradigma baru d. Perencanaan berbasis data e. Digitalisasi sekolah 5. Dari mana sekolah mendapatkan dana/ anggaran dalam menjalankan program sekolah penggerak? Apakah dana/ anggaran yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan pelaksanaan program sekolah penggerak? 6. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program ?
3.	Bagaimana Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar	1. Sikap pelaksana kebijakan	1. Apakah bapak/ibu telah memahami tugas yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan program sekolah

	Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember?		penggerak? 2. Apa kendala yang dialami selama menjalankan program ?
4.	Bagaimana Struktur Birokasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember?	1. Adanya SOP 2. Pembagian kerja melalui tanggung jawab kegiatan	1. Apakah sekolah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk mengimplementasikan program sekolah penggerak? 2. Bagaimana bapak/ibu menjalankan tugas dari program sekolah penggerak yang sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan? 3. Apa kendala yang dialami dalam implementasi SOP tersebut 4. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan dari program sekolah penggerak?

Lampiran 3

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak di Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03
Gumukmas Jember

No.	Tanggal pelaksanaan	Deskripsi pelaksanaan	Informan	TTD
1.	03, Januari 2025	Menyerahkan Surat Ijin Penelitian	Rizqi Maulida Rahayu, S.Pd	
2.	06, Januari 2025	Wawancara dengan Kepala Sekolah, observasi dan dokumentasi	Wawan Sisyanto, S.Pd	
3.	08, Januari 2025	Wawancara dengan guru (Bu Ifa dan Bu Anis) dan Observasi	Anis Mawati, S.Pd	
			Holifa Muzayyanah, S.Pd	
4.	15, Januari 2025	Melakukan Wawancara tambahan dengan kepala sekolah ,observasi dan dokumentasi	Wawan Sisyanto, S.Pd	
		Melakukan Wawancara tambahan dengan guru, observasi dan dokemntasi	Anis Mawati, S.Pd	
		Melakukan Wawancara tambahan dengan guru, observasi dan dokumentasi	Holifa Muzayyanah, S.Pd	
5.	22, Januari 2025	Pengambilan Surat Keterangan Selesai Penelitian	Rizqi Maulida Rahayu, S.Pd	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 22 Januari 2025
Kepala sekolah
SD Negeri Bagorejo 03

Wawan Sisyanto, S.Pd
NIP. 196705131991111001

Lampiran 4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. Mataram No. 01 Manglii. Telp. (0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
Website: [www.http://ftik.uinkhas-jember.ac.id](http://ftik.uinkhas-jember.ac.id) Email: tarbiyah.iainjember@gmail.com

Nomor : B-9788/In.20/3.a/PP.009/01/2025

Sifat : Biasa

Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Bagorejo 03 Gumukmas Jember
Jl. Ponpes Darul Muhajirin no. 100 Bagorejo Gumukmas

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

NIM : 211101030023
Nama : CAHYA PUTRI ANGGRAENI
Semester : Semester delapan
Program Studi : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI BAGOREJO 03 GUMUKMAS JEMBER" selama 14 (empat belas) hari di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu WAWAN SISYANTO, S.Pd

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 02 Januari 2025

an Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



KHOTIBUL UMAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SD NEGERI BAGOREJO 03

Jl. Ponpes. Darul Muhajirin No. 100 Bagorejo - Gumukmas - Jember 68165
 Email : sdnbagorejo3@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/08/35.09.310.06.20525101/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SD Negeri Bagorejo 03, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa:

Nama : CAHYA PUTRI ANGGRAENI
 NIM : 211101030023
 Program Studi : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
 Perguruan Tinggi : UIN KHAS JEMBER

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan kegiatan penelitian di SD Negeri Bagorejo 03 terhitung dari tanggal 06 Januari s/d 21 Januari 2025 dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI BAGOREJO 03 GUMUKMAS JEMBER"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Januari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



Kepala Sekolah
 SD Negeri Bagorejo 03

WAWAN SISYANTO, S.Pd
 NIP. 19670513 199111 1 001

Lampiran 6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
 Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136
 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: info@uin-khas.ac.id
 Website: www.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS CEK TURNITIN

Bersama ini disampaikan bahwa karya ilmiah yang disusun oleh

Nama : CAHYA PUTRI ANGGRAENI

NIM : 211101030023

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Judul Karya Ilmiah : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI
 SEKOLAH DASAR NEGERI BAGOREJO 03 GUMUKMAS JEMBER

telah lulus cek similarity dengan menggunakan aplikasi turnitin UIN KHAS Jember dengan skor akhir sebesar (16,8%)

1. BAB I : 20 %
2. BAB II : 29 %
3. BAB III : 20%
4. BAB IV : 7 %
5. BAB V : 8 %

Demikian surat ini disampaikan dan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 April 2025

Penanggung Jawab Turnitin

FTIK UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

(Ulfa Dina Novianda, S.Sos.I., M.Pd.)

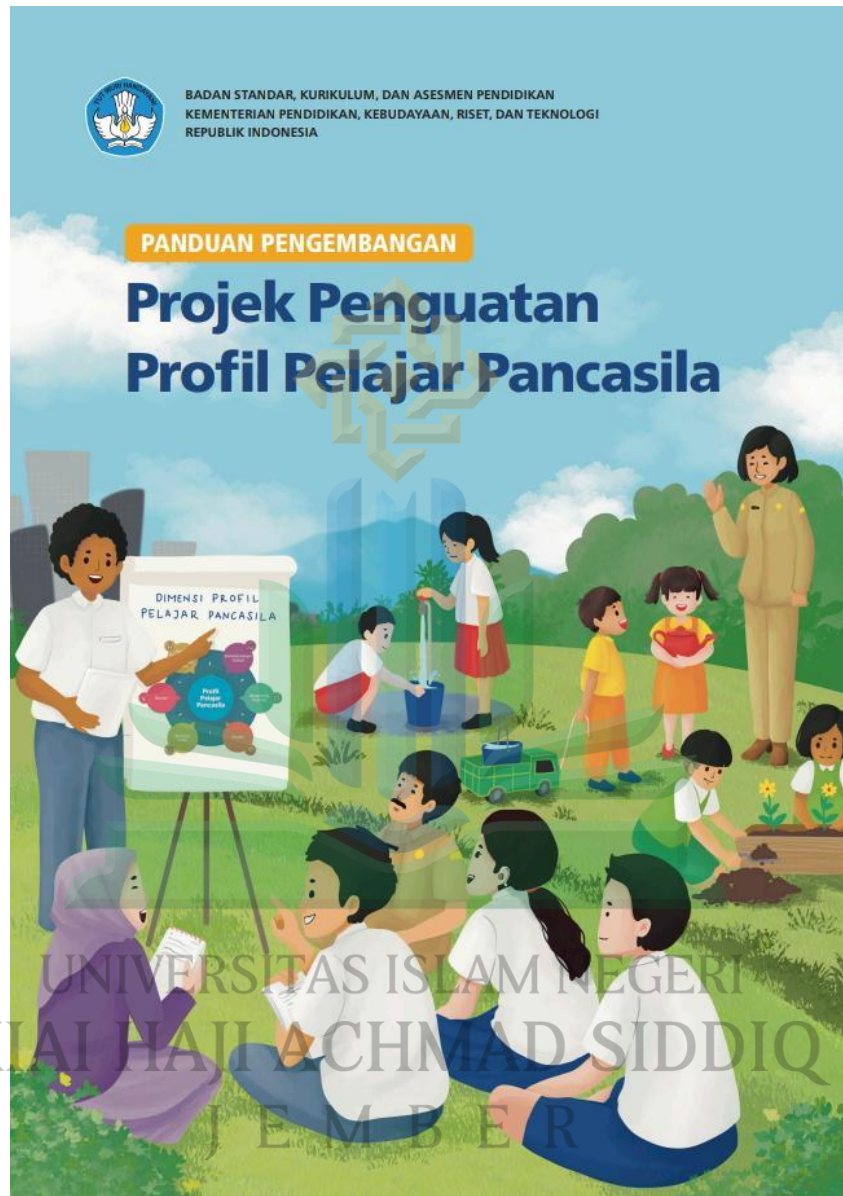
NIP. 19308112023212019

NB: 1. Melampirkan Hasil Cek Turnitin per Bab.

2. Skor Akhir adalah total nilai masing-masing BAB Kemudian di bagi 5.

Lampiran 7

Tampilan buku panduan



Buku panduan P5 dapat juga diakses melalui

<https://www.datadikdasmen.com/2022/02/panduan-pengembangan-projek-ppp.html?m=1>

Lampiran 8

Dokumentasi kegiatan penelitian



BIODATA PENULIS

Nama : Cahya Putri Anggraeni
 NIm : 211101030023
 Tempat/Tgl Lahir : Jember, 11 Januari 2003
 Alamat : Dusun Karanganyar, RT002/RW006, Desa Karangrejo,
 Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember
 Email : cahyaputri1101@gmail.com
 Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
 Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Riwayat Pendidikan:

1. RA Perwanida 08 Gumukmas
2. MI Ma'arif 01 Gumukmas
3. MTs Darul Ulum Gumukmas
4. Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember